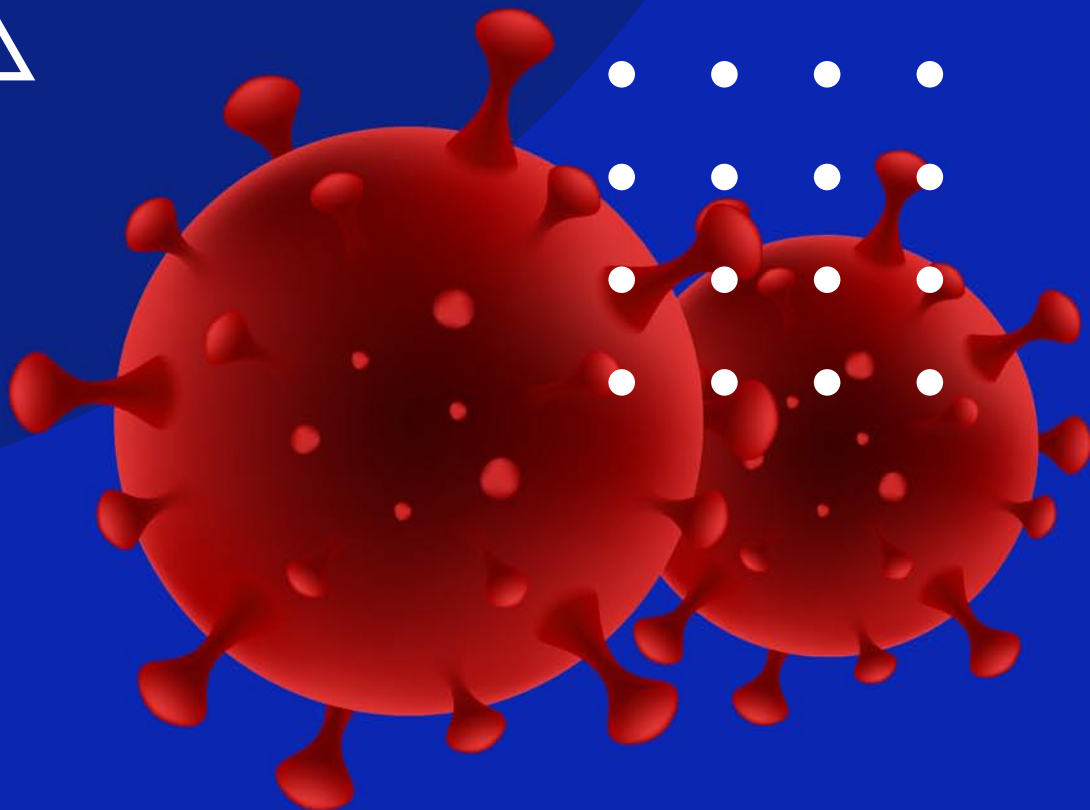




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

LAPORAN KEUANGAN UAPPA-E1

BERGERAK BERSAMA CEGAH COVID-19
MEMAKAI MASKER
MENCUCI TANGAN
MENJAGA JARAK

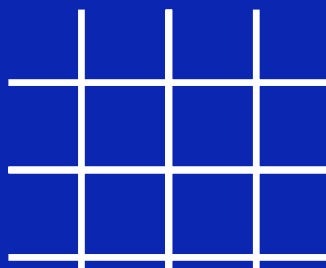


 @DJPbKemenkeu_RI

 ditjenperbendaharaan

 @DJPb.KemenkeuRI

audited
2019



LAPORAN KEUANGAN

UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON I
PERIODE 31 DESEMBER 2019 *AUDITED*



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2020
Direktur Jenderal,



8 Andin Hadiyanto 

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	3
II. Neraca	4
III. Laporan Operasional	5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	6
V. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	55
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	60
F. Pengungkapan Penting Lainnya	64
VI. Lampiran Laporan Keuangan UAPPA-E1	
✓ LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	69
✓ LRA Belanja dan Pengembalian Belanja	70
✓ Neraca Percobaan	71
✓ Tindak Lanjut atas Temuan BPK	72
✓ Daftar Saldo Rekening Pemerintah	73
✓ Lampiran Pendukung Laporan Keuangan	74
✓ Daftar Satuan Kerja Lingkup DJPb	75
✓ Telaah Laporan Keuangan	76



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5200 3812436 FAKSIMILE 3846402, SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Periode Tahun 2019 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggung jawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2020
Direktur Jenderal,

8 Andin Hadiyanto W

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Periode 31 Desember 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp1.745.454.166.215,00** atau mencapai **12,76%** dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp13.677.833.603.066,00

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp7.344.623.352.416,00** atau mencapai **58,43%** dari alokasi anggaran sebesar Rp12.570.392.452.000,00

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2019.

Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar **Rp37.728.407.073.698,00** yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp119.218.010.713.990,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp11.305.706.062.466,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp64.675.000,00; Investasi Jangka Panjang (neto) sebesar Rp3.152.741.173.643,00 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp4.051.884.448.599,00

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp7.278.767.210.563,00** dan **Rp30.449.639.863.135,00**

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp1.744.695.208.161,00** sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp5.755.110.319.558,00**,

sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp4.010.415.111.397,00. Jumlah surplus/defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar defisit Rp118.191.844,00 dan Rp0,00 sehingga entitas mengalami defisit-LO sebesar **Rp4.010.533.303.241,00**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar **Rp32.537.936.499.062,00** ditambah defisit-LO sebesar Rp4.010.533.303.241,00 kemudian ditambah dengan koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas Rp382.399.097.591,00 ditambah transaksi antar entitas senilai Rp1.539.837.569.723,00 sehingga Ekuitas mengalami penurunan senilai Rp2.088.296.635.927,00 dan Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai **Rp30.449.639.863.135,00**

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca. Laporan Operasional. dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk per 31 Desember 2019 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019		% thd Angg 2019	31 DESEMBER 2018		% thd Angg 2018	% REALISASI
		ANGGARAN	REALISASI		ANGGARAN	REALISASI		
PENDAPATAN								
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	13.677.833.603.066	1.745.454.166.215	12,76	11.554.836.676.450	15.563.997.940.851	134,70	11
JUMLAH PENDAPATAN		13.677.833.603.066	1.745.454.166.215	12,76	11.554.836.676.450	15.563.997.940.851	134,70	11
BELANJA								
Belanja Operasi	B.2.							
Belanja Pegawai	B.3	547.069.345.000	545.400.708.101	99,69	547.063.610.000	539.713.131.026	98,66	101
Belanja Barang	B.4	11.726.722.822.000	6.505.770.048.399	55,48	11.734.710.739.000	7.046.237.325.619	60,05	92
Belanja Modal	B.5	296.600.285.000	293.452.595.916	98,94	401.080.185.000	398.404.847.975	99,33	74
JUMLAH BELANJA		12.570.392.452.000	7.344.623.352.416	58,43	12.682.854.534.000	7.984.355.304.620	62,95	92

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	NAIK/TURUN	% NAIK (TURUN)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	42.101.262	1.054.796	41.046.466	3891,41%
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	14.582.375.767	916.861.713	13.665.514.054	1490,47%
Kas Pada Badan Layanan Umum	C.3	16.577.229.461.958	21.167.898.964.152	(4.590.669.502.194)	-21,69%
Investasi Jangka Pendek-BLU	C.4	437.918.493.104	-	437.918.493.104	-
Belanja Dibayar di Muka (prepaid)	C.5	2.106.502.251.493	10.770.467.823	2.095.731.783.670	19458,13%
Uang Muka Belanja (prepayment)	C.6	3.277.525.736	2.857.163.927	420.361.809	14,71%
Pendapatan yang masih harus diterima	C.7	47.922.875.270	39.922.005.718	8.000.869.552	20,04%
Piutang PNB	C.8	856.181.203	457.802.459	398.378.744	87,02%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB	C.9	(15.142.173)	(13.150.279)	(1.991.894)	15,15%
Bagian Lancar TP/TGR	C.10	46.999.200	58.999.200	(12.000.000)	-20,34%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TP/TGR	C.11	(234.996)	(294.996)	60.000	-20,34%
Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.12	-	145.825.271	(145.825.271)	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang dari Kegiatan Operasional BLU	C.13	-	(729.125)	729.125	-
Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.14	-	75.594.841	(75.594.841)	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih- Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	C.15	-	(377.974)	377.974	-
Persediaan	C.16	29.647.826.166	31.980.514.114	(2.332.687.948)	-7,29%
Jumlah Aset Lancar		19.218.010.713.990	21.255.070.701.640	(2.037.059.987.650)	-9,58%
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	C.17	3.152.741.173.643	1.352.498.396.761	1.800.242.776.882	-
Jumlah Investasi Jangka Panjang		3.152.741.173.643	1.352.498.396.761	1.800.242.776.882	0,00%
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Tagihan TP/TGR	C.18	2.135.123.783	2.151.214.715	(16.090.932)	-0,75%
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.19	(2.070.448.783)	(2.074.599.715)	4.150.932	-0,20%
Jumlah Piutang Jangka Panjang		64.675.000	76.615.000	(11.940.000)	-15,58%
ASET TETAP					
Tanah	C.20	9.348.390.606.016	9.245.211.622.150	103.178.983.866	1,12%
Peralatan dan Mesin	C.21	1.426.008.211.914	1.355.084.962.397	70.923.249.517	5,23%
Gedung dan Bangunan	C.22	1.847.424.921.893	1.678.476.219.861	168.948.702.032	10,07%
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.23	14.163.283.947	16.236.440.328	(2.073.156.381)	-12,77%
Aset Tetap Lainnya	C.24	12.405.195.001	11.826.309.371	578.885.630	4,89%
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.25	6.867.365.359	31.264.180.042	(24.396.814.683)	-78,03%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.26	(1.349.553.521.664)	(1.224.575.852.743)	(124.977.668.921)	10,21%
Jumlah Aset Tetap		11.305.706.062.466	11.113.523.881.406	192.182.181.060	1,73%
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	C.27	603.946.413.123	517.367.869.108	86.578.544.015	16,73%
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	C.28	3.847.258.826.357	2.647.501.603.239	1.199.757.223.118	-
Aset Lain-Lain	C.29	154.957.296.613	102.681.897.360	52.275.399.253	50,91%
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.30	(554.278.087.494)	(427.778.134.183)	(126.499.953.311)	29,57%
Jumlah Aset Lainnya		4.051.884.448.599	2.839.773.235.524	1.212.111.213.075	42,68%
JUMLAH ASET		37.728.407.073.698	36.560.942.830.331	1.167.464.243.367	3,19%
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.31	277.739.178.079	22.216.800.846	255.522.377.233	1150,13%
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.32	35.913.888	30.207.658	5.706.230	0,00%
Pendapatan Diterima di Muka	C.33	936.579.973	758.267.969	178.312.004	0,00%
Uang Muka dari KPPN	C.34	42.101.262	1.054.796	41.046.466	3891,41%
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.35	13.437.361	-	13.437.361	#DIV/0!
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		278.767.210.563	23.006.331.269	255.760.879.294	1111,70%
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang jangka panjang BLU kepada BUN	C.36	7.000.000.000.000	4.000.000.000.000	3.000.000.000.000	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		7.000.000.000.000	4.000.000.000.000	3.000.000.000.000	
JUMLAH KEWAJIBAN		7.278.767.210.563,00	4.023.006.331.269	3.255.760.879.294	80,93%
EKUITAS					
Ekuitas	C.37	30.449.639.863.135	32.537.936.499.062	(2.088.296.635.927)	-6,42%
JUMLAH EKUITAS		30.449.639.863.135	32.537.936.499.062	(2.088.296.635.927)	-6,42%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		37.728.407.073.698	36.560.942.830.331	1.167.464.243.367	3,19%

III. LAPORAN OPERASIONAL

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	Kenaikan/ Penurunan	%
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	1.744.695.208.161	15.571.011.804.817	(13.826.316.596.656)	-88,80%
JUMLAH PENDAPATAN		1.744.695.208.161	15.571.011.804.817	(13.826.316.596.656)	-88,80%
BEBAN					
Beban Pegawai	D.2	606.351.529.456	586.920.363.333	19.431.166.123	3,31%
Beban Persediaan	D.3	26.262.357.870	27.832.742.232	(1.570.384.362)	-5,64%
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.498.728.435.300	5.783.267.067.556	(1.284.538.632.256)	-22,21%
Beban Pemeliharaan	D.5	145.356.327.193	149.437.265.754	(4.080.938.561)	-2,73%
Beban Perjalanan Dinas	D.6	204.489.784.368	189.451.883.938	15.037.900.430	7,94%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	273.925.210.758	273.893.466.342	31.744.416	0,01%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(3.325.387)	(3.957.523)	632.136	-15,97%
JUMLAH BEBAN		5.755.110.319.558	7.010.798.831.632	(1.255.688.512.074)	-17,91%
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(4.010.415.111.397)	8.560.212.973.185	(12.570.628.084.582)	-146,85%
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar		(3.848.091.953)	(2.390.935.049)	(1.457.156.904)	60,95%
Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		3.729.900.109	3.184.872.393	545.027.716	17,11%
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		(118.191.844)	793.937.344	(912.129.188)	-114,89%
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(4.010.533.303.241)	8.561.006.910.529	(12.571.540.213.770)	-146,85%
POS LUAR BIASA					
Pendapatan PNPB		-	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-	-	-
Beban Persediaan		-	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT LO		(4.010.533.303.241)	8.561.006.910.529	(12.571.540.213.770)	-146,85%

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 31 DESEMBER 2018

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	NAIK/TURUN	%
EKUITAS AWAL	E.1	32.537.936.499.062	22.195.161.238.061	10.342.775.261.001	46,60%
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(4.010.533.303.241)	8.561.006.910.529	(12.571.540.213.770)	-68,10%
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR					
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		382.399.097.591	34.676.913.260	347.722.184.331	1002,75%
PENYESUAIAN NILAIASET	E.3	-	-	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4	12.260.000	13.512.500	(1.252.500)	-9,27%
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.5	(99.887.190)			
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.6	125.412.211.799	-	125.412.211.799	0,00%
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.7	15.823.943.665	(352.414.822)	16.176.358.487	-4590,15%
LAIN-LAIN	E.8	241.250.569.317	35.015.815.582	206.234.753.735	588,98%
				-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.9	1.539.837.569.723	1.747.091.437.212	(207.253.867.489)	-842,97%
EKUITAS AKHIR	E.10	30.449.639.863.135	32.537.936.499.062	(2.088.296.635.927)	-6,42%

V.CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM**A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perbendaharaan**

Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terbentuknya tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan Negara di Indonesia, ketika semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. Secara paralel, reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan perubahan organisasional di tubuh Kementerian Keuangan guna menyelaraskan perangkat organisasi dengan penegasan fungsi Kementerian Keuangan selaku institusi Pengelola Fiskal.

Selaku institusi Pengelola Fiskal, Kementerian Keuangan membagi pemisahan kewenangan, yang antara lain adalah fungsi-fungsi pengkajian, penganggaran, dan perbendaharaan. Inilah alasan kuat terjadinya penyempurnaan organisasi *reorganisasi* dengan "terbentuknya" tiga organisasi dengan nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional, suatu Perubahan organisasi yang ditandai dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda namun berada dalam satu naungan organisasi, serta menyatukan fungsi-fungsi yang sama namun tersebar di berbagai unit.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. "*Core function*"nya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan fungsi paling dominan, yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas Negara, pengelolaan barang milik kekayaan Negara, dan pengelolaan hutang luar negeri berada di bawah unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran. Sementara itu, fungsi perbendaharaan lainnya tersebar di beberapa unit Eselon I dan II yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada Pusat Manajemen Obligasi Negara, pengelolaan penerusan pinjaman dan pengelolaan kasnya pada Ditjen Lembaga Keuangan, dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan Akuntansi

Keuangan Negara, serta fungsi pengolahan data pada Kantor Pengolahan Data Informasi Keuangan Regional.

Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburkan unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 Sekretariat Ditjen dan 7 Direktorat teknis pada kantor pusat serta Kantor Wilayah DJPB dan KPPN pada kantor instansi vertikal.

Pelantikan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh pejabat Eselon II pada bulan Oktober 2004 pun merupakan titik awal sinergi organisasi baru tersebut.

Landasan Kegiatan Operasional Direktorat Jenderal Perbendaharaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas bidang perbendaharaan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan

anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;

5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkomitmen dengan visi *“Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia”/ “To be a world-class state treasury manager.”* Untuk mewujudkannya akan dilakukan misi sebagai berikut:

- Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien dan optimal;
- Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel
- Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu;
- Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal, professional dan modern.

Susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan strategis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standardisasi, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran.

3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
4. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
Direktorat Sistem Manajemen Investasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi.
5. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan Badan Layanan Umum.
6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
7. Direktorat Sistem Perbendaharaan;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan.
8. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.

Selain itu terdapat organisasi vertikal Ditjen Perbendaharaan, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Jumlah entitas akuntansi adalah 216 satuan kerja yang terdiri dari 34 Kantor Wilayah, 98 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1, 81 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2, dan 3 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus. Selain satker vertikal tersebut pada DJPb terdapat juga 3 satker Kantor Pusat dan 2 Satuan Kerja Badan Layanan Umum sehingga total satuan kerja DJPb adalah **221** satuan kerja. Rincian entitas tersebut tersaji dalam lampiran Laporan Keuangan. Tugas unit vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut:

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi,

bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 dan A2;
Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah;
Mempunyai tugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan;
Mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi;
Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya.

Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga terdapat entitas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang koordinasi pelaporan keuangannya dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan mempunyai tugas yaitu:

1. Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN):
Mempunyai tugas menyempurnakan pengelolaan keuangan negara melalui integrasi sistem manajemen keuangan negara, penerapan

akuntansi akrual, penyatuan database pengelolaan keuangan negara, dan kemudahan akses bagi pengguna. SPAN akan meningkatkan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

2. Satuan Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP):

Mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

3. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS):

Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Satuan Kerja Pusat Investasi Pemerintah:

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lokasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkedudukan di Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 Jakarta Pusat.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pada tahun 2017 satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan *Piloting* aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi

(SAKTI) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi.

SAKTI adalah aplikasi yang dibangun guna mendukung pelaksanaan sistem perbendaharaan dan penganggaran negara pada tingkat instansi meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul bendahara, modul persediaan, modul aset tetap, modul akuntansi dan pelaporan dengan memanfaatkan sumber daya dan teknologi informasi.

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan per 31 Desember 2018 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

*Basis
Akuntansi*

A.3. Basis Akuntansi

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau

sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan per 31 Desember 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

*Pendapatan-
LRA*

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

*Pendapatan-
LO*

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai

penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Pengelolaan BMN
 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi

aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.
- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan

oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pada tahun 2018 perubahan nilai minimum kapitalisasi aset tetap mengalami perubahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Perubahan pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap renovasi (ATR) peralatan dan mesin pada peraturan sebelumnya tidak diatur menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap renovasi (ATR) gedung dan bangunan pada peraturan sebelumnya tidak diatur menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik

Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, jaringan dan Irigasi berupa Jalan Jembatan dan Bangunan Air pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Termasuk dalam ruang lingkup objek revaluasi adalah aset tetap pada Kementerian/Lembaga yang sedang dilaksanakan pemanfaatan. Pelaksanaan penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018. Berdasarkan pertimbangan efisiensi anggaran dan waktu penyelesaian, pelaksanaan penilaian dilakukan dengan survei lapangan untuk objek penilaian berupa tanah dan tanpa survei lapangan untuk objek penilaian selain tanah.

- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

*Piutang
Jangka
Panjang*

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau akan direalisasikan lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang antara lain adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara/daerah.
- Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri atau bukan pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

*Investasi
Jangka
Panjang*

Investasi Jangka Panjang

- Investasi Jangka Panjang BLU merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan persetujuan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dalam rangka penugasan sesuai karakteristik BLU.
- Investasi Jangka Panjang Non-Permanen dalam bentuk tagihan atas pemberian pinjaman dan/atau tagihan dana bergulir diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

- Dana yang diterima oleh BLU dari satuan kerja Bagian Anggaran BUN untuk kegiatan investasi diakui dan dicatat oleh BLU sebagai Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan atau Diinvestasikan dan sekaligus diakui dan dicatat sebagai Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN di Neraca.
- Pengeluaran kas atas Dana Kelolaan BLU untuk kegiatan penginvestasian diakui dan dicatat oleh BLU sebagai reklasifikasi dari Dana Kelolaan BLU yang belum Digulirkan /Diinvestasikan menjadi Investasi Non Permanen Lainnya di Neraca.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Cara Perolehan Aset Tak Berwujud:

- a. Pembelian;
- b. Pengembangan secara internal;
- c. Pertukaran;
- d. Kerjasama;
- e. Donasi/hibah;
- f. Warisan Budaya/Sejarah.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud:

- a. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat terbatas;
- b. Aset Tak Berwujud dengan umur manfaat yang tak terbatas.

Amortisasi Aset Tak Berwujud:

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251/PMK.06/2015 tentang Tata Cara Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat berdasarkan SAP berbasis Akrua dilaksanakan mulai

Tahun Anggaran 2016.

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
- Kewajiban pada satuan kerja BPDP Kelapa Sawit diatur kebijakan sebagai berikut :
 - a. Utang atas permintaan kelebihan bayar pungutan oleh eksportir (lebih pungut) diakui apabila telah ada surat ketetapan lebih bayar dari BPDPKS atas permohonan pengembalian kelebihan bayar dari eksportir.
 - b. Utang atas penyaluran biodiesel diakui pada saat Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) menyampaikan tagihan kepada BPDPKS yang nilainya telah diverifikasi oleh Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

- c. Utang terhadap biaya riset diakui pada saat perjanjian riset ditandatangani oleh BPDPKS dan Lembaga riset sebesar pencairan Tahap I. Pengakuan utang atas biaya riset tahap II dan III diakui sebesar hasil monitoring tahap sebelumnya.
- d. Utang terhadap biaya surveyor dicatat apabila telah ada tagihan dari surveyor yang dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS) dan telah diverifikasi oleh PPK.

Ekuitas**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

**Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih**
(8) Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah.
- Kualitas piutang didasarkan pada kondisi masing-masing piutang pada tanggal pelaporan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.06/2014 tentang Penentuan Kualitas Piutang dan Pembentukan Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Kementerian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara. Kriteria kualitas piutang diatur sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%

Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%
-------	---	------

*Penyusutan
Aset Tetap*

(9) Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

10) Implementasi Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pertama Kali

Implementasi
Akuntansi
Pemerintah
Berbasis
Akrual
Pertama Kali

Mulai tahun 2015 Pemerintah mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual sesuai dengan amanat PP No. 71 Tahun 2010 tentang Akuntansi Pemerintahan. Implementasi tersebut memberikan pengaruh pada beberapa hal dalam penyajian laporan keuangan. Pertama, Pos-pos ekuitas dana pada neraca per 31 Desember 2014 yang berbasis *cash toward accrual* direklasifikasi menjadi ekuitas sesuai dengan akuntansi berbasis akrual. Kedua, keterbandingan penyajian akun-akun tahun berjalan dengan tahun sebelumnya dalam Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas tidak dapat dipenuhi. Hal ini diakibatkan oleh penyusunan dan penyajian akuntansi berbasis akrual pertama kali mulai dilaksanakan tahun 2015.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan.

perubahan berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut :

URAIAN	31 Desember 2019	
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
Pendapatan		
Pendapatan	Rp 13.677.833.603.066	Rp 13.677.833.603.066
Pendapatan	Rp 13.677.833.603.066	Rp 13.677.833.603.066
Belanja		
Belanja Pegawai	Rp 531.313.891.000	Rp 547.069.345.000
Belanja Barang	Rp 704.322.825.000	Rp 676.687.059.000
Belanja Modal	Rp 271.990.323.000	Rp 294.636.048.000
Jumlah Belanja	Rp 1.507.627.039.000	Rp 1.518.392.452.000
Belanja BLU		
Belanja Barang-BLU	Rp 11.050.035.763.000	Rp 11.050.035.763.000
Belanja Modal-BLU	Rp 1.964.237.000	Rp 1.964.237.000
Jumlah Belanja-BLU	Rp 11.052.000.000.000	Rp 11.052.000.000.000
Total Jumlah Belanja	Rp 12.559.627.039.000	Rp 12.570.392.452.000

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Direktorat Jenderal Perbendaharaan maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	31 DESEMBER 2019	
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi
Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	Rp 21.062.120.000	Rp 18.666.262.000
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	Rp 9.186.898.000	Rp 8.675.767.000
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Rp 8.326.247.000	Rp 7.779.647.000
Peningkatan Pengelolaan Kas Negara	Rp 10.711.503.000	Rp 9.601.421.000
Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman	Rp 21.040.384.000	Rp 20.155.225.000
Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan	Rp 13.536.003.000	Rp 12.188.424.000
Pengembangan Sistem Perbendaharaan	Rp 228.720.200.000	Rp 225.403.082.000
Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara	Rp 393.189.371.000	Rp 374.745.629.000
Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah	Rp 183.714.894.000	Rp 175.862.103.000
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan	Rp 618.139.419.000	Rp 664.460.012.000
Jumlah Rupiah Murni	Rp 1.507.627.039.000	Rp 1.517.537.572.000
Perhimpunan pengelolaan dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp 10.992.000.000.000	Rp 10.992.000.000.000
Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro	Rp 60.000.000.000	Rp 60.000.000.000
Jumlah BLU	Rp 11.052.000.000.000	Rp 11.052.000.000.000
Pengembangan Sistem Perbendaharaan	Rp -	Rp 854.880.000
Jumlah Hibah Luar Negeri	Rp -	Rp 854.880.000
Jumlah	Rp 12.559.627.039.000	Rp 12.570.392.452.000

Realisasi Pendapatan
Rp1.745.454.166.215,00

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp1.745.454.166.215,00** atau mencapai **12,76%** dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp13.677.833.603.066,00**. Pendapatan lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari Pendapatan Badan Layanan Umum, Pendapatan Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa, Pendapatan Denda dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	31 DESEMBER 2019		
	Estimasi Pendapatan	Realisasi	% Real Angg.
Usaha Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	Rp 8.350.000	Rp 77.867.900	194,22%
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	Rp 84.518.399	Rp 1.015.400.528	443,02%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	Rp 279.584.000	Rp 806.208.513	188,41%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	Rp 1.553.405.000	Rp 3.054.946.291	108,41%
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	Rp 172.166.667	Rp 203.817.599	44,45%
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	Rp -	Rp 650.393.041	
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp 145.800.000	Rp 291.947.319	175,41%
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp 66.000.000	Rp 521.704.295	783,28%
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp 50.000.000	Rp 323.356.698	450,68%
Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	Rp 3.200.000.000	Rp 2.527.763.270	41,35%
Pendapatan Anggaran Lain-lain	Rp 1.350.000.000	Rp 6.001	0,00%
Sub total	Rp 6.909.824.066	Rp 9.473.411.455	137,10%
Pendapatan Jasa Layanan Umum Pendapatan Investasi	Rp 53.169.511.600	Rp 57.338.299.441	46,96%
Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp 13.298.000.000.000	Rp -	0,00%
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	Rp 319.754.267.400	Rp 1.676.067.877.018	254,06%
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp -	Rp 2.746.865.239	
Pendapatan Lain-lain BLU	Rp -	Rp 138.814.288	
Jumlah BLU	Rp 13.670.923.779.000	Rp 1.736.291.855.986	12,70%
Pengembalian	Rp -	Rp 311.101.226	0,00%
Jumlah Netto	Rp 13.677.833.603.066	Rp 1.745.454.166.215	12,76%

Realisasi Pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar **88,79%** persen dibandingkan realisasi pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Penurunan pendapatan secara umum disebabkan menurunnya pendapatan yang berasal dari Pendapatan

Jasa Layanan Umum BLU, yaitu tidak adanya pungutan penjualan kelapa sawit yang masih di bawah standar minimum harga minyak sawit mentah sebesar US\$570 per ton sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 152/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2018 Tentang Tarif Layanan BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit .

Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN)%
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN dan Iuran Badan Usaha	Rp 4.954.423.232	Rp 3.980.585.486	24,46%
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan	Rp 203.817.599	Rp 152.836.870	33,36%
Pendapatan Denda	Rp 650.393.041	Rp 669.469.193	-2,85%
Pendapatan Lain-Lain	Rp 3.664.777.583	Rp 3.368.479.615	8,80%
Jumlah	Rp 9.473.411.455	Rp 8.171.371.164	15,93%
Pendapatan Jasa Layanan Umum BLU	Rp 57.338.299.441	Rp 14.445.510.804.516	-99,60%
Pendapatan BLU Lainnya	Rp 1.678.953.556.545	Rp 1.110.320.414.425	51,21%
Jumlah BLU	Rp 1.736.291.855.986	Rp 15.555.831.218.941	-88,84%
Pengembalian	Rp 311.101.226	Rp 4.649.254	
Jumlah Netto	Rp 1.745.454.166.215	Rp 15.563.997.940.851	-88,79%

Realisasi Belanja

Rp7.344.623.352.416,00

B.2. REALISASI BELANJA

Realisasi Belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar **Rp7.344.623.352.416,00** atau **58,43%** (termasuk realisasi belanja satker BLU) dari anggaran belanja sebesar **Rp12.570.392.452,00**. Rincian anggaran dan realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

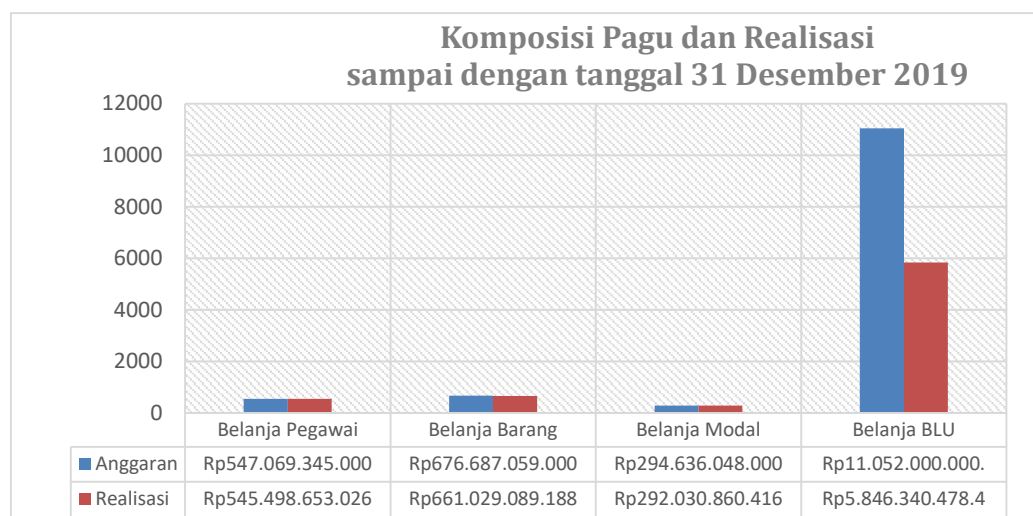
Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja 31 Desember 2019

URAIAN	31 DESEMBER 2019		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	Rp 547.069.345.000	Rp 545.498.653.026	99,71
Belanja Barang	Rp 676.687.059.000	Rp 661.029.089.188	97,69
Belanja Modal	Rp 294.636.048.000	Rp 292.030.860.416	99,12
Jumlah	Rp 1.518.392.452.000	Rp 1.498.558.602.630	98,69
Belanja Barang-BLU	Rp 11.050.035.763.000	Rp 5.844.918.742.988	52,90
Belanja Modal-BLU	Rp 1.964.237.000	Rp 1.421.735.500	72,38
Jumlah BLU	Rp 11.052.000.000.000	Rp 5.846.340.478.488	52,90
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp 275.728.702	0,00
Total Belanja	Rp 12.570.392.452.000	Rp 7.344.623.352.416	58,43

Sedangkan realisasi belanja berdasarkan kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	31 DESEMBER 2019		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran	Rp 18.666.262.000	Rp 18.549.531.715	99,37%
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	Rp 8.675.767.000	Rp 8.416.323.877	97,01%
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	Rp 7.779.647.000	Rp 7.542.178.327	96,95%
Peningkatan Pengelolaan Kas Negara	Rp 9.601.421.000	Rp 9.324.799.814	97,12%
Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman	Rp 20.155.225.000	Rp 19.540.846.448	96,95%
Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis Perbendaharaan	Rp 12.188.424.000	Rp 11.861.771.580	97,32%
Pengembangan Sistem Perbendaharaan	Rp 225.403.082.000	Rp 223.458.633.304	99,14%
Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara	Rp 374.745.629.000	Rp 369.531.096.661	98,61%
Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah	Rp 175.862.103.000	Rp 173.776.972.955	98,81%
Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan	Rp 664.460.012.000	Rp 655.830.566.949	98,70%
Jumlah Rupiah Murni	Rp 1.517.537.572.000	Rp 1.497.832.721.630	98,70%
Pengembangan Sistem Perbendaharaan	Rp 854.880.000	Rp 725.881.000	
Jumlah Hibah Luar Negeri	Rp 854.880.000	Rp 725.881.000	
Perhimpunan Pengelolaan dan Penyaluran Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp 10.992.000.000.000	Rp 5.815.534.780.050	52,91%
Pengelolaan Dana Bergulir Usaha Mikro	Rp 60.000.000.000	Rp 30.805.698.438	51,34%
Jumlah BLU	Rp 11.052.000.000.000	Rp 5.846.340.478.488	52,90%
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp 275.728.702	0,00%
Jumlah	Rp 12.570.392.452.000	Rp 7.344.623.352.416	58,43%

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Dibandingkan dengan realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar **8,01%**. Penurunan tersebut sebagian besar terjadi pada Belanja Barang dan Belanja Barang BLU dikarenakan adanya penurunan pagu anggaran dan penurunan belanja pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit yang berhubungan dengan tugas dan fungsi BPDP Kelapa Sawit.

Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	Rp 545.498.653.026	Rp 539.803.416.813	1,06%
Belanja Barang	Rp 661.029.089.188	Rp 659.252.576.242	0,27%
Belanja Modal	Rp 292.030.860.416	Rp 397.292.901.358	-26,49%
Jumlah	Rp 1.498.558.602.630	Rp 1.596.348.894.413	-6,13%
Belanja Barang BLU	Rp 5.844.918.742.988	Rp 6.387.135.347.203	-8,49%
Belanja Modal BLU	Rp 1.421.735.500	Rp 1.127.931.000	26,05%
Jumlah BLU	Rp 5.846.340.478.488	Rp 6.388.263.278.203	-8,48%
Pengembalian	Rp (275.728.702)	Rp (256.867.996)	7,34%
Jumlah Netto	Rp 7.344.623.352.416	Rp 7.984.355.304.620	-8,01%

Belanja Pegawai

Rp545.400.708.101,00

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp545.400.708.101,00** Dan **Rp539.713.131.026,00** Realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar **1,05%** persen dari realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan gaji di tahun 2019.

Perbandingan Belanja Pegawai 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji Pokok PNS	Rp 367.178.328.950	Rp 361.991.021.833	1,43%
Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 5.937.262	Rp 5.073.367	17,03%
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 25.752.711.782	Rp 25.592.461.326	0,63%
Belanja Tunj. Anak PNS	Rp 7.219.880.420	Rp 7.174.883.468	0,63%
Belanja Tunj. Struktural PNS	Rp 19.618.020.000	Rp 19.568.450.000	0,25%
Belanja Tunj. Fungsional PNS	Rp 334.550.000	Rp 236.520.000	41,45%
Belanja Tunj. PPh PNS	Rp 1.043.479.662	Rp 755.112.649	38,19%
Belanja Tunj. Beras PNS	Rp 16.728.296.600	Rp 17.397.069.120	-3,84%
Belanja Uang Makan PNS	Rp 55.097.230.600	Rp 55.579.318.650	-0,87%
Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	Rp 63.350.000	Rp 57.825.000	9,55%
Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	Rp 1.245.385.000	Rp 1.269.440.000	-1,89%
Belanja Tunjangan Umum PNS	Rp 13.695.285.000	Rp 14.236.380.000	-3,80%
Belanja Uang Lembur	Rp 37.516.197.750	Rp 35.939.861.400	
Jumlah Belanja Kotor	Rp 545.498.653.026	Rp 539.803.416.813	1,06%
Pengembalian Belanja Pegawai	Rp (97.944.925)	Rp (90.285.787)	8,48%
Jumlah Belanja	Rp 545.400.708.101	Rp 539.713.131.026	1,05%

Belanja Barang

Rp6.505.770.048.339,00

B.4 Belanja Barang

Realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp6.505.770.048.339,00** dan **Rp7.046.237.325.619,00**. Realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan **7,67%** dibandingkan realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Penurunan disebabkan oleh Belanja Barang BLU yaitu penurunan realisasi Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit berupa penurunan Harga Indeks Pasar Biodiesel menjadi setara dengan Harga Indeks Pasar Solar sehingga penyaluran subsidi biodiesel menurun sedangkan Belanja Barang non BLU mengalami penurunan pada realisasi Belanja Barang Non Operasional, Belanja Persediaan, Jasa, Pemeliharaan dan Belanja Perjalanan Luar Negeri.

Perbandingan Belanja Barang 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	Rp 170.617.279.170	Rp 161.173.637.028	5,86%
Belanja Barang Non Operasional	Rp 72.354.009.388	Rp 73.542.107.467	-1,62%
Belanja Persediaan	Rp 23.968.605.600	Rp 30.709.238.329	-21,95%
Belanja Jasa	Rp 62.302.615.001	Rp 65.516.535.620	-4,91%
Belanja Pemeliharaan	Rp 142.929.401.095	Rp 149.634.846.046	-4,48%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 187.960.040.235	Rp 177.777.981.952	5,73%
Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp 897.138.699	Rp 898.229.800	-0,12%
Jumlah Belanja	Rp 661.029.089.188	Rp 659.252.576.242	0,27%
Belanja Barang BLU	Rp 5.844.918.742.988	Rp 6.387.135.347.203	-8,49%
Jumlah Belanja	Rp 5.844.918.742.988	Rp 6.387.135.347.203	-8,49%
Pengembalian Belanja	Rp (177.783.777)	Rp (150.597.826)	18,05%
Jumlah Belanja	Rp 6.505.770.048.399	Rp 7.046.237.325.619	-7,67%

Belanja Barang BLU
Rp5.844.918.742.987,00

B.4.1 Belanja Barang BLU

Realisasi belanja barang BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp5.844.918.742.987,00** dan **Rp6.387.135.347.203,00** realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan **8,49%** dibandingkan realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Penurunan terjadi pada Realisasi Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yaitu penurunan realisasi Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit berupa penurunan Harga Indeks Pasar Biodesel menjadi setara dengan Harga Indeks Pasar Solar sehingga penyaluran subsidi biodesel menurun.

Perbandingan Belanja Barang BLU 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan	Rp 63.819.528.555	Rp 50.132.898.607	27,30%
Belanja Barang	Rp 8.609.007.069	Rp 9.659.896.641	-10,88%
Belanja Jasa	Rp 20.934.160.706	Rp 38.314.570.994	-45,36%
Belanja Pemeliharaan	Rp 1.424.419.334	Rp 1.255.346.076	13,47%
Belanja Perjalanan	Rp 15.739.999.283	Rp 10.884.443.936	44,61%
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	Rp 5.734.385.403.340	Rp 6.276.885.963.449	-8,64%
Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	Rp 6.224.700	Rp 2.227.500	0,00%
Jumlah Belanja	Rp 5.844.918.742.987	Rp 6.387.135.347.203	-8,49%
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp -	0,00%
Jumlah Belanja	Rp 5.844.918.742.987	Rp 6.387.135.347.203	-8,49%

Belanja Modal

Rp293.452.595.916,00

B.5 Belanja Modal

Realisasi belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp293.452.595.916,00** dan **Rp398.404.847.975,00**. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar **26,34%** dibandingkan realisasi belanja modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan pagu anggaran dari tahun sebelumnya. Realisasi Belanja Modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 terdapat realisasi Belanja Modal Tanah, Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan dan Belanja Modal Lainnya yang merupakan realisasi belanja untuk pengadaan lisensi perangkat lunak database server SAKTI DJPb Tahun anggaran 2019.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	Rp 1.384.845.061	Rp 5.533.215.880	0,00%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 142.503.647.965	Rp 207.849.117.375	-31,44%
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp 1.285.994.920	Rp 1.093.855.427	0,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 34.953.213.713	Rp 36.451.670.818	-4,11%
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp 26.952.054.757	Rp 39.285.631.750	-31,39%
Belanja Modal Lainnya	Rp 84.951.104.000	Rp 107.079.410.108	-20,67%
Jumlah Belanja	Rp 292.030.860.416	Rp 397.292.901.358	-26,49%
Belanja Modal Perlatan dan Mesin BLU	Rp 1.370.915.500	Rp 800.373.000	71,28%
Belanja Modal Linnya BLU	Rp 50.820.000	Rp 327.558.000	0,00%
Jumlah Belanja BLU	Rp 1.421.735.500	Rp 1.127.931.000	26,05%
Pengembalian Belanja	Rp -	Rp (15.984.383)	-100,00%
Jumlah Belanja Total	Rp 293.452.595.916	Rp 398.404.847.975	-26,34%

Belanja Modal Tanah

Rp1.384.845.061,00

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi belanja modal tanah sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan realisasi belanja modal tanah sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp1.384.845.061,00** dan **Rp5.533.215.880,00**. Realisasi sampai dengan bulan Desember 2019 hanya terdapat pada Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara sedangkan pada bulan Desember 2018 terdapat pada satker Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara sebesar Rp5.271.300.000,00 dan KPPN Kutacane sebesar Rp171.980.880,00.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	Rp 1.384.845.061	Rp 5.451.222.880	-74,60
Belanja Modal Pembebasan Tanah	Rp -	Rp 43.800.000	0,00
Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	Rp -	Rp 38.193.000	0,00
Jumlah Belanja	Rp 1.384.845.061	Rp 5.533.215.880	-74,97
Pengembalian	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah Belanja	Rp 1.384.845.061	Rp 5.533.215.880	-74,97

Belanja Modal Peralatan
dan Mesin
Rp143.789.642.885,00

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp143.789.642.885,00** dan **Rp208.930.309.902,00**. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar **31,18%** bila dibandingkan Realisasi belanja modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 142.503.647.965	Rp 207.849.117.375	-31,44%
Belanja Modal Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	Rp 1.285.994.920	Rp 1.093.855.427	
Jumlah Belanja Kotor	Rp 143.789.642.885	Rp 208.942.972.802	-31,18%
Pengembalian	Rp -	Rp (12.662.900)	
Jumlah Belanja	Rp 143.789.642.885	Rp 208.930.309.902	-31,18%

Belanja Modal Gedung
dan Bangunan
Rp16.132.977.801,00

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp61.905.268.470,00** dan **Rp75.733.981.085,00**. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar **18,26%** bila dibandingkan realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 34.953.213.713	Rp 36.451.670.818	-4,11%
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	Rp 26.952.054.757	Rp 39.285.631.750	
Jumlah Belanja Kotor	Rp 61.905.268.470	Rp 75.737.302.568	-18,26%
Pengembalian		Rp (3.321.483)	0,00%
Jumlah Belanja	Rp 61.905.268.470	Rp 75.733.981.085	-18,26%

Belanja Modal Lainnya
Rp84.951.104.000,00

B.5.4 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp84.951.104.000,00** dan **Rp107.079.410.108,00** Realisasi

Belanja Modal Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar **20,67%** persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2018. Penurunan ini terjadi karena pagu untuk Belanja Modal Lainnya berkurang. Belanja modal lainnya di belanjakan untuk pengadaan *software* dan lisensi untuk pengembangan aplikasi SAKTI.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN JENIS BELANJA	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	Rp 84.951.104.000	Rp 107.079.410.108	-20,67%
Jumlah Belanja Kotor	Rp 84.951.104.000	Rp 107.079.410.108	-20,67%
Pengembalian Belanja Modal	Rp -	Rp -	-
Jumlah Belanja	Rp 84.951.104.000	Rp 107.079.410.108	-20,67%

*Belanja Modal Peralatan
dan Mesin-BLU
Rp1.370.915.500,00*

B.5.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp1.370.915.500,00** dan **Rp800.373.000,00**. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 mengalami kenaikan sebesar **71,28%** bila dibandingkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	Rp 1.370.915.500	Rp 800.373.000	71,28%
Jumlah Belanja Kotor	Rp 1.370.915.500	Rp 800.373.000	71,28%
Pengembalian	Rp -	Rp -	0,00%
Jumlah Belanja	Rp 1.370.915.500	Rp 800.373.000	71,28%

*Belanja Modal Lainnya-
BLU Rp50.820.000,00*

B.5.6 Belanja Modal Lainnya- BLU

Realisasi Belanja Modal Lainnya-BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 adalah masing-masing

sebesar **Rp50.820.000,00** dan **Rp327.558.000,00**. Realisasi tersebut untuk pembelian software dan lisensi kebutuhan operasional BLU.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya-BLU 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

URAIAN	31 Desember 2019	31 Desember 2018	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya-BLU	Rp 50.820.000	Rp 327.558.000	-84,49%
Jumlah Belanja Kotor	Rp 50.820.000	Rp 327.558.000	-84,49%
Pengembalian	Rp -	Rp -	
Jumlah Belanja	Rp 50.820.000	Rp 327.558.000	-84,49%

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp42.101.262,00

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp42.101.262,00** dan **Rp1.054.796,00**. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian per satker disajikan dalam lampiran Laporan keuangan. Rekapitulasi Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2019
Kas di Bendahara Pengeluaran UP	Rp -
Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	Rp 42.101.262
Jumlah	Rp 42.101.262

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2018 telah disetor pada Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut:

Satker	NTPN	Tanggal Setor	Nilai Setoran
Kanwil DJPb Prov Papua barat	12AE07HN6V0F21LO	07 Januari 2019	Rp 1.054.796
Jumlah			Rp 1.054.796

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 telah disetor pada bulan Januari 2020 dengan rincian sebagai berikut:

Satker	NTPN	Tanggal Setor	Nilai Setoran
KPPN Jakarta VI	8213461QTUAB3SHQ	8 Januari 2020	Rp 6.757.420
KPPN Pontianak	86ED32G4UK0PG4BM	8 Januari 2020	Rp 35.343.842
Jumlah			Rp 42.101.262

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp14.582.375.767,00

C.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp14.582.375.767,00** dan **Rp916.861.713,00**.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan

atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian per satker disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan. Rekapitulasi rincian Kas Lainnya dan Setara Kas adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	Rp 22.744.478
Kas lainnya di BLU	Rp 14.559.631.289
Total	Rp 14.582.375.767

Kas pada BLU
Rp16.577.229.461.958,00

C.3 Kas pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum pertanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp16.577.229.461.958,00** dan **Rp21.167.898.964.152,00**. Sedangkan posisi Kas pada Badan Layanan Umum pertanggal 31 Desember 2019 *unaudited* sebesar Rp16.823.034.555.062,00. Kas pada Badan Layanan Umum merupakan kas tunai (yang sudah disahkan BUN maupun yang belum disahkan) dan kas pada rekening Bank yang berada pada Badan Layanan Umum BPDP Kelapa Sawit dan Pusat Investasi Pemerintah.

Keterangan	31 Desember 2019
Kas dan Bank BLU	Rp 52.229.461.958
Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	Rp -
Setara Kas Lainnya - BLU	Rp 16.525.000.000.000
Jumlah	Rp 16.577.229.461.958

Rincian per satker Kas pada badan layanan umum disajikan sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2019
Kas dan Bank BLU	
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Rp 13.770.984.024
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	Rp 38.458.477.934
Jumlah	Rp 52.229.461.958
Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Rp -
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	Rp -
Jumlah	Rp -
Setara kas Lainnya - BLU	
BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	Rp 16.344.000.000.000
PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	Rp 181.000.000.000
Jumlah	Rp 16.525.000.000.000
Total	Rp 16.577.229.461.958

Investasi Jangka
Pendek-BLU
Rp437.918.493.104,0
0

C.4 Investasi Jangka Pendek-BLU

Saldo Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar **Rp437.918.493.104,00** dan **Rp0,00**. Sedangkan posisi Saldo Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 *unaudited* sebesar Rp192.113.400.000,00. Saldo Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum BPDPKS mencakup seluruh Kas dan Bank BLU (yang sudah disahkan BUN) berupa Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya (Deposito di Bank Mandiri, BNI dan BRI). Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan berupa deposito dengan jangka waktu jatuh tempo antara 3 bulan s.d. 1 tahun. Pada Semester I TA 2019 tidak terdapat Investasi Jangka Pendek-BLU karena Kas BPDPKS dipindahkan menjadi Setara Kas Lainnya-BLU berupa deposito dengan jangka waktu jatuh tempo s.d. 3 bulan. Pada bulan Desember 2019 BPDPKS melakukan pembelian Surat Utang Negara (SUN) *tradeable* seri FR0063 dan FR0065 dengan nilai penempatan **Rp192.113.400.000,00** melalui Bank Rakyat Indonesia sebagai bank kustodian. Atas penempatan tersebut, dicatat sebagai *SUN available for sale*

Rincian Investasi Jangka Pendek-BLU 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

Satker	31 Desember 2019	31 Desember 2018
BPDP Kelapa Sawit	192.113.400.000	0
Pusat Investasi Pemerintah	245.805.093.104	0
Jumlah	437.918.493.104	-

Belanja Dibayar
Dimuka
Rp2.106.502.251.493,
00

C.5 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar DiMuka pertanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp2.106.502.251.493,00** dan **Rp10.770.467.823,00**. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima seluruhnya.

Adapun rincian Belanja Dibayar Dimuka sebagai berikut:

NO	KODE	NMSATKER	RP	KET
1	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	90.000.000,	Sewa gedung kantor
2	015.08.409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	2.103.131.288.180,	Sewa kendaraan, Sewa Gedung, Pembelian lisensi Ms. Office dan Penyaluran dana PPKS
3	015.08.440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	2.851.002.000,	Sewa gedung kantor
4	015.08.528146	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK	42.800.000,	Sewa gedung kantor
5	015.08.528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	91.800.000,	Sewa gedung kantor
6	015.08.528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	32.666.667,	Sewa gedung kantor
7	015.08.528497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	25.666.667,	Sewa gedung kantor
8	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	27.027.979,	Sewa gedung kantor
9	015.08.662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	210.000.000,	Sewa gedung kantor
TOTAL			2.106.502.251.493,	

Rincian Belanja Dibayar di muka disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

C.6 Uang Muka Belanja (prepayment)

Uang Muka Belanja
(prepayment)
Rp3.277.525.736,00

Saldo Uang Muka Belanja per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp3.277.525.736,00** dan **Rp2.857.163.927,00**. Uang Muka Belanja merupakan pembayaran dimuka atas belanja yang diberikan terlebih dahulu sebelum pegawai/rekanan menyerahkan hasil pekerjaan/jasa. Transaksi uang muka belanja pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan transaksi persekot gaji hasil reklasifikasi akun Belanja Pegawai dibayar dimuka (*prepaid*). Pengertian dari Persekot Gaji adalah pinjaman uang tidak berbunga yang diberikan kepada pegawai yang dipindahkan/ dimutasi untuk kepentingan dinas. Pedoman pembayaran persekot gaji sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Anggaran nomor SE-125/A/621/1095 tanggal 3 Oktober 1995 hal Persekot/Panjar Gaji bagi Pegawai Negeri. Sehubungan dengan pelaksanaan sentralisasi pembayaran gaji pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan berdasarkan PER-41/PB/2016 tanggal 19 Oktober 2016, maka transaksi Uang Muka Belanja (prepayment) hanya pada satker Kantor Pusat DJPb.

C.7 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang
masih harus diterima
Rp47.810.119.560,00

Pendapatan yang masih harus diterima per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp47.810.119.560,00**

dan **Rp39.922.005.718,00**. Sedangkan posisi Pendapatan yang masih harus diterima per tanggal 31 Desember 2019 *unaudited* sebesar Rp47.252.139.511,00. Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Rincian Pendapatan yang masih harus diterima disajikan sebagai berikut:

Satker	31 Desember 2019
BPDP Kelapa Sawit	Rp 41.505.284.607
Pusat Investasi Pemerintah	Rp 6.304.834.953
Jumlah	Rp 47.810.119.560

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada BPD PKS merupakan Pendapatan Bunga Deposito dan Pendapatan Jasa Giro yang sudah menjadi hak BPD PKS tetapi hingga 31 Desember 2019 belum diterima. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima berupa pendapatan bunga deposito dengan jangka waktu jatuh tempo s.d. 3 bulan sebesar **Rp41.133.419.405,00** dengan rincian pendapatan bunga deposito yang masih harus diterima dari BNI sebesar Rp14.755.200.000,00 Bank Mandiri sebesar Rp3.972.602.739,00 dan BRI sebesar Rp22.405.616.666,00. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima lainnya berupa pendapatan bunga dari penempatan obligasi Surat Utang Negara (SUN) *tradeable* seri FR0063 dan FR0065 dengan nilai sebesar **Rp134.700.000,00**.

Selain itu, Pendapatan Yang Masih Harus Diterima berasal dari Bunga Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) yang belum dicairkan oleh pekebun dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Dana PPKS diterima di rekening pekebun sebesar **Rp349.920.912,00**.

Pendapatan Yang Masih Harus Diterima pada Pusat Investasi Pemerintah merupakan pendapatan yang berasal dari penerimaan bunga deposito bank umum dan penerimaan bunga dari Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya.

Piutang PNPB
Rp856.181.203,00

C.8 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp856.181.203,00** dan **Rp457.802.459,00**. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang Bukan Pajak terdiri dari saldo Piutang PNPB sebesar Rp37.987.258,00 Dan Piutang Lainnya sebesar Rp818.193.945,00. Rekapitulasi per satker Piutang Bukan Pajak disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang PNPB defisit
Rp15.142.173,00

C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang PNPB

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp15.142.173,00** dan **Rp13.150.279,00**. Penyisihan piutang tak tertagih - piutang jangka pendek adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rekapitulasi Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Jangka Pendek pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	Rp 845.265.357	0,5%	Rp 4.226.327
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp 10.915.846	100%	Rp 10.915.846
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp 856.181.203		Rp 15.142.173

Bagian
Lancar TP/TGR
Rp46.999.200,00

C.10 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp46.999.200,00** dan **Rp58.999.200,00**. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang. Rincian per debitor dan Berita Acara Rekonsiliasi TP/TGR

antara DJPb dengan Sekjen Kementerian Keuangan disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

C.11 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR

Penyisihan Piutang
Tak
Tertagih –Piutang
Jangka
PendekRp234.996,00

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp234.996,00** dan **Rp294.996,00**. Penyisihan piutang tak tertagih – Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian per debitor disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

C.12 Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Piutang dari Kegiatan
Operasional BLU
Rp0,00

Saldo Piutang dari Kegiatan Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp145.825.271,00**. Saldo per 31 Desember 2018 merupakan saldo Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum yang terdiri dari piutang kekurangan bunga deposito BNI sebesar Rp142.989.043,00 kekurangan bunga deposito Bank Mandiri sebesar Rp2.739.726,00 denda kekurangan bunga deposito BNI sebesar Rp84.380,00 dan denda kekurangan bunga deposito Bank Mandiri sebesar Rp12.122,00

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU

Penyisihan Piutang
Tak
Tertagih –Piutang
Jangka Pendek Rp0,00

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp0,00** dan **Rp729.125,00**. Penyisihan piutang tak tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional BLU adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga ditetapkan paling sedikit 5‰ (lima permil) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	Rp -	0,5%	Rp -
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp -	100%	Rp -
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp -		Rp -

Piutang dari Kegiatan
Non Operasional BLU
Rp0,00

C.14 Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Saldo Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 dan per 31 Desember 2018 sebesar **Rp0,00** dan **Rp75.594.841,00**.

Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum biasanya berupa kelebihan pembayaran uang harian atas biaya perjalanan dinas luar negeri kegiatan promosi BPDP Kelapa Sawit.

Penyisihan Piutang
Tak
Tertagih -Piutang
dari Kegiatan Non
Operasional
BLURp0,00

C.15 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 dan 2018 sebesar defisit **Rp0,00** dan **Rp377.974,00**. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang. Penyisihan Piutang tersebut dari satu kerja BPDP Kelapa Sawit. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Kementerian/Lembaga ditetapkan paling sedikit 5‰ (lima permil) dari piutang yang memiliki kualitas lancar.

Kualitas Piutang dari Kegiatan Non Operasional BLU	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Lancar	Rp -	0,5%	Rp -
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp -	100%	Rp -
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp -		Rp -

Persediaan
Rp29.647.826.166,00

C.16 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing adalah sebesar **Rp29.647.826.166,00** dan **Rp31.980.514.114,00**. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

(supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Persediaan	31 Desember 2019
Barang Konsumsi	Rp 29.013.681.933
Barang untuk Pemeliharaan	Rp 634.144.233
Jumlah	Rp 29.647.826.166

Investasi Jangka
Panjang Non
Permanen
Lainnya Rp3.152.741.
173.643,00

C.17 Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya

Nilai Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp3.152.741.173.643,00** dan **Rp1.352.498.396.761,00**. Investasi jangka panjang non permanen lainnya adalah penanaman dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun, yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak secara berkelanjutan, dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap. Saldo Investasi Jangka Panjang merupakan milik satuan kerja Pusat Investasi Pemerintah.

Piutang Tagihan
TP/TGR
Rp2.135.123.783,00

C.18 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp2.135.123.783,00** dan **Rp2.151.214.715,00**. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian per debitor disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan sedangkan Rincian Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per satker adalah sebagai berikut:

No	Satker	31 Desember 2019
1	Kantor pusat DJPb	Rp 1.718.414.309
2	Kanwil DJPB Prov DKI Jakarta	Rp 351.709.474
3	KPPN Cirebon	Rp 65.000.000
Jumlah		Rp 2.135.123.783

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang
defisit Rp2.070.448.783,00

C.19 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp2.070.448.783,00** dan **Rp2.074.599.715,00**. Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Rincian per debitor disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan sedangkan Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Panjang	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Tagihan TP/TGR			
Lancar	Rp 65.000.000	0,5%	Rp 325.000
Kurang Lancar	Rp -	10%	Rp -
Diragukan	Rp -	50%	Rp -
Macet	Rp 2.070.123.783	100%	Rp 2.070.123.783
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp 2.135.123.783		Rp 2.070.448.783

Tanah
Rp9.348.390.606.016,00

C.20 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Perbendaharaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp9.348.390.606.016,00** kuantitas 1.725.124 M2 dan **Rp9.245.211.622.150,00** kuantitas 1.712.506 M2. Sedangkan posisi nilai tanah pertanggal 31 Desember 2019 *unaudited* sebesar Rp9.357.963.472.016,00.

C.21 Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin
Rp1.426.008.211.914,00

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar

Rp1.426.008.211.914,00 dan **Rp1.355.084.962.397,00**. Rekapitulasi Mutasi dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JAN 2019		BERTAMBAH		BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Peralatan dan Mesin	184.761,	1.355.084.962.397,	14.570,	233.837.916.421,	23.258,	162.914.666.904,	176.073,	1.426.008.211.914,
ALAT BESAR DARAT	1,	1.452.500,	1,	1.815.000,	2,	3.267.500,	0,	0,
ALAT BANTU	589,	56.396.900.409,	20,	2.910.425.537,	18,	273.301.250,	591,	59.034.024.696,
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1.178,	129.326.388.435,	106,	23.491.076.805,	83,	7.112.093.641,	1.201,	145.705.371.599,
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	157,	165.690.365,	54,	126.698.491,	12,	12.429.652,	199,	279.959.204,
ALAT BENGKEL BERMESIN	23,	2.053.718.256,	1,	5.170.000,	0,	0,	24,	2.058.888.256,
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	55,	121.244.921,	6,	12.359.000,	5,	3.777.035,	56,	129.826.886,
ALAT UKUR	30,	108.575.691,	4,	19.085.250,	17,	86.369.283,	17,	41.291.658,
ALAT PENGOLAHAN	15,	31.349.700,	2,	2.075.400,	17,	33.425.100,	0,	0,
ALAT KANTOR	33.890,	129.401.034.407,	1.574,	6.147.837.099,	2.635,	10.992.463.584,	32.829,	124.556.407.922,
ALAT RUMAH TANGGA	106.743,	257.201.178.891,	5.568,	23.872.613.088,	9.876,	21.277.799.341,	102.435,	259.795.992.638,
ALAT STUDIO	4.959,	108.500.834.205,	223,	4.240.736.103,	601,	7.583.790.794,	4.581,	105.157.779.514,
ALAT KOMUNIKASI	1.823,	6.689.265.036,	77,	116.526.313,	286,	518.450.018,	1.614,	6.287.341.331,
PERALATAN PEMANCAR	100,	24.451.894.893,	27,	7.923.731.088,	24,	4.253.115.294,	103,	28.122.510.687,
PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
ALAT KEDOKTERAN	225,	514.326.343,	45,	142.543.605,	79,	233.895.101,	191,	422.974.847,
ALAT KESEHATAN UMUM	2,	1.695.000,	1,	4.108.500,	1,	4.108.500,	2,	1.695.000,
UNIT ALAT LABORATORIUM	5,	36.749.500,	3,	8.998.900,	8,	45.748.400,	0,	0,
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0,	0,	1,	1.500.000,	1,	1.500.000,	0,	0,
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0,	0,	1,	1.760.000,	1,	1.760.000,	0,	0,
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0,	0,	1,	2.399.000,	1,	2.399.000,	0,	0,
KOMPUTER UNIT	12,	166.688.800,	11,	58.530.862,	21,	203.879.662,	2,	21.340.000,
PERALATAN KOMPUTER	18.961,	227.065.129.869,	4.614,	60.372.328.855,	5.661,	68.311.182.934,	17.914,	219.126.275.790,
ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	15.872,	412.343.664.233,	2.211,	104.207.907.025,	3.847,	41.775.177.715,	14.236,	474.776.393.543,
ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
SUMUR	1,	700.000,	0,	0,	1,	700.000,	0,	0,
ALAT DETEKSI	4,	172.326.000,	0,	0,	0,	0,	4,	172.326.000,
ALAT PELINDUNG	40,	18.000.000,	0,	0,	40,	18.000.000,	0,	0,
ALAT SAR	10,	10.450.000,	0,	0,	0,	0,	10,	10.450.000,
ALAT KERJA PENERBANGAN	19,	98.310.000,	8,	73.040.000,	8,	73.040.000,	19,	98.310.000,
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,	0,	8,	77.900.000,	8,	77.900.000,	0,	0,
RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	4,	8.570.350,	0,	0,	4,	8.570.350,	0,	0,
PERALATAN OLAH RAGA	1,	6.522.750,	0,	0,	1,	6.522.750,	0,	0,
TANDA PENGHARGAAN BIDANG OLAH RAGA	42,	192.301.843,	3,	16.750.500,	0,	0,	45,	209.052.343,

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

Gedung dan
Bangunan

Rp1.847.424.921.893,
00

C.22 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan aset tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah **Rp1.847.424.921.893,00** dan **Rp1.678.476.219.861,00**

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp14.163.283.947,00

C.23 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp14.163.283.947,00** dan **Rp16.236.440.328,00**. Sedangkan posisi Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2019 *unaudited* sebesar Rp14.233.036.133,00. Saldo tersebut terdiri dari instalasi jaringan teknologi informasi. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

URAIAN	KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS AS	NILAI
			KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI		
Jalan dan Jembatan	1.476.052	7.971.128.000	11	1.428.568.891	11	3.140.343.577	1.476.052	6.259.353.314
JALAN	1.475.975	7.609.742.000	11	1.278.974.891	11	3.023.355.577	1.475.975	5.865.361.314
JEMBATAN	77	361.386.000	0	149.594.000	0	116.988.000	77	393.992.000
Irigasi	81	3.806.090.000	2	1.190.348.000	2	1.387.830.058	81	3.608.607.942
BANGUNAN AIR IRIGASI	8	130.289.000	0	16.798.000	0	7.495.000	8	139.592.000
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN	1	27.417.000	0	0	0	365.000	1	27.052.000
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI &	1	48.449.000	0	0	1	48.449.000	0	0
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR	26	1.046.819.000	0	902.716.000	0	359.271.000	26	1.590.264.000
BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	34	1.814.940.000	1	131.059.000	0	642.441.500	35	1.303.557.500
BANGUNAN AIR KOTOR	11	738.176.000	1	139.775.000	1	329.808.558	11	548.142.442
Jaringan	139	4.459.222.328	1	23.910.000	3	187.809.637	137	4.295.322.691
INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	27	223.122.950	0	0	0	0	27	223.122.950
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	1	5.049.000	0	0	0	0	1	5.049.000
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	3	269.408.137	0	0	1	138.446.337	2	130.961.800
INSTALASI GARDU LISTRIK	8	955.754.500	1	23.910.000	0	0	9	979.664.500
INSTALASI PENGAMAN	1	27.850.000	0	0	0	0	1	27.850.000
INSTALASI LAIN	11	1.142.199.937	0	0	0	0	11	1.142.199.937
JARINGAN AIR MINUM	10	90.088.700	0	0	0	0	10	90.088.700
JARINGAN LISTRIK	64	1.686.426.504	0	0	2	49.363.300	62	1.637.063.204
JARINGAN TELEPON	12	42.352.000	0	0	0	0	12	42.352.000
JARINGAN GAS	2	16.970.600	0	0	0	0	2	16.970.600
Jumlah		16.236.440.328	14	2.642.826.891	16	4.715.983.272	1.476.270	14.163.283.947

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan jaringan disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

Aset Tetap Lainnya
Rp12.405.195.001,00

C.24 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah **Rp12.405.195.001,00** dan **Rp11.826.309.371,00**. Rincian Aset Tetap Lainnya terdiri dari transaksi atas Aset Tetap Renovasi sebesar **Rp11.185.721.282,00** dan Nilai Aset Tetap Lainnya adalah sebesar **Rp1.219.473.719,00**. Mutasi transaksi aset tetap lainnya adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Jumlah	6.753	11.826.309.371	513	2.480.148.804	742	1.901.263.174	6.524	12.405.195.001
Aset Tetap Renovasi	25	10.598.808.832	77	2.446.308.024	73	1.859.395.574	29	11.185.721.282
PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	0	0	61	195.800.000	61	195.800.000	0	0
GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	20	4.377.115.376	16	2.250.508.024	12	1.663.595.574	24	4.964.027.826
JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	2	144.058.750	0	0	0	0	2	144.058.750
ASET TETAP LAINNYA DALAM RENOVASI	3	6.077.634.706	0	0	0	0	3	6.077.634.706
Aset Tetap Lainnya	6.728	1.227.500.539	436	33.840.780	669	41.867.600	6.495	1.219.473.719
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	6.529	745.369.474	430	28.230.780	638	16.289.700	6.321	757.310.554
BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	0	0	0	0	0	0	0	0
KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	86	91.133.550	2	405.000	19	7.002.900	69	84.535.650
BARANG BERCORAK KESENIAN	107	325.069.115	4	5.205.000	12	18.575.000	99	311.699.115
ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	6	65.928.400	0	0	0	0	6	65.928.400

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp6.867.365.359,00

C.25 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp6.867.365.359,00** dan **Rp31.264.180.042,00** saldo konstruksi dalam pengerjaan yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian per satker Kontruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap defisit
Rp1.349.553.521.664,
00

C.26 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing defisit **Rp1.349.553.521.664,00** dan **Rp1.224.575.852.743,00**. Sedangkan posisi Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 *unaudited* sebesar defisit Rp1.317.961.020.369,00. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019. Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Barang Milik Negara.

Aset Tak Berwujud
Rp603.946.413.123,0
0

C.27 Aset Tak Berwujud

Nilai perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah **Rp603.946.413.123,00** dan **Rp517.367.869.108,00**. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Penyusutan Aset Tak Berwujud berdasarkan PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 berlaku mulai TA 2016. Rincian disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara, rekapitulasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Nilai
1	Software	Rp 352.803.938.183
2	Lisensi	Rp 251.093.185.940
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	Rp 49.289.000
Jumlah		Rp 603.946.413.123

Mutasi Aset Tak Berwujud sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO S.D 31 DESEMBER 2019	
			BERTAMBAH		BERKURANG			
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Jumlah	44,375	517,367,869,108	517	87,789,579,900	1,288	1,211,035,885	43,604	603,946,413,123
Software	5,803	328,942,010,169	138	24,418,535,900	64	556,607,886	5,877	352,803,938,183
ASET TAK BERWUJUD	5,803	328,942,010,169	138	24,418,535,900	64	556,607,886	5,877	352,803,938,183
Lisensi	38,568	188,376,569,939	379	63,371,044,000	1,224	654,427,999	37,723	251,093,185,940
ASET TAK BERWUJUD	38,568	188,376,569,939	379	63,371,044,000	1,224	654,427,999	37,723	251,093,185,940
Aset Tak Berwujud Lainnya	4	49,289,000	0	0	0	0	4	49,289,000
ASET TAK BERWUJUD	4	49,289,000	0	0	0	0	4	49,289,000

Dana Kelolaan
Badan Layanan
Umum
Rp3.847.258.826.357,00

C.28 Dana Kelolaan Badan Layanan Umum

Nilai dana kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah **Rp3.847.258.826.357,00** dan **Rp2.647.501.603.239,00**. Saldo tersebut merupakan milik satuan kerja Pusat Invetasi Pemerintah. Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan atau Diinvestasikan merupakan dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU.

C.29 Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp154.957.296.613,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah **Rp154.957.296.613,00** dan **Rp102.681.897.360,00**. Sedangkan posisi

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2019 *unaudited* sebesar Rp154.968.637.613,00. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta dalam proses penghapusan dari aplikasi SIMAK-BMN. Rincian disajikan dalam Laporan Keuangan ini, rekapitulasi mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

URAIAN	SALDO PER 1 JANUARI 2019		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2019	
			BERTAMBAH		BERKURANG			
	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi	26.043,	102.774.137.060,	20.337,	103.581.672.071,	10.405,	51.398.512.518,	35.975,	154.957.296.613,
TANAH PERSIL	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
ALAT BANTU	53,	1.724.227.684,	14,	216.842.000,	17,	604.598.985,	50,	1.336.470.699,
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	85,	1.741.282.806,	68,	3.451.822.000,	56,	2.482.197.555,	97,	2.710.907.251,
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	41,	21.179.090,	12,	12.429.652,	7,	4.849.102,	46,	28.759.640,
ALAT BENGKEL BERMESIN	1,	300.000,	0,	0,	1,	300.000,	0,	0,
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5,	5.240.000,	4,	1.577.035,	3,	2.837.035,	6,	3.980.000,
ALAT UKUR	20,	74.460.350,	3,	4.129.883,	1,	9.790.000,	22,	68.800.233,
ALAT PENGOLAHAN	0,	0,	5,	11.492.250,	0,	0,	5,	11.492.250,
ALAT KANTOR	5.727,	13.119.575.551,	2.607,	10.206.175.105,	1.750,	4.974.556.783,	6.584,	18.351.193.873,
ALAT RUMAH TANGGA	12.182,	16.888.530.901,	9.629,	18.704.353.052,	4.861,	8.827.342.650,	16.950,	26.765.541.303,
ALAT STUDIO	1.471,	10.307.535.938,	556,	5.161.165.300,	175,	1.662.915.183,	1.852,	13.805.786.055,
ALAT KOMUNIKASI	682,	1.256.885.886,	286,	518.450.018,	138,	98.793.981,	830,	1.676.541.923,
PERALATAN PEMANCAR	10,	31.616.000,	7,	32.246.500,	4,	6.480.000,	13,	57.382.500,
ALAT KEDOKTERAN	54,	61.732.140,	6,	47.451.671,	6,	2.825.205,	54,	106.358.606,
ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	5,	3.505.000,	0,	0,	0,	0,	5,	3.505.000,
KOMPUTER UNIT	1.756,	24.194.653.620,	2.669,	30.624.101.654,	596,	6.488.010.822,	3.829,	48.330.744.452,
PERALATAN KOMPUTER	3.070,	26.353.880.696,	2.481,	24.844.987.832,	851,	12.214.805.566,	4.700,	38.984.062.962,
ALAT DETEKSI	1,	12.414.600,	0,	0,	0,	0,	1,	12.414.600,
ALAT PELINDUNG	1,	3.074.500,	0,	0,	0,	0,	1,	3.074.500,
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	1,	6.050.000,	0,	0,	0,	0,	1,	6.050.000,
PERALATAN OLAH RAGA	1,	982.000,	0,	0,	0,	0,	1,	982.000,
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	7,	3.293.784.399,	7,	7.223.901.284,	8,	9.387.406.284,	6,	1.130.279.399,
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	24,	855.465.505,	10,	1.064.128.000,	8,	835.375.000,	26,	1.084.218.505,
TUGU/TANDA BATAS	2,	36.250.271,	1,	75.700.000,	2,	109.456.299,	1,	2.493.972,
JALAN	183,	4.929.830,	11,	11.341.000,	194,	16.270.830,	0,	0,
BANGUNAN AIR KOTOR	0,	0,	1,	49.725.000,	1,	49.725.000,	0,	0,
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
INSTALASI GARDU LISTRIK	1,	23.910.000,	0,	0,	1,	23.910.000,	0,	0,
INSTALASI PENGAMAN	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
INSTALASI LAIN	1,	30.261.000,	0,	0,	0,	0,	1,	30.261.000,
JARINGAN LISTRIK	2,	18.432.000,	2,	49.363.300,	0,	0,	4,	67.795.300,
JARINGAN TELEPON	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	600,	37.408.420,	638,	16.289.700,	430,	28.230.780,	808,	25.467.340,
BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	42,	50.316.000,	0,	0,	0,	0,	42,	50.316.000,
KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	1,	36.173,	19,	7.002.900,	3,	6.138.673,	17,	900.400,
BARANG BERCORAK KESENIAN	7,	45.364.000,	12,	18.575.000,	2,	1.205.000,	17,	62.734.000,
GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	0,	0,	1,	17.386.050,	0,	0,	1,	17.386.050,
ASET TAK BERWUJUD	7,	2.570.852.700,	1.288,	1.211.035.885,	1.290,	3.560.491.785,	5,	221.396.800,

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya deficit
Rp554.278.087.494,00*

C.30 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing deficit sebesar **Rp554.278.087.494,00** dan **Rp427.778.134.183,00**.

Utang kepada Pihak
Ketiga
Rp277.739.178.079,00

C.31 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp277.739.178.079,00** dan **Rp22.216.800.846,00**. Sedangkan Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2019 *unaudited* sebesar Rp583.406.348.651,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Rincian per satker disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan. Rekapitulasi Utang kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

No	Uraian	31 Desember 2019
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	Rp 85.895.000
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	Rp 263.084.344.673
3	Belanja Modal yang masih harus dibayar	Rp -
4	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp 9.307.117
5	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	Rp 14.559.631.289
6	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	Rp -
Total		Rp 277.739.178.079

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan
Rp35.913.888,00

C.32 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

Nilai Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp35.913.888,00** dan **Rp30.207.658,00**. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan merupakan utang satker yang disebabkan kelebihan menerima pelunasan persekot gajisatuan kerja Kantor Pusat DJPb.

Pendapatan Diterima
di Muka
Rp936.579.973,00

C.33 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp936.579.973,00** dan **Rp758.267.969,00**. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara. namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNB. Rincian Pendapatan diterima dimuka pada Direktorat

Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan disajikan dalam Lampiran Laporan Keuangan

C.34 Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari
KPPN
Rp42.101.262,00

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 masing-masing sebesar **Rp42.101.262,00** dan **Rp61.459.000,00**. Uang Muka dari KPPN Per 31 Desember 2019 merupakan Tambahan Uang Persediaan (TUP) sebesar Rp42.101.262,00 diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

C.35 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek
Lainnya
Rp13.437.361,00

Nilai Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp13.437.361,00** dan **Rp0,00**. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan Pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pajak tersebut yang masih dipegang oleh Bendahara per 31 Desember 2019.

C.36 Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN

Utang Jangka
Panjang BLU kepada
BUN
Rp7.000.000.000.000,
00

Nilai Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 sebesar **Rp7.000.000.000.000,00** dan **Rp4.000.000.000.000,00**. Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN merupakan kewajiban atas penerimaan Dana Kelolaan dari BA BUN 999.03. Nilai Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN merupakan milik satker Pusat Investasi Pemerintah.

C.37 Ekuitas

Ekuitas
Rp30.449.639.863.135,00

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp30.449.639.863.135,00** dan **Rp32.537.936.499.062,00**. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB

Rp1.744.695.208.161,00

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp1.744.695.208.161,00** dan **Rp15.571.011.804.817,00**. Sedangkan posisi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 *unaudited* sebesar Rp1.744.024.472.402,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Jenis Pendapatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik(Turun)%
Pendapatan dari Pengelolaan BMN	Rp 2.949.659.936	Rp 2.617.234.993	12,70
Pendapatan Jasa Layanan BLU	Rp 59.520.820.716	Rp 14.446.979.343.932	-99,59
Pendapatan Iuran dan Denda	Rp 650.393.041	Rp 669.469.193	-2,85
Pendapatan Bunga	Rp -	Rp 853.210	-100,00
Pendapatan BLU Lainnya	Rp 1.681.574.328.467	Rp 1.120.744.903.489	50,04
Pendapatan Lain-lain	Rp 6.001	Rp -	#DIV/0!
Jumlah	Rp 1.744.695.208.161	Rp 15.571.011.804.817	-88,80

Pendapatan Pengelolaan BMN adalah merupakan pendapatan-LO yang diperoleh dari pemanfaatan BMN melalui sewa gedung dan bangunan, penjualan peralatan mesin yang telah dihapuskan karena usang dan Pendapatan Badan Layanan Umum.

Beban Pegawai

Rp606.351.529.456,00

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp606.351.529.456,00** dan **Rp586.920.363.333,00**. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Persediaan
Rp26.262.357.870,00

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp26.262.357.870,00** dan **Rp27.832.742.232,00**. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik(Turun)%
Beban Persediaan bahan baku	Rp -	Rp 2.925.000	-100,00
Beban Persediaan konsumsi	Rp 26.262.357.870	Rp 27.828.917.232	-5,63
Beban Persediaan Lainnya	Rp -	Rp 900.000	0,00
Beban Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	Rp -	Rp -	0,00
Jumlah Beban Persediaan	Rp 26.262.357.870	Rp 27.832.742.232	(5,64)

Beban Barang dan Jasa
Rp4.498.728.435.300,00

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp4.498.728.435.300,00** dan **Rp5.783.267.067.556,00**. Sedangkan posisi Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2019 *unaudited* sebesar Rp6.619.577.069.714,00. Beban barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban barang dan Jasa untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik(Turun)%
Beban Barang Operasional	Rp 170.527.538.855	Rp 161.108.418.745	5,85
Beban Barang Non Operasional	Rp 72.329.271.888	Rp 73.193.663.517	-1,18
Beban Jasa	Rp 64.006.956.480	Rp 65.723.075.525	-2,61
Beban Aset Ekstrakomptabel	Rp 17.820.000	Rp 674.985.871	-97,36
Beban Barang BLU	Rp 4.191.846.848.077	Rp 5.482.566.923.898	-23,54
Jumlah	Rp 4.498.728.435.300	Rp 5.783.267.067.556	-22,21

Beban Pemeliharaan
Rp145.356.327.193,00

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp145.356.327.193,00** dan **Rp149.437.265.754,00**. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	Rp 50.954.119.784	Rp 49.537.937.739	2,86
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	Rp 2.485.907.749	Rp 80.111.710	0,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Rp 88.106.582.212	Rp 96.109.203.792	-8,33
Beban Aset Ekstrakomptabel	Rp 14.975.000		0,00
Beban Persediaan Suku Cadang	Rp -	Rp 8.140.000	0,00
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	Rp 1.108.485.614	Rp 1.282.411.610	-13,56
Beban Pemeliharaan	Rp 1.424.419.334	Rp -	
Beban Pemeliharaan Lainnya	Rp 1.261.837.500	Rp 1.155.000.000	9,25
Beban Asuransi Alat Angkut		Rp 9.114.827	-100,00
Beban Pemeliharaan BLU	Rp -	Rp 1.255.346.076	-100,00
Jumlah	Rp 145.356.327.193	Rp 149.437.265.754	-2,73

Beban Perjalanan Dinas
Rp204.489.784.368,00

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp204.489.784.368,00** dan **Rp189.451.883.938,00**. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	Rp 104.124.135.407	Rp 105.515.988.258	-1,32
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 7.386.070.433	Rp 7.652.378.740	-3,48
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 56.578.416.870	Rp 50.969.525.829	11,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 19.764.023.676	Rp 13.564.638.575	45,70
Beban Perjalanan Biasa Luar Negeri	Rp 897.138.699	Rp 814.432.000	10,16
Belanja Perjalanan Lainnya-Luar Negeri		Rp 83.797.800	
Beban Perjalanan-BLU	Rp 15.739.999.283	Rp 10.851.122.736	45,05
Jumlah	Rp 204.489.784.368	Rp 189.451.883.938	7,94

Beban Penyusutan dan
Amortisasi
Rp273.925.210.758,00

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp273.925.210.758,00** dan **Rp273.893.466.342,00**. Sedangkan posisi Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2019 *unaudited* sebesar Rp263.615.675.046,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian Beban dan Penyusutan	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp 109.922.140.749	Rp 90.262.986.225	21,78
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp 90.602.492.705	Rp 87.315.795.866	3,76
Beban Penyusutan Jalan Jembatan Irigasi Jaringan	Rp 1.243.093.214	Rp 2.571.201.205	-51,65
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	Rp 12.605.125	Rp 9.775.125	28,95
Beban Amortisasi Software dan Lisensi	Rp 71.483.134.562	Rp 93.414.094.945	-23,48
Beban Penyusutan Aset Tetap dan ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp 661.744.403	Rp 319.612.976	107,05
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi	Rp 273.925.210.758	Rp 273.893.466.342	0,01

Perbedaan nilai akhir Beban Penyusutan dan Amortisasi disebabkan karena masih dilakukan perbaikan transaksi reval pada aplikasi SAKTI

Beban Penyisihan
Piutang Tak tertagih
Defisit Rp3.325.387,00

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp3.325.387,00** dan surplus **Rp3.957.523,00** Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian Jenis Beban	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik(Turun)%
Beban penyisihan piutang PNPB	Rp 184.986	Rp 350.802	-47,27
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar TagihanTuntutan Perbendaharaan/Tuntutan	Rp 60.000	Rp 203.500	-70,52
Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp 377.974	Rp (377.974)	0,00
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	Rp 4.150.932	Rp 6.423.660	-35,38
Beban Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan realisasinya			0,00
Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	Rp 729.125	Rp (729.125)	0,00
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	Rp (2.177.630)	Rp (1.913.340)	
Realisasinya	Rp 3.325.387	Rp 3.957.523	-15,97

Surplus dari Kegiatan
Non Operasional Defisit
Rp118.191.844,00

D.9 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018	Naik(Turun)%
Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	Rp 1.821.609.041	Rp 1.758.081.694	3,61
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	Rp (5.669.700.994)	Rp (4.149.016.743)	36,65
Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan dari kegiatan Non Operasional lainnya	Rp 4.712.114.108	Rp 10.010.184.369	-52,93
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	Rp (982.213.999)	Rp (6.825.311.976)	-85,61
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	Rp (118.191.844)	Rp 793.937.344	-114,89

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal

Rp32.537.936.499.062,00

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2019 dan 1 Januari 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp32.537.936.499.062,00** dan **Rp22.195.161.238.061,00**

Surplus(defisit) LO Defisit

Rp4.010.533.303.241,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah defisit sebesar **Rp4.010.533.303.241,00** dan surplus **Rp8.561.006.910.529,00**. Sedangkan posisi Surplus (defisit) LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 *unaudited* defisit sebesar Rp6.121.743.137.702,00. Surplus (Defisit) LO merupakan selisih kurang/lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Penyesuaian Nilai Tahun

Berjalan Rp0,00

E.3 Penyesuaian Nilai Aset

Jumlah Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebesar **Rp0,00** dan **Rp0,00**

Koreksi Nilai Persediaan

Rp12.260.000,00

E.4 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tersebut berasal dari transaksi saldo awal persediaan yang berasal dari sisa belanja bahan untuk kegiatan penyerahan DIPA pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. DKI Jakarta. Koreksi nilai persediaan untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp12.260.000,00** dan **Rp13.512.500,00**

Koreksi Atas Reklasifikasi
Rp99.887.190,00

E.5 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai reklasifikasi yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian reklasifikasi yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi atas reklasifikasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp99.887.190,00** dan **Rp0,00**. Sedangkan posisi Koreksi atas reklasifikasi untuk 31 Desember 2019 *unaudited* defisit sebesar Rp19.699.092.782,00. Adapun rincian koreksi atas reklasifikasi per Satker terdapat pada lampiran laporan keuangan.

Selisih Revaluasi Aset
Tetap
Rp125.412.211.799,00

E.6 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan koreksi kesalahan pencatatan nilai perolehan atas aset tetap yang perolehannya berasal dari tahun sebelumnya, koreksi nilai revaluasi aset tetap pada tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Koreksi Penilaian aset tetap untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp125.412.211.799,00** dan **Rp0,00**. Adapun posisi Koreksi Penilaian aset tetap untuk 31 Desember 2019 *unaudited* defisit sebesar Rp27.652.000.623,00. Rincian daftar Selisih Revaluasi Aset Tetap per Satker terdapat pada lampiran laporan keuangan.

Koreksi Nilai Aset Tetap
Non Revaluasi surplus
Rp15.823.943.665,00

E.7 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan, Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar surplus **Rp15.823.943.665,00** dan defisit **Rp352.414.822,00**. Adapun posisi Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi untuk 31 Desember 2019 *unaudited* defisit sebesar Rp19.160.579.493,00. Daftar Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi per Satker terdapat pada lampiran laporan keuangan.

E.8 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain defisit
Rp241.250.569.317,00

Koreksi Nilai Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. **koreksi** atas kesalahan pengakuan beban yang terjadi pada periode sebelumnya dan baru diketahui pada periode berjalan, Koreksi Nilai Lain-lain untuk tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing defisit sebesar **Rp241.250.569.317,00** dan surplus **Rp35.015.815.582,00**. Daftar Koreksi Nilai Koreksi Lain-lain per Satker terdapat pada lampiran laporan keuangan.

E.9 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp1.539.837.569.723,00

Nilai Transaksi Antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp1.539.837.569.723,00** dan **Rp1.747.091.437.212,00** Akun-akun pembentuk komponen Transaksi Antar Entitas sebagai berikut:

No	Uraian Akun	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	Rp 1.498.282.873.928	Rp 1.596.092.026.417
2	Diterima dari Entitas Lain	Rp (9.470.529.407)	Rp (8.166.721.910)
3	Transfer Keluar	Rp (53.174.502.642)	Rp (53.894.884.219)
4	Transfer Masuk	Rp 101.647.829.406	Rp 213.010.931.924
5	Pengesahan Hibah Langsung	Rp 2.551.898.438	Rp 50.085.000
Jumlah		Rp 1.539.837.569.723	Rp 1.747.091.437.212

Penjelasan akun-akun Transaksi Antar Entitas:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan nilai realisasi netto belanja namun tidak termasuk realisasi belanja BPDP Kelapa Sawit;
2. Diterima dari Entitas Lain merupakan nilai realisasi netto PNBPN namun tidak termasuk realisasi PNBPN BPDP Kelapa sawit;
3. Transfer Keluar merupakan nilai transaksi transfer keluar BMN yang dan persekot gaji (rincian per satker disajikan dalam lampiran);
4. Transfer Masuk merupakan nilai transaksi transfer masuk BMN dan persekot gaji (rincian per satker disajikan dalam lampiran);
5. Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp2.551.898.438,00 Merupakan

nilai realisasi pada satuan kerja sebagai berikut:

KODE	SATKER	RPHREAL
015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	1.053.448.713,
015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	42.500.000,
015.08.527610	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE	286.050.000,
015.08.613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	12.717.000,
015.08.634984	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG REDEP	810.507.000,
015.08.648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	346.675.725,
TOTAL		2.551.898.438,

Ekuitas Akhir

Rp28.020.682.380.835,00

E.10 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah masing-masing sebesar **Rp28.020.682.380.835,00** dan **Rp32.537.936.499.062,00.**

PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

-

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

A. Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi

1. Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 Tentang Pelaksanaan *Piloting* Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi. Pelaksanaan *Piloting* SAKTI meliputi seluruh modul yang terdapat dalam aplikasi SAKTI yaitu:
 - a. Modul Penganggaran;
 - b. Modul Komitmen;
 - c. Modul Bendahara;
 - d. Modul Pembayaran;
 - e. Modul Persediaan;
 - f. Modul Aset Tetap; dan
 - g. Modul Akuntansi dan Pelaporan.
2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada akhir Desember 2016 untuk keperluan pembayaran gaji Januari 2017 telah melaksanakan *Piloting* sentralisasi pembayaran gaji untuk pegawai lingkup Ditjen Perbendaharaan sesuai PER-41/PB/2016 tanggal 19 Oktober 2016.

B. Penyajian Laporan Keuangan

1. Direktur Akuntansi dan Pelaporan-Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan melalui surat nomor S-5992/PB.6/2017 tanggal 7 Juli 2017 tentang Rilis *Update* Aplikasi SAIBA Versi 4.1 dan Petunjuk Teknis Penggunaan Aplikasi serta Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satker telah menerbitkan langkah-langkah penyusunan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada sistem akuntansi instansi basis akrual tahun 2017, berdasarkan langkah-langkah tersebut satker BLU melakukan penyesuaian pada neraca.
2. Pada Tahun 2017 Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan penilaian kembali (revaluasi) nilai aset sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Penilaian Kembali Barang Milik Negara berupa Aset Tetap dilakukan terhadap:

- a. Tanah;
- b. Gedung dan Bangunan; dan
- c. Jalan, irigasi, dan Jaringan, berupa Jalan, Jembatan dan Bangunan Air.

Berdasarkan kodifikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015, termasuk dalam ruang lingkup aset tetap yang direvaluasi adalah aset tetap yang sedang dilaksanakan pemanfaatan.

3. Pada Tahun 2018 Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.01/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. PIP merupakan satuan kerja unit organisasi non eselon dibidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Perbendaharaan

C. Pengungkapan Satuan Kerja BLU

1. Dana cadangan pada satker BLU BPD PKS adalah dana yang direncanakan untuk menjadi “dana abadi” untuk BPD PKS. Dana cadangan rencana akan diinvestasikan dalam investasi jangka panjang sehingga BPD PKS perlu menyampaikan izin ke Menteri Keuangan. Izin Menteri Keuangan tersebut terbit melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-469/MK.05/2017 tanggal 5 Juni 2017 hal Persetujuan bagi BLU Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk Melakukan Pengelolaan Dana Dalam Bentuk Investasi Jangka Panjang. Namun demikian, sampai saat ini regulasi dan perangkat pendukung untuk melaksanakan investasi jangka panjang tersebut masih dalam proses penyusunan di BPD PKS.

Tahun	Penambahan Nilai Dana Cadangan	Saldo	Keterangan
2015	385.000.000.000	385.000.000.000	Nilai berdasarkan kutipan dari Renstra BPD PKS. Pada saat itu Komite Pengarah belum menetapkan alokasi dana untuk penyaluran maupun cadangan.
2016	19.842.098.910	404.842.098.910	Besaran alokasi dana cadangan baru ditetapkan pada tahun 2016 sebesar 3% dari dana tersedia untuk disalurkan/program, oleh karena itu nilai dana cadangan tahun 2016 ditetapkan sebesar selisih antara nilai total dana cadangan tahun 2016 dan 2015.
2017	399.000.000.000	803.842.098.910	Besaran alokasi dana cadangan pada tahun 2017 RBA setara 3% dari dana tersedia untuk disalurkan/program.

D. Pengungkapan Aset Sengketa Dalam Proses Pengadilan

1. Sengketa Tanah dan Bangunan Milik Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur seluas 8.800m² di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya senilai Rp48.169.475.000,00

Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I seluas 8.880 m² yang terletak di Kelurahan Dukuh Menanggal Surabaya, merupakan Aset Tetap yang dimiliki dan dikelola oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur. Kepemilikan tersebut dibuktikan dengan Sertifikat Hak Pakai (SHP) Nomor 14 yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Nomor 108/HP/35/1998 tentang Pemberian Hak pakai atas Tanah Negara atas nama Depkeu c.q. DJA.

Perolehan tanah bangunan rumah negara tersebut berdasarkan pembelian DJA yang berasal dari hak yasan (hak milik pribadi/girik) dan *eigendom verponding*, dan telah dibayarkan kepada dua orang yaitu Sdr. Mariyatin B. Suradi seluas 4.575 m² (surat pernyataan tanggal 31 Maret 1986) dan Sdr. Sumaji Darmo Suwito seluas 5000 m² (surat pernyataan tanggal 31 Maret 1986/tanah telah bersertifikat).

Selanjutnya atas kepemilikan dan hak Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I seluas 8.880 m² tersebut, terjadi tumpang tindih dengan pihak masyarakat yaitu Hj. Aminah dan menimbulkan sengketa pengadilan. Dalam gugatannya Hj. Aminah menyatakan bahwa belum mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain. Kepemilikan Hj. Aminah dibuktikan dengan Petok D Nomor 446 Persil 28 S.II seluas 6.530 m² yang telah dikuasai dan dikelola sebelum tahun 1960.

Gugatan Hj. Aminah tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya Berdasarkan putusan Nomor 69/B/2012/PT.TUN.SBY tanggal 20 Juli 2012 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 469.K/TUN/2012 tanggal 25 Februari 2013 diputuskan bahwa sertifikat Nomor 14 milik Kementerian Keuangan dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan.

Atas keputusan tersebut, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan melalui Surat Nomor S-818/SJ/2014 tanggal 25 Maret 2014 menyatakan bahwa apabila pembuktian PTUN dokumen pembebasan berupa surat pernyataan pelepasan hak yang telah disampaikan ke BPN pada tahun 1998

tidak diketemukan, maka menjadi tanggung jawab BPN. Kementerian Keuangan tidak dapat serta merta menghapuskan kepemilikan tanah tersebut dan beralih ke Penggugat. Pada saat ini, sengketa tanah di Dukuh Menanggal Surabaya seluas 8.800 M2 milik Kanwil DJPB Jawa Timur ini sudah dalam tahap Kasasi. Kasus ini berproses di pengadilan pada ranah Tata Usaha Negara (TUN). Keputusan akhir menyebutkan agar BPN mencabut sertifikat Hak Pakai No 14 sehingga tanah tersebut tidak bersertipikat, namun kepemilikan masih ada pada kanwil DJPb Prov. Jawa Timur karena putusan TUN tidak memutuskan kepemilikan.

2. Sengketa Tanah dan Bangunan Milik Kanwil DJPb Jawa Timur seluas 321m² di Jalan Sekolah Nomor 09 Kelurahan Asemrowo Surabaya Senilai Rp3.165.576.000,00

Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I seluas 321m² di Jalan Sekolah Nomor 09 Kelurahan Asemrowo Surabaya. Aset tetap tersebut dimiliki dan dikelola oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur dengan bukti kepemilikan SHP nomor 02 atas nama DJA yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Nomor 108/HP/35/1998 tanggal 16 Maret 1998 tentang pemberian Hak Pakai atas Tanah Negara atas nama Depkeu c.q DJA.

Selanjutnya atas Kepemilikan dan hak atas tanah Bangunan Rumah Negara tersebut diakui juga kepemilikannya oleh masyarakat yaitu Sdr. Abdullah Ansori dan menimbulkan sengketa di pengadilan. Dalam gugatan perdata yang disampaikan melalui Pengadilan Negeri Surabaya, Sdr. Abdullah Ansori menyatakan sebagai pemilik sah berdasarkan bukti kepemilikan SHM Nomor 2613/Kelurahan Asemrowo, surat ukur tanggal 3 Juni 2013 Nomor 362/Asemrowo/2013 seluas 321m².

Atas gugatan Sdr. Abdullah Ansori, PN Surabaya mengabulkan berdasarkan surat putusan nomor 267/Pdt.G/2016/PN.Sby tanggal 18 Oktober 2016. Putusan tersebut menyatakan bahwa Kementerian Keuangan selaku tergugat, tanpa hak mensertifikatkan tanah Asemrowo berupa SHP Nomor 02 atas nama DJA berdasarkan SK Kepala Kanwil BPN Jawa Timur Nomor 108/HP/35/1998 tanggal 16 Maret 1998, merupakan perbuatan melawan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kasus Sengketa tanah dan Bangunan di Jln Sekolah No.9 kelurahan Asem Rowo Surabaya milik Kanwil DJPB Jawa

Timur ini merupakan ranah hukum perdata dan pada saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.

3. Sengketa Tanah dan Bangunan Milik Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Utara Seluas 620 m² di Kelurahan Tikala Ares Manado Senilai Rp3.883.684.000,00

Tanah Bangunan seluas 620m² di Kelurahan Tikla Ares Manado merupakan aset yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan berdasarkan salinan fotokopi SHP Nomor 81/Desa Tikala tanggal 31 Mei 1974 dan surat ukur Nomor 209/1974 tanggal 30 Mei 1974. Kepemilikan tanah tersebut diklaim juga oleh masyarakat yaitu Sdr. Gerard Cunraad Matheosz yang memiliki bukti kepemilikan berupa SHM asli Nomor 301/Kelurahan Tikala Ares tanggal 16 November 2015, surat ukur nomor 00016/Tikala Ares tanggal 24 Agustus 2015 seluas 637m². Sdr Gerard Cunraad Matheosz bersama orang tuanya telah menguasai dan menduduki tanah tersebut sejak tahun 1967 dan rekening listrik serta PBB atas nama orang tuanya.

Atas kepemilikan ganda tersebut tanah bangunan di Kelurahan Tikal Ares Manado tersebut, Sdr. Gerard Cunraad Matheosz melakukan gugatan kepada Kementerian Keuangan melalui PTUN Manado. Gugatan Sdr. Gerard Cunraad Matheosz tersebut dikabulkan berdasarkan surat putusan PTUN Manado Nomor 41/G/2016/PTUN.MDO tanggal 5 Oktober 2016 yang menyatakan bahwa SHP Nomor 81/Desa Tikala tanggal 31 Mei 1974, surat ukur Nomor 2019/1974 tanggal 30 Mei 1974 milik Kementerian Keuangan dinyatakan batal dan memerintahkan Kementerian Keuangan mencabut dan mencoret SHP tersebut.

Atas putusan PTUN Manado tersebut, Kementerian Keuangan berupaya mengajukan Peninjauan Kembali (PK) berdasarkan Surat Nomor 309//71.600/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017. Adapun dasar Kementerian Keuangan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali karena ditemukannya bukti yang bersifat menentukan yaitu warkah penerbitan tanah berupa:

- a) SHP Nomor 81/Desa Tikala tanggal 31 Mei 1974, surat ukur Nomor 209/1974 tanggal 30 Mei 1974;
- b) Surat Permohonan Hak Pakai oleh Poejiman BS bertindak atas nama Kantor Bendahara Negara Manado;

- c) Surat keterangan pendaftaran tanah nomor 123/Mdo/ket/1974 tanggal 18 Maret 1974;
- d) Gambar Schets;
- e) Risalah pemeriksaan tanah oleh panitia pemeriksa tanah di Manado tanggal 2 April 1974;
- f) Ikhtisar tentang permohonan hak pakai tanggal 15 Mei 1974 Nomor 01/HP/1974;
- g) Surat pernyataan tanggal 16 Januari 1974 oleh DJ Harahap Bc. KN selaku wakantor Bendahara Negara.



LRA Pendapatan

Dan

LRA Pengembalian Pendapatan

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 19/04/20 5:22 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum					
424136	Pendapatan Investasi	53,169,511,600	57,338,299,441	0	57,338,299,441	107.84
424138	Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	13,298,000,000,000	0	0	0	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4241	13,351,169,511,600	57,338,299,441	0	57,338,299,441	0.43
4249	Pendapatan BLU Lainnya					
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	319,754,267,400	1,676,067,877,018	308,219,178	1,675,759,657,840	524.08
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang	0	2,746,865,239	0	2,746,865,239	0
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	138,814,288	0	138,814,288	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4249	319,754,267,400	1,678,953,556,545	308,219,178	1,678,645,337,367	524.98
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha					
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	8,350,000	77,867,900	0	77,867,900	932.55
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	84,518,399	1,015,400,528	0	1,015,400,528	1201.4
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	279,584,000	806,208,513	0	806,208,513	288.36
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1,553,405,000	3,054,946,291	738,918	3,054,207,373	196.61
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	1,925,857,399	4,954,423,232	738,918	4,953,684,314	257.22
4257	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan					
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap	172,166,667	203,817,599	0	203,817,599	118.38
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4257	172,166,667	203,817,599	0	203,817,599	118.38
4258	Pendapatan Denda					
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	650,393,041	0	650,393,041	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4258	0	650,393,041	0	650,393,041	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	145,800,000	291,947,319	0	291,947,319	200.24

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 19/04/20 5:22 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	66,000,000	521,704,295	0	521,704,295	790.46
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	50,000,000	323,356,698	0	323,356,698	646.71
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	3,200,000,000	2,527,763,270	2,143,130	2,525,620,140	78.93
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	1,350,000,000	6,001	0	6,001	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	4,811,800,000	3,664,777,583	2,143,130	3,662,634,453	76.12
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	13,677,833,603,066	1,745,765,267,441	311,101,226	1,745,454,166,215	12.76
	JUMLAH PENDAPATAN	13,677,833,603,066	1,745,765,267,441	311,101,226	1,745,454,166,215	12.76

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2

ESELON I : 08

DITJEN PERBENDAHARAAN

Tanggal : 19/04/20 5:22 AM

Halaman : 1

Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
0100	DKI JAKARTA					
015115	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	0	273,000	0	273,000	0
015116	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN	1,350,000,000	0	0	0	0
527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	66,600,000	117,624,731	0	117,624,731	176.61
527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	0	316,570,946	0	316,570,946	0
527048	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II	0	3,510,000	0	3,510,000	0
527052	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA III	0	10,663,200	0	10,663,200	0
531293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV	0	234,000	0	234,000	0
579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	30,700,000	26,178,100	0	26,178,100	85.27
	JUMLAH PENDAPATAN (0100) - DKI JAKARTA	1,447,300,000	475,053,977	0	475,053,977	32.74
0199	INSTANSI PUSAT					
409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	13,538,000,000,000	1,486,027,679,614	308,219,178	1,485,719,460,436	10.97
439165	KOMITE STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH (KSAP)	0	450,000	0	450,000	0
439171	SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA	0	8,578,987	0	8,578,987	0
440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	132,923,779,000	250,264,176,372	0	250,264,176,372	188.28
527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	4,430,200,000	6,086,151,312	2,882,048	6,083,269,264	137.31
	JUMLAH PENDAPATAN (0199) - INSTANSI PUSAT	13,675,353,979,000	1,742,387,036,285	311,101,226	1,742,075,935,059	67.31

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2

ESELON I : 08

DITJEN PERBENDAHARAAN

Tanggal : 19/04/20 5:22 AM

Halaman : 2

Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
0200	JAWA BARAT					
527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	60,000,000	107,775,000	0	107,775,000	179.63
527102	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I	0	35,150	0	35,150	0
527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	23,000,000	44,985,152	0	44,985,152	195.59
527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	0	434,216,550	0	434,216,550	0
527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	2,800,000	8,529,629	0	8,529,629	304.63
527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	0	10,880,977	0	10,880,977	0
634661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN	0	59,638,042	0	59,638,042	0
652449	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI	3,000,000	5,793,000	0	5,793,000	193.1
	JUMLAH PENDAPATAN (0200) - JAWA BARAT	88,800,000	671,853,500	0	671,853,500	109.12
0300	JAWA TENGAH					
451547	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II	0	1,764,600	0	1,764,600	0
527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	0	1,454,000	0	1,454,000	0
527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	32,000,000	129,598,000	0	129,598,000	404.99
527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	27,000,000	50,024,351	0	50,024,351	185.28
527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	45,000,000	9,949,000	0	9,949,000	22.11
527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	0	39,595,000	0	39,595,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2

ESELON I : 08

DITJEN PERBENDAHARAAN

Tanggal : 19/04/20 5:22 AM

Halaman : 3

Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	800,000	6,713,400	0	6,713,400	839.18
527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	0	4,388,690	0	4,388,690	0
648812	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI	0	370,000	0	370,000	0
648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	0	5,754,566	0	5,754,566	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0300) - JAWA TENGAH	104,800,000	249,611,607	0	249,611,607	145.16
0400	DI YOGYAKARTA					
497587	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES	250,000	0	0	0	0
527399	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA	84,518,399	84,518,399	0	84,518,399	100
634277	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	16,300,000	23,373,892	0	23,373,892	143.4
634792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI	0	22,100,000	0	22,100,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0400) - DI YOGYAKARTA	101,068,399	129,992,291	0	129,992,291	60.85
0500	JAWA TIMUR					
451553	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II	3,000,000	21,000,000	0	21,000,000	700
527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	94,000,000	92,176,450	0	92,176,450	98.06
527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	9,600,000	11,532,674	0	11,532,674	120.13
527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	0	11,211,700	0	11,211,700	0
527450	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	22,800,000	2,750,000	0	2,750,000	12.06

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2

ESELON I : 08

DITJEN PERBENDAHARAAN

Tanggal : 19/04/20 5:22 AM

Halaman : 4

Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
527467	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO	20,200,000	0	0	0	0
527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	4,500,000	42,000	0	42,000	0.93
527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	0	5,066,000	0	5,066,000	0
634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	0	29,853	0	29,853	0
648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	0	10,918,950	0	10,918,950	0
648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	0	1,250,000	0	1,250,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0500) - JAWA TIMUR	154,100,000	155,977,627	0	155,977,627	84.65
0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM					
527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	0	41,500,200	0	41,500,200	0
527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK SEUMAWE	0	175,000	0	175,000	0
527624	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON	0	2,780,800	0	2,780,800	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0600) - NANGGROE ACEH DARUSSALAM	0	44,456,000	0	44,456,000	0
0700	SUMATERA UTARA					
527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0	215,894	0	215,894	0
527670	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	0	36,540,000	0	36,540,000	0
527709	SIDEMPUAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU	0	9,792,024	0	9,792,024	0
527734	PRAPAT KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDIKALANG	0	397,000	0	397,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2

ESELON I : 08

DITJEN PERBENDAHARAAN

Tanggal : 19/04/20 5:22 AM

Halaman : 5

Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI	33,758,000	33,758,000	0	33,758,000	100
527755	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIGE	500,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0700) - SUMATERA UTARA	34,258,000	80,702,918	0	80,702,918	16.67
0800	SUMATERA BARAT					
527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	0	14,200,000	0	14,200,000	0
527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	121,000,000	206,041,749	0	206,041,749	170.28
527823	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK SIKAPING	0	26,050,000	0	26,050,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0800) - SUMATERA BARAT	121,000,000	246,291,749	0	246,291,749	56.76
0900	RIAU					
527844	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU	21,800,000	0	0	0	0
613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	0	49,020,000	0	49,020,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0900) - RIAU	21,800,000	49,020,000	0	49,020,000	0
1000	JAMBI					
527890	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI	17,500,000	35,150	0	35,150	0.2
527908	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH	0	1,100,000	0	1,100,000	0
613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	3,500,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1000) - JAMBI	21,000,000	1,135,150	0	1,135,150	0.07

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2

ESELON I : 08

DITJEN PERBENDAHARAAN

Tanggal : 19/04/20 5:22 AM

Halaman : 6

Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
1100	SUMATERA SELATAN					
527933	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0	10,030,000	0	10,030,000	0
527940	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG	0	16,555,001	0	16,555,001	0
527961	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU	0	52,023,638	0	52,023,638	0
634530	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LAHAT	1,000,000	68,000	0	68,000	6.8
648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	0	13,364,809	0	13,364,809	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1100) - SUMATERA SELATAN	1,000,000	92,041,448	0	92,041,448	1.36
1200	LAMPUNG					
528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	92,300,000	12,000,000	0	12,000,000	13
528036	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO LAMPUNG	21,666,667	29,427,668	0	29,427,668	135.82
634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	1,500,000	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1200) - LAMPUNG	115,466,667	41,427,668	0	41,427,668	49.61
1300	KALIMANTAN BARAT					
528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	94,781,000	94,781,000	0	94,781,000	100
528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	16,000,000	0	0	0	0
528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	0	3,593,547	0	3,593,547	0
648893	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU	0	2,751,561	0	2,751,561	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 19/04/20 5:22 AM
Halaman : 7
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (1300) - KALIMANTAN BARAT	110,781,000	101,126,108	0	101,126,108	25
1400	KALIMANTAN TENGAH					
528125	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA	10,000,000	12,101,000	0	12,101,000	121.01
528146	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK	1,600,000	0	0	0	0
528150	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKALAN BUN	0	18,541,005	0	18,541,005	0
613764	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	14,800,000	130,240,788	0	130,240,788	880.01
648868	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMPIT	0	13,841,323	0	13,841,323	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1400) - KALIMANTAN TENGAH	26,400,000	174,724,116	0	174,724,116	200.2
1500	KALIMANTAN SELATAN					
528171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0	19,677,000	0	19,677,000	0
528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	0	93,432,800	0	93,432,800	0
528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	0	29,610,000	0	29,610,000	0
528200	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI	6,000,000	6,000,000	0	6,000,000	100
648872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PELEIHARI	850,000	71,000	0	71,000	8.35
	JUMLAH PENDAPATAN (1500) - KALIMANTAN SELATAN	6,850,000	148,790,800	0	148,790,800	21.67
1600	KALIMANTAN TIMUR					
528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	0	23,002,785	0	23,002,785	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 19/04/20 5:22 AM
Halaman : 8
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
528242	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIKPAPAN	7,200,000	4,092,100	0	4,092,100	56.83
613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	19,300,000	4,750,000	0	4,750,000	24.61
	JUMLAH PENDAPATAN (1600) - KALIMANTAN TIMUR	26,500,000	31,844,885	0	31,844,885	27.15
1700	SULAWESI UTARA					
528277	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO	0	1,584,000	0	1,584,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1700) - SULAWESI UTARA	0	1,584,000	0	1,584,000	0
1800	SULAWESI TENGAH					
528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	0	89,343,834	0	89,343,834	0
528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK	0	46,728,049	0	46,728,049	0
613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0	138,399,998	0	138,399,998	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1800) - SULAWESI TENGAH	0	274,471,881	0	274,471,881	0
1900	SULAWESI SELATAN					
528391	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANTA ENG	0	9,163,150	0	9,163,150	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1900) - SULAWESI SELATAN	0	9,163,150	0	9,163,150	0
2000	SULAWESI TENGGARA					
635162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA	0	6,633,333	0	6,633,333	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2000) - SULAWESI TENGGARA	0	6,633,333	0	6,633,333	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 19/04/20 5:22 AM
Halaman : 9
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
2100 528519	MALUKU KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI	4,500,000	5,250,000	0	5,250,000	116.67
	JUMLAH PENDAPATAN (2100) - MALUKU	4,500,000	5,250,000	0	5,250,000	116.67
2200 528544 528565 635045	BALI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA	28,000,000 0 0	597,472 4,602,500 11,445,900	0 0 0	597,472 4,602,500 11,445,900	2.13 0 0
	JUMLAH PENDAPATAN (2200) - BALI	28,000,000	16,645,872	0	16,645,872	0.71
2300 528586 528608 613785 648847	NUSA TENGGARA BARAT KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SELONG	0 0 0 0	1,919,793 2,822,000 15,000,000 25,307,876	0 0 0 0	1,919,793 2,822,000 15,000,000 25,307,876	0 0 0 0
	JUMLAH PENDAPATAN (2300) - NUSA TENGGARA BARAT	0	45,049,669	0	45,049,669	0
2400 652453	NUSA TENGGARA TIMUR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA	0	37,000	0	37,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2400) - NUSA TENGGARA TIMUR	0	37,000	0	37,000	0

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 19/04/20 5:22 AM
Halaman : 10
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
2500 528682	PAPUA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	25,500,000	60,207,390	0	60,207,390	236.11
	JUMLAH PENDAPATAN (2500) - PAPUA	25,500,000	60,207,390	0	60,207,390	236.11
2600 528792 613750	BENGKULU KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	0 29,600,000	3,110,000 0	0 0	3,110,000 0	0 0
	JUMLAH PENDAPATAN (2600) - BENGKULU	29,600,000	3,110,000	0	3,110,000	0
2800 528497	MALUKU UTARA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	0	16,784,868	0	16,784,868	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2800) - MALUKU UTARA	0	16,784,868	0	16,784,868	0
2900 527162 634260 634633 648783	BANTEN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	0 0 0 0	80,284,000 3,567,000 669,600 450,000	0 0 0 0	80,284,000 3,567,000 669,600 450,000	0 0 0 0
	JUMLAH PENDAPATAN (2900) - BANTEN	0	84,970,600	0	84,970,600	0
3200	KEPULAUAN RIAU					

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 19/04/20 5:22 AM
Halaman : 11
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0	10,698,325	0	10,698,325	0
539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	0	66,000,000	0	66,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3200) - KEPULAUAN RIAU	0	76,698,325	0	76,698,325	0
3300	PAPUA BARAT					
330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	0	38,460,000	0	38,460,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3300) - PAPUA BARAT	0	38,460,000	0	38,460,000	0
3400	SULAWESI BARAT					
451604	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU	0	6,267,500	0	6,267,500	0
528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	0	118,580	0	118,580	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3400) - SULAWESI BARAT	0	6,386,080	0	6,386,080	0
3500	KALIMANTAN UTARA					
528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAkan	0	1,915,000	0	1,915,000	0
634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	10,900,000	36,814,144	0	36,814,144	337.74
	JUMLAH PENDAPATAN (3500) - KALIMANTAN UTARA	10,900,000	38,729,144	0	38,729,144	168.87
	JUMLAH PENDAPATAN	13,677,833,603,066	1,745,765,267,441	311,101,226	1,745,454,166,215	55.145



LRA Belanja

Dan

LRA Pengembalian Belanja

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/04/20 4:29 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	345,137,631,000	367,179,329,000	367,178,328,950	13,487,864	367,164,841,086	100	14,487,914
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4,889,000	6,000,000	5,937,262	1,226,190	4,711,072	78.52	1,288,928
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	18,976,682,000	25,753,714,000	25,752,711,782	17,838,676	25,734,873,106	99.93	18,840,894
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	7,738,104,000	7,220,881,000	7,219,880,420	8,870,286	7,211,010,134	99.86	9,870,866
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	17,332,440,000	19,619,020,000	19,618,020,000	12,395,600	19,605,624,400	99.93	13,395,600
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,554,909,000	335,550,000	334,550,000	0	334,550,000	99.7	1,000,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	10,083,941,000	1,045,000,000	1,043,479,662	0	1,043,479,662	99.85	1,520,338
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	7,328,623,000	16,729,297,000	16,728,296,600	2,502,510	16,725,794,090	99.98	3,502,910
511129	Belanja Uang Makan PNS	64,085,935,000	55,914,614,000	55,097,230,600	5,903,750	55,091,326,850	98.53	823,287,150
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	75,600,000	64,350,000	63,350,000	150,000	63,200,000	98.21	1,150,000
511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1,350,000,000	1,246,385,000	1,245,385,000	8,985,999	1,236,399,001	99.2	9,985,999
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	10,697,324,000	13,696,285,000	13,695,285,000	14,325,000	13,680,960,000	99.89	15,325,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	484,366,078,000	508,810,425,000	507,982,455,276	85,685,875	507,896,769,401	99.84	913,655,599
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	46,947,813,000	38,258,920,000	37,516,197,750	12,259,050	37,503,938,700	98.03	754,981,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	46,947,813,000	38,258,920,000	37,516,197,750	12,259,050	37,503,938,700	98.06	754,981,300
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	531,313,891,000	547,069,345,000	545,498,653,026	97,944,925	545,400,708,101	99.71	1668636899
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	96,874,537,000	100,350,086,000	99,628,562,782	5,332,590	99,623,230,192	99.28	726,855,808
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,491,828,000	5,922,589,000	5,383,647,194	0	5,383,647,194	90.9	538,941,806
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	31,830,448,000	29,437,399,000	29,186,871,000	7,460,000	29,179,411,000	99.12	257,988,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	34,736,378,000	37,182,327,000	36,418,198,194	7,762,164	36,410,436,030	97.92	771,890,970
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	172,933,191,000	172,892,401,000	170,617,279,170	20,554,754	170,596,724,416	98.68	2,295,676,584
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	69,077,175,000	62,679,887,000	60,001,616,588	370,000	60,001,246,588	95.73	2,678,640,412
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	9,398,610,000	9,517,754,000	9,325,300,000	20,765,000	9,304,535,000	97.76	213,219,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,517,988,000	3,232,996,000	3,027,092,800	3,687,500	3,023,405,300	93.52	209,590,700
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	81,993,773,000	75,430,637,000	72,354,009,388	24,822,500	72,329,186,888	95.92	3,101,450,112
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	22,024,740,000	24,061,898,000	23,968,605,600	1,274,235	23,967,331,365	99.61	94,566,635
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	22,024,740,000	24,061,898,000	23,968,605,600	1,274,235	23,967,331,365	99.61	94,566,635
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	38,679,691,000	34,167,559,000	33,854,631,581	14,552,750	33,840,078,831	99.04	327,480,169

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
 ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
 DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 19/04/20 4:29 PM
 Halaman : 2
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
522112	Belanja Langganan Telepon	5,571,167,000	3,891,372,000	3,734,077,492	5,034,990	3,729,042,502	95.83	162,329,498
522113	Belanja Langganan Air	2,671,100,000	2,910,636,000	2,660,587,707	1,433,940	2,659,153,767	91.36	251,482,233
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	89,100,000	220,909,000	195,663,691	8,999	195,654,692	88.57	25,254,308
522131	Belanja Jasa Konsultan	1,267,500,000	553,705,000	544,835,500	0	544,835,500	98.4	8,869,500
522141	Belanja Sewa	4,292,868,000	2,504,949,000	2,078,659,503	0	2,078,659,503	82.98	426,289,497
522151	Belanja Jasa Profesi	5,302,980,000	3,415,001,000	3,244,128,900	0	3,244,128,900	95	170,872,100
522191	Belanja Jasa Lainnya	13,207,732,000	16,062,181,000	15,990,030,627	0	15,990,030,627	99.55	72,150,373
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	71,082,138,000	63,726,312,000	62,302,615,001	21,030,679	62,281,584,322	97.77	1,444,727,678
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	49,513,523,000	51,267,322,000	51,003,768,516	858,707	51,002,909,809	99.48	264,412,191
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	69,729,000	25,729,000	25,206,500	0	25,206,500	97.97	522,500
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,707,947,000	2,518,514,000	2,484,460,949	0	2,484,460,949	98.65	34,053,051
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	98,678,380,000	88,732,335,000	87,994,342,630	1,849,053	87,992,493,577	99.17	739,841,423
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan	135,860,000	159,785,000	159,785,000	0	159,785,000	100	0
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	900,000,000	1,261,850,000	1,261,837,500	0	1,261,837,500	100	12,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	152,005,439,000	143,965,535,000	142,929,401,095	2,707,760	142,926,693,335	99.28	1,038,841,665
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Biasa	100,014,747,000	109,069,373,000	104,179,336,406	53,527,199	104,125,809,207	95.47	4,943,563,793
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,434,280,000	8,262,041,000	7,387,790,433	1,720,000	7,386,070,433	89.4	875,970,567
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	73,776,106,000	58,103,907,000	56,611,412,420	34,669,350	56,576,743,070	97.37	1,527,163,930
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	19,863,487,000	19,998,501,000	19,781,500,976	17,477,300	19,764,023,676	98.83	234,477,324
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	203,088,620,000	195,433,822,000	187,960,040,235	107,393,849	187,852,646,386	96.18	7,581,175,614
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	1,194,924,000	1,176,454,000	897,138,699	0	897,138,699	76.26	279,315,301
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	1,194,924,000	1,176,454,000	897,138,699	0	897,138,699	76.26	279,315,301
5251	Belanja Barang BLU							
525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	106,582,414,000	106,633,654,000	63,819,528,555	0	63,819,528,555	59.85	42,814,125,445
525112	Belanja Barang	15,218,063,000	13,681,363,000	8,609,007,069	0	8,609,007,069	62.93	5,072,355,931
525113	Belanja Jasa	36,112,737,000	34,545,745,000	20,934,160,706	0	20,934,160,706	60.6	13,611,584,294
525114	Belanja Pemeliharaan	1,843,370,000	1,836,280,000	1,424,419,334	0	1,424,419,334	77.57	411,860,666
525115	Belanja Perjalanan	33,253,179,000	36,316,721,000	15,739,999,283	0	15,739,999,283	43.34	20,576,721,717
525117	Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	10,857,000,000,0	10,857,000,000,0	5,734,385,403,34	0	5,734,385,403,34	52.82	5,122,614,596,6
525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	26,000,000	22,000,000	6,224,700	0	6,224,700	28.29	15,775,300
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5251	11,050,035,763,00	11,050,035,763,00	5,844,918,742,988	0	5,844,918,742,988	52.9	5,205,117,020,0
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	11,754,358,588,00	11,726,722,822,00	6,505,947,832,176	177,783,777	6,505,770,048,399	55.48	5220952773601
53	BELANJA MODAL							

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
ESELON I : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/04/20 4:29 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1 --

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
5311	Belanja Modal Tanah							
531111	Belanja Modal Tanah	2,116,084,000	1,384,889,000	1,384,845,061	0	1,384,845,061	100	43,939
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5311	2,116,084,000	1,384,889,000	1,384,845,061	0	1,384,845,061	100	43,939
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	132,894,089,000	144,918,039,000	142,503,647,965	0	142,503,647,965	98.33	2,414,391,035
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1,400,000,000	1,295,700,000	1,285,994,920	0	1,285,994,920	99.25	9,705,080
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	134,294,089,000	146,213,739,000	143,789,642,885	0	143,789,642,885	98.34	2,424,096,115
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan							
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35,125,530,000	35,014,029,000	34,953,213,713	0	34,953,213,713	99.83	60,815,287
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	24,560,653,000	26,991,173,000	26,952,054,757	0	26,952,054,757	99.86	39,118,243
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5331	59,686,183,000	62,005,202,000	61,905,268,470	0	61,905,268,470	99.84	99,933,530
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	75,893,967,000	85,032,218,000	84,951,104,000	0	84,951,104,000	99.9	81,114,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	75,893,967,000	85,032,218,000	84,951,104,000	0	84,951,104,000	99.9	81,114,000
5371	Belanja Modal BLU							
537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	1,864,237,000	1,810,237,000	1,370,915,500	0	1,370,915,500	75.73	439,321,500
537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	100,000,000	154,000,000	50,820,000	0	50,820,000	33	103,180,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5371	1,964,237,000	1,964,237,000	1,421,735,500	0	1,421,735,500	72.38	542,501,500
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	273,954,560,000	296,600,285,000	293,452,595,916	0	293,452,595,916	98.94	3147689084
	JUMLAH BELANJA	12,559,627,039,00	12,570,392,452,00	7,344,899,081,118	275,728,702	7,344,623,352,416	58.43	5,225,769,099,5

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/04/20 4:30 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1a --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
08	DITJEN PERBENDAHARAAN							
01508001KD	KANWIL NAD							
527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	4,335,871,000	5,033,965,000	4,874,865,268	130,030	4,874,735,238	96.84	159,229,762
527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	2,954,854,000	2,867,993,000	2,832,985,945	0	2,832,985,945	98.78	35,007,055
527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH	2,300,535,000	2,274,328,000	2,272,649,435	0	2,272,649,435	99.93	1,678,565
527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	2,223,880,000	2,028,559,000	2,001,324,469	1,170,000	2,000,154,469	98.6	28,404,531
527598	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN	1,625,371,000	1,545,813,000	1,524,631,387	0	1,524,631,387	98.63	21,181,613
527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK	2,842,863,000	2,752,503,000	2,700,642,614	2,000,000	2,698,642,614	98.04	53,860,386
527610	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE	1,744,238,000	1,589,833,000	1,575,514,695	1,430,000	1,574,084,695	99.01	15,748,305
527624	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON	1,679,952,000	1,611,204,000	1,578,949,248	0	1,578,949,248	98	32,254,752
	JUMLAH BELANJA KANWIL NAD	19,707,564,000	19,704,198,000	19,361,563,061	4,730,030	19,356,833,031	98.26	347,364,969
01508002KD	KANWIL SUMATERA UTARA							
451562	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II	1,991,942,000	2,059,132,000	2,036,742,835	0	2,036,742,835	98.91	22,389,165
527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	5,887,219,000	5,529,107,000	5,399,034,501	1,000,000	5,398,034,501	97.63	131,072,499
527652	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I	1,797,110,000	1,711,825,000	1,699,541,595	0	1,699,541,595	99.28	12,283,405
527666	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR	2,234,888,000	2,124,856,000	2,111,601,550	0	2,111,601,550	99.38	13,254,450
527670	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG SIDEMPUNAN	2,464,007,000	2,457,190,000	2,359,688,745	0	2,359,688,745	96.03	97,501,255
527687	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG	1,593,359,000	1,548,446,000	1,543,639,072	0	1,543,639,072	99.69	4,806,928
527691	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG	2,246,182,000	2,103,268,000	2,080,199,135	0	2,080,199,135	98.9	23,068,865
527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	1,533,637,000	1,490,072,000	1,488,450,023	0	1,488,450,023	99.89	1,621,977
527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	1,631,657,000	1,600,998,000	1,597,699,438	0	1,597,699,438	99.79	3,298,562
527734	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDIKALANG	1,343,836,000	1,338,136,000	1,293,506,630	851	1,293,505,779	96.66	44,630,221
527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING	1,905,073,000	1,823,993,000	1,705,100,651	0	1,705,100,651	93.48	118,892,349
527755	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIGE	1,598,031,000	1,520,834,000	1,489,420,623	74,000	1,489,346,623	97.93	31,487,377
	JUMLAH BELANJA KANWIL SUMATERA UTARA	26,226,941,000	25,307,857,000	24,804,624,798	1,074,851	24,803,549,947	98.01	504,307,053
01508003KD	KANWIL SUMATERA BARAT							
527776	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	4,902,123,000	4,698,936,000	4,668,563,622	0	4,668,563,622	99.35	30,372,378
527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	7,001,988,000	6,849,720,000	6,780,666,356	0	6,780,666,356	98.99	69,053,644
527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	2,220,962,000	2,306,853,000	2,281,786,247	100,000	2,281,686,247	98.91	25,166,753
527802	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIJUNJUNG	1,447,023,000	1,379,969,000	1,377,151,677	0	1,377,151,677	99.8	2,817,323
527819	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK	1,900,173,000	1,768,264,000	1,744,019,489	123,000	1,743,896,489	98.62	24,367,511
527823	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK	1,566,408,000	1,400,767,000	1,394,502,597	0	1,394,502,597	99.55	6,264,403
634409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN	1,446,068,000	1,342,030,000	1,313,856,763	0	1,313,856,763	97.9	28,173,237

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/04/20 4:30 PM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1a --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA KANWIL SUMATERA BARAT	20,484,745,000	19,746,539,000	19,560,546,751	223,000	19,560,323,751	99.06	186,215,249
01508004KD	KANWIL RIAU							
527844	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU	2,580,114,000	2,715,050,000	2,697,983,613	35,000	2,697,948,613	99.37	17,101,387
527865	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT	1,654,130,000	1,586,143,000	1,545,184,985	592,000	1,544,592,985	97.38	41,550,015
527872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI	2,207,425,000	2,232,331,000	2,167,580,571	580,000	2,167,000,571	97.07	65,330,429
613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	4,356,624,000	4,017,204,000	3,979,861,246	2,069,000	3,977,792,246	99.02	39,411,754
	JUMLAH BELANJA KANWIL RIAU	10,798,293,000	10,550,728,000	10,390,610,415	3,276,000	10,387,334,415	98.48	163,393,585
01508005KD	KANWIL JAMBI							
527890	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI	2,644,856,000	2,589,656,000	2,577,457,714	0	2,577,457,714	99.53	12,198,286
527908	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI	1,466,437,000	1,331,782,000	1,297,495,530	0	1,297,495,530	97.43	34,286,470
527912	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA	1,473,060,000	1,421,247,000	1,415,284,820	0	1,415,284,820	99.58	5,962,180
613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	3,869,174,000	3,713,569,000	3,706,947,262	70,000	3,706,877,262	99.82	6,691,738
634497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUALA TUNGKAL	1,383,702,000	1,340,793,000	1,338,889,501	0	1,338,889,501	99.86	1,903,499
648762	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANGKO	1,563,361,000	1,359,756,000	1,346,807,661	0	1,346,807,661	99.05	12,948,339
	JUMLAH BELANJA KANWIL JAMBI	12,400,590,000	11,756,803,000	11,682,882,488	70,000	11,682,812,488	99.37	73,990,512
01508006KD	KANWIL SUMATERA SELATAN							
527933	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA	4,234,788,000	3,937,951,000	3,911,221,325	0	3,911,221,325	99.32	26,729,675
527940	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG	2,015,100,000	1,959,735,000	1,943,720,150	2,999	1,943,717,151	99.18	16,017,849
527961	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK	2,103,803,000	1,806,115,000	1,782,405,399	27,490	1,782,377,909	98.69	23,737,091
527975	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA	1,829,288,000	1,751,845,000	1,704,379,553	500,000	1,703,879,553	97.26	47,965,447
634530	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LAHAT	2,311,195,000	2,292,505,000	2,226,637,487	0	2,226,637,487	97.13	65,867,513
648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	1,941,924,000	1,893,636,000	1,889,148,071	0	1,889,148,071	99.76	4,487,929
	JUMLAH BELANJA KANWIL SUMATERA SELATAN	14,436,098,000	13,641,787,000	13,457,511,985	530,489	13,456,981,496	98.65	184,805,504
01508007KD	KANWIL LAMPUNG							
528001	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	4,992,315,000	3,660,863,000	3,602,857,909	120,000	3,602,737,909	98.41	58,125,091
528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	2,631,284,000	2,155,823,000	2,090,463,975	0	2,090,463,975	96.97	65,359,025
528022	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABUMI	2,047,342,000	2,069,961,000	2,025,912,084	0	2,025,912,084	97.87	44,048,916
528036	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO LAMPUNG	2,021,040,000	1,888,924,000	1,875,004,180	0	1,875,004,180	99.26	13,919,820
634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	1,491,448,000	1,433,167,000	1,367,104,947	0	1,367,104,947	95.39	66,062,053
	JUMLAH BELANJA KANWIL LAMPUNG	13,183,429,000	11,208,738,000	10,961,343,095	120,000	10,961,223,095	97.79	247,514,905
01508008KD	KANWIL BENGKULU							
445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	1,463,860,000	1,439,581,000	1,434,801,032	4,339,200	1,430,461,832	99.37	9,119,168
528785	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU	2,081,685,000	1,999,372,000	1,998,375,364	105,000	1,998,270,364	99.94	1,101,636

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/04/20 4:30 PM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1a --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
528792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA	1,677,962,000	1,530,707,000	1,500,502,939	0	1,500,502,939	98.03	30,204,061
613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	3,885,374,000	4,474,575,000	4,472,105,126	0	4,472,105,126	99.94	2,469,874
634608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CURUP	1,916,671,000	2,005,535,000	2,000,350,071	138,000	2,000,212,071	99.73	5,322,929
	JUMLAH BELANJA KANWIL BENGKULU	11,025,552,000	11,449,770,000	11,406,134,532	4,582,200	11,401,552,332	99.62	48,217,668
01508009KD	KANWIL BABEL							
527954	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG	2,188,363,000	1,978,097,000	1,930,879,198	0	1,930,879,198	97.61	47,217,802
527982	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PANDAN	1,886,946,000	1,698,086,000	1,668,418,156	0	1,668,418,156	98.25	29,667,844
634256	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	3,378,873,000	3,164,849,000	3,135,434,232	9,862,750	3,125,571,482	98.76	39,277,518
	JUMLAH BELANJA KANWIL BABEL	7,454,182,000	6,841,032,000	6,734,731,586	9,862,750	6,724,868,836	98.45	116,163,164
01508010KD	KANWIL BANTEN							
527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	2,336,372,000	2,281,468,000	2,235,167,282	0	2,235,167,282	97.97	46,300,718
634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	4,053,336,000	3,850,185,000	3,812,278,326	0	3,812,278,326	99.02	37,906,674
634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	2,445,269,000	2,249,974,000	2,247,828,818	21,250	2,247,807,568	99.9	2,166,432
648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	1,681,011,000	1,602,837,000	1,587,404,861	97,000	1,587,307,861	99.03	15,529,139
	JUMLAH BELANJA KANWIL BANTEN	10,515,988,000	9,984,464,000	9,882,679,287	118,250	9,882,561,037	98.98	101,902,963
01508011KD	KANWIL DKI JAKARTA							
015114	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	2,191,732,000	2,116,718,000	2,076,537,615	150,164	2,076,387,451	98.09	40,330,549
015115	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	2,287,433,000	2,092,909,000	2,057,298,904	0	2,057,298,904	98.3	35,610,096
015116	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN	2,125,389,000	1,898,380,000	1,834,741,545	203,050	1,834,538,495	96.64	63,841,505
015117	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI	5,227,372,000	6,043,299,000	5,987,272,114	0	5,987,272,114	99.07	56,026,886
527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	8,744,977,000	7,804,101,000	7,691,493,642	0	7,691,493,642	98.56	112,607,358
527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	5,729,178,000	5,602,435,000	5,543,737,948	2,667,000	5,541,070,948	98.9	61,364,052
527048	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II	4,171,534,000	4,362,357,000	4,341,836,043	440,355	4,341,395,688	99.52	20,961,312
527052	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA III	2,489,973,000	2,363,784,000	2,252,093,681	6,000	2,252,087,681	95.27	111,696,319
531293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV	2,230,192,000	2,208,717,000	2,164,616,743	193,000	2,164,423,743	97.99	44,293,257
579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	3,484,775,000	3,350,579,000	3,285,817,483	0	3,285,817,483	98.07	64,761,517
613811	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	2,595,041,000	2,506,716,000	2,462,927,947	526,000	2,462,401,947	98.23	44,314,053
	JUMLAH BELANJA KANWIL DKI JAKARTA	41,277,596,000	40,349,995,000	39,698,373,665	4,185,569	39,694,188,096	98.39	655,806,904
01508012KD	KANWIL JAWA BARAT							
451531	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG II	2,684,627,000	2,531,391,000	2,519,361,844	0	2,519,361,844	99.52	12,029,156
527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	8,817,421,000	8,137,482,000	7,865,087,447	0	7,865,087,447	96.65	272,394,553

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/04/20 4:30 PM
Halaman : 4
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1a --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
527102	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I	2,183,479,000	2,045,496,000	1,988,555,451	70,300	1,988,485,151	97.21	57,010,849
527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	2,545,485,000	2,266,356,000	2,238,476,429	0	2,238,476,429	98.77	27,879,571
527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	3,402,082,000	3,196,612,000	3,137,329,532	0	3,137,329,532	98.15	59,282,468
527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	2,836,500,000	2,615,266,000	2,511,701,866	0	2,511,701,866	96.04	103,564,134
527158	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA	1,998,618,000	1,811,692,000	1,768,990,433	0	1,768,990,433	97.64	42,701,567
527183	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG	1,874,305,000	1,718,846,000	1,656,338,805	0	1,656,338,805	96.36	62,507,195
527205	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GARUT	1,735,766,000	1,530,372,000	1,497,129,390	0	1,497,129,390	97.83	33,242,610
527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	2,352,845,000	2,127,531,000	2,125,855,819	0	2,125,855,819	99.92	1,675,181
634661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN	2,033,053,000	1,906,972,000	1,890,369,424	1,477,000	1,888,892,424	99.05	18,079,576
648790	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMEDANG	1,812,650,000	1,708,772,000	1,696,525,936	1,520,000	1,695,005,936	99.19	13,766,064
652449	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI	2,330,922,000	2,104,209,000	2,033,263,590	105,300	2,033,158,290	96.62	71,050,710
	JUMLAH BELANJA KANWIL JAWA BARAT	36,607,753,000	33,700,997,000	32,928,985,966	3,172,600	32,925,813,366	97.71	775,183,634
01508013KD	KANWIL JAWA TENGAH							
451547	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II	2,273,541,000	2,109,531,000	2,076,780,826	1,246,000	2,075,534,826	98.39	33,996,174
527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	6,379,062,000	5,829,906,000	5,788,394,428	0	5,788,394,428	99.29	41,511,572
527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	3,517,478,000	3,550,574,000	3,542,426,791	20,000	3,542,406,791	99.77	8,167,209
527289	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA	2,857,934,000	2,816,658,000	2,810,273,910	0	2,810,273,910	99.77	6,384,090
527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	1,912,304,000	1,762,084,000	1,733,783,104	0	1,733,783,104	98.39	28,300,896
527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA	2,393,436,000	2,276,241,000	2,197,004,349	0	2,197,004,349	96.52	79,236,651
527315	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKALONGAN	2,572,158,000	2,469,131,000	2,446,887,995	35,150	2,446,852,845	99.1	22,278,155
527322	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PATI	2,466,306,000	2,078,770,000	2,031,490,644	40,000	2,031,450,644	97.72	47,319,356
527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	2,068,405,000	1,977,479,000	1,944,256,880	742,000	1,943,514,880	98.28	33,964,120
527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	2,481,285,000	2,373,154,000	2,348,496,442	0	2,348,496,442	98.96	24,657,558
527357	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	2,279,707,000	2,209,589,000	2,205,418,743	0	2,205,418,743	99.81	4,170,257
527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	1,975,374,000	1,872,627,000	1,867,179,200	286,200	1,866,893,000	99.69	5,734,000
634722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN	2,015,993,000	1,864,000,000	1,848,275,130	0	1,848,275,130	99.16	15,724,870
648805	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN	1,592,554,000	1,547,856,000	1,356,374,237	75,150	1,356,299,087	87.62	191,556,913
648812	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI	1,628,253,000	1,617,150,000	1,582,699,501	538,000	1,582,161,501	97.84	34,988,499
648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA	1,644,523,000	1,575,952,000	1,521,733,944	0	1,521,733,944	96.56	54,218,056
	JUMLAH BELANJA KANWIL JAWA TENGAH	40,058,313,000	37,930,702,000	37,301,476,124	2,982,500	37,298,493,624	98.34	632,208,376
01508014KD	KANWIL DI YOGYAKARTA							
497587	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES	1,558,312,000	1,514,460,000	1,511,752,689	0	1,511,752,689	99.82	2,707,311
527399	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA	2,399,412,000	2,308,389,000	2,299,940,074	0	2,299,940,074	99.63	8,448,926
634277	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	5,572,309,000	5,152,086,000	5,046,603,084	181,766	5,046,421,318	97.95	105,664,682

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/04/20 4:30 PM
Halaman : 5
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1a --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
634792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI	1,626,105,000	1,999,145,000	1,992,578,602	0	1,992,578,602	99.67	6,566,398
	JUMLAH BELANJA KANWIL DI YOGYAKARTA	11,156,138,000	10,974,080,000	10,850,874,449	181,766	10,850,692,683	98.88	123,387,317
01508015KD	KANWIL DJPb PROVINSI JAWA TIMUR							
451553	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II	1,876,656,000	1,707,580,000	1,698,948,482	3,000	1,698,945,482	99.49	8,634,518
527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	6,397,589,000	5,529,056,000	5,522,384,906	466,500	5,521,918,406	99.87	7,137,594
527425	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I	1,912,126,000	1,834,855,000	1,820,683,045	129,150	1,820,553,895	99.22	14,301,105
527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	3,299,008,000	3,051,457,000	2,992,890,291	834,767	2,992,055,524	98.05	59,401,476
527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	2,724,295,000	2,469,244,000	2,394,148,391	80,000	2,394,068,391	96.96	75,175,609
527450	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	2,981,760,000	2,869,371,000	2,846,861,855	0	2,846,861,855	99.22	22,509,145
527467	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO	2,456,414,000	2,216,487,000	2,208,045,651	0	2,208,045,651	99.62	8,441,349
527471	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN	2,427,779,000	2,154,049,000	2,140,108,475	0	2,140,108,475	99.35	13,940,525
527488	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO	1,875,499,000	1,699,086,000	1,610,090,682	402,000	1,609,688,682	94.74	89,397,318
527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	1,780,678,000	1,554,144,000	1,538,664,808	142,000	1,538,522,808	98.99	15,621,192
527500	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO	2,607,388,000	2,259,088,000	2,242,649,774	0	2,242,649,774	99.27	16,438,226
527514	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PACITAN	1,796,702,000	1,469,264,000	1,428,592,181	0	1,428,592,181	97.23	40,671,819
527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	2,186,192,000	2,093,246,000	2,087,692,830	121,240	2,087,571,590	99.73	5,674,410
634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	2,139,325,000	1,890,501,000	1,877,721,039	37,000	1,877,684,039	99.32	12,816,961
648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	2,233,753,000	2,011,948,000	1,954,967,245	80,000	1,954,887,245	97.16	57,060,755
648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	1,590,156,000	1,423,828,000	1,413,435,743	1,030,250	1,412,405,493	99.2	11,422,507
	JUMLAH BELANJA KANWIL DJPb PROVINSI JAWA TIMUR	40,285,320,000	36,233,204,000	35,777,885,398	3,325,907	35,774,559,491	98.74	458,644,509
01508016KD	KANWIL KALIMANTAN BARAT							
528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN	4,099,185,000	3,865,368,000	3,864,580,035	0	3,864,580,035	99.98	787,965
528061	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	2,080,743,000	2,016,169,000	1,986,448,945	78,000	1,986,370,945	98.52	29,798,055
528078	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINTANG	1,455,032,000	1,392,005,000	1,388,758,042	57,000	1,388,701,042	99.76	3,303,958
528082	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG	1,464,371,000	1,417,991,000	1,413,614,404	97,000	1,413,517,404	99.68	4,473,596
528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	1,838,038,000	1,754,258,000	1,746,754,456	0	1,746,754,456	99.57	7,503,544
528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	2,259,558,000	2,201,958,000	2,188,415,490	0	2,188,415,490	99.38	13,542,510
648893	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU	1,564,193,000	1,533,814,000	1,529,814,147	0	1,529,814,147	99.74	3,999,853
	JUMLAH BELANJA KANWIL KALIMANTAN BARAT	14,761,120,000	14,181,563,000	14,118,385,519	232,000	14,118,153,519	99.55	63,409,481
01508017KD	KANWIL KALIMANTAN TENGAH							
528125	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA	2,231,519,000	2,164,553,000	2,134,127,119	0	2,134,127,119	98.59	30,425,881
528146	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK	2,341,866,000	2,230,362,000	2,188,200,789	0	2,188,200,789	98.11	42,161,211
528150	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKALAN BUN	1,572,116,000	1,494,376,000	1,491,748,654	244,000	1,491,504,654	99.81	2,871,346
613764	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN	4,452,846,000	3,994,746,000	3,979,807,001	0	3,979,807,001	99.63	14,938,999

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/04/20 4:30 PM
Halaman : 6
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1a --

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
648868	TENGAH KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMPIT	3,346,690,000	2,960,488,000	2,920,378,462	0	2,920,378,462	98.65	40,109,538
	JUMLAH BELANJA KANWIL KALIMANTAN TENGAH	13,945,037,000	12,844,525,000	12,714,262,025	244,000	12,714,018,025	98.99	130,506,975
01508018KD 528171	KANWIL KALIMANTAN SELATAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	4,261,881,000	4,245,354,000	4,232,811,025	0	4,232,811,025	99.7	12,542,975
528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	2,635,830,000	2,547,892,000	2,483,351,261	255,000	2,483,096,261	97.46	64,795,739
528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	1,578,442,000	1,411,518,000	1,394,648,986	689,603	1,393,959,383	98.76	17,558,617
528200	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI	2,047,400,000	1,745,995,000	1,741,789,632	0	1,741,789,632	99.76	4,205,368
634963	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG	2,044,156,000	1,979,264,000	1,950,504,985	0	1,950,504,985	98.55	28,759,015
648872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PELEIHARI	1,428,161,000	1,494,825,000	1,472,151,698	0	1,472,151,698	98.48	22,673,302
	JUMLAH BELANJA KANWIL KALIMANTAN SELATAN	13,995,870,000	13,424,848,000	13,275,257,587	944,603	13,274,312,984	98.89	150,535,016
015080199K 409999	INSTANSI PUSAT BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	10,992,000,000,000	10,992,000,000,000	5,815,534,780,050	0	5,815,534,780,050	52.91	5,176,465,219,950
439165	KOMITE STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH (KSAP)	6,063,165,000	5,087,641,000	5,002,237,409	0	5,002,237,409	98.32	85,403,591
439171	SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA	42,325,713,000	43,180,593,000	42,654,273,956	0	42,654,273,956	98.78	526,319,044
527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	874,981,135,000	911,574,807,000	899,772,007,990	192,016,575	899,579,991,415	98.68	11,994,815,585
	JUMLAH BELANJA INSTANSI PUSAT	11,915,370,013,000	11,951,843,041,000	6,762,963,299,405	192,016,575	6,762,771,282,830	56.59	5,189,071,758,170
01508019KD 528221	KANWIL KALIMANTAN TIMUR KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	2,308,414,000	2,694,378,000	2,590,214,733	428,500	2,589,786,233	96.12	104,591,767
528242	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIKPAPAN	1,644,795,000	1,554,087,000	1,552,353,971	49,000	1,552,304,971	99.89	1,782,029
613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN	4,320,509,000	3,994,404,000	3,945,824,212	1,040,000	3,944,784,212	98.76	49,619,788
634984	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG	1,500,577,000	1,430,566,000	1,379,956,620	0	1,379,956,620	96.46	50,609,380
	JUMLAH BELANJA KANWIL KALIMANTAN TIMUR	9,774,295,000	9,673,435,000	9,468,349,536	1,517,500	9,466,832,036	97.88	206,602,964
01508020KD 528544	KANWIL BALI KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI	3,836,074,000	3,265,387,000	3,241,020,618	2,154,880	3,238,865,738	99.19	26,521,262
528551	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR	1,844,977,000	1,716,165,000	1,710,614,081	0	1,710,614,081	99.68	5,550,919
528565	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA	1,310,683,000	1,329,289,000	1,322,743,524	0	1,322,743,524	99.51	6,545,476
635045	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA	1,490,813,000	1,336,982,000	1,329,781,169	0	1,329,781,169	99.46	7,200,831
	JUMLAH BELANJA KANWIL BALI	8,482,547,000	7,647,823,000	7,604,159,392	2,154,880	7,602,004,512	99.43	45,818,488
01508021KD 528586	KANWIL NUSA TENGGARA BARAT KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM	3,901,567,000	3,755,894,000	3,714,876,764	9,500	3,714,867,264	98.91	41,026,736
528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	3,183,068,000	3,124,967,000	3,114,593,018	0	3,114,593,018	99.67	10,373,982
528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	1,464,279,000	1,300,927,000	1,263,050,056	0	1,263,050,056	97.09	37,876,944

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
 ESELON I : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 19/04/20 4:30 PM
 Halaman : 7
 Prg ID : lap_lra_bel_org_es1a --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
613785	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	5,635,526,000	5,284,366,000	5,237,752,838	18,969,089	5,218,783,749	98.76	65,582,251
648847	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SELONG	3,291,808,000	3,008,308,000	2,930,191,335	0	2,930,191,335	97.4	78,116,665
	JUMLAH BELANJA KANWIL NUSA TENGGARA BARAT	17,476,248,000	16,474,462,000	16,260,464,011	18,978,589	16,241,485,422	98.7	232,976,578
01508022KD	KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR							
528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	4,127,399,000	3,939,688,000	3,863,526,981	850,850	3,862,676,131	98.05	77,011,869
528633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG	2,221,529,000	2,070,875,000	2,060,642,711	1,290,000	2,059,352,711	99.44	11,522,289
528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE	1,621,606,000	1,543,642,000	1,517,469,069	0	1,517,469,069	98.3	26,172,931
528654	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WANGAPU	2,308,578,000	2,185,466,000	2,182,182,773	0	2,182,182,773	99.85	3,283,227
528661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG	1,528,069,000	1,488,882,000	1,443,380,962	0	1,443,380,962	96.94	45,501,038
652453	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA	1,534,215,000	1,430,712,000	1,425,212,972	0	1,425,212,972	99.62	5,499,028
662770	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LARANTUKA	1,436,594,000	1,411,708,000	1,403,655,320	0	1,403,655,320	99.43	8,052,680
	JUMLAH BELANJA KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR	14,777,990,000	14,070,973,000	13,896,070,788	2,140,850	13,893,929,938	98.76	177,043,062
01508023KD	KANWIL SULAWESI SELATAN							
451578	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II	1,834,400,000	1,723,653,000	1,723,533,863	0	1,723,533,863	99.99	119,137
497593	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINJAI	1,496,769,000	1,448,000,000	1,447,907,738	0	1,447,907,738	99.99	92,262
528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI	5,050,639,000	4,507,552,000	4,503,148,455	518,000	4,502,630,455	99.89	4,921,545
528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I	3,532,258,000	3,485,013,000	3,475,085,470	166,000	3,474,919,470	99.71	10,093,530
528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	2,178,439,000	2,113,165,000	2,054,401,498	0	2,054,401,498	97.22	58,763,502
528391	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANTA ENG	2,238,701,000	2,193,125,000	2,189,240,356	0	2,189,240,356	99.82	3,884,644
528409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO	2,019,650,000	1,984,071,000	1,970,087,777	35,000	1,970,052,777	99.29	14,018,223
528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	2,107,443,000	2,034,434,000	2,011,758,498	443,000	2,011,315,498	98.86	23,118,502
635120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENTENG	1,421,721,000	1,359,514,000	1,354,802,297	0	1,354,802,297	99.65	4,711,703
648851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKALE	1,446,885,000	1,348,922,000	1,342,486,321	0	1,342,486,321	99.52	6,435,679
	JUMLAH BELANJA KANWIL SULAWESI SELATAN	23,326,905,000	22,197,449,000	22,072,452,273	1,162,000	22,071,290,273	99.44	126,158,727
01508024KD	KANWIL SULAWESI TENGAH							
528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	7,784,931,000	7,331,317,000	7,304,622,670	663,053	7,303,959,617	99.63	27,357,383
528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK	1,813,855,000	1,662,511,000	1,651,982,158	0	1,651,982,158	99.37	10,528,842
528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO	1,943,544,000	1,730,952,000	1,715,602,250	0	1,715,602,250	99.11	15,349,750
528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	1,553,665,000	1,495,840,000	1,473,301,529	0	1,473,301,529	98.49	22,538,471
613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI	9,188,849,000	9,161,278,000	8,957,156,681	0	8,957,156,681	97.77	204,121,319
	JUMLAH BELANJA KANWIL SULAWESI TENGAH	22,284,844,000	21,381,898,000	21,102,665,288	663,053	21,102,002,235	98.69	279,895,765
01508025KD	KANWIL SULAWESI TENGGARA							
528441	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI	2,358,976,000	2,262,866,000	2,261,416,112	0	2,261,416,112	99.94	1,449,888

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/04/20 4:30 PM
Halaman : 8
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1a --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
528455	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU	2,290,923,000	1,821,501,000	1,819,639,617	0	1,819,639,617	99.9	1,861,383
613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI	4,112,694,000	4,083,394,000	4,080,956,190	3,822,000	4,077,134,190	99.85	6,259,810
635155	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA	1,800,936,000	1,741,458,000	1,734,301,761	0	1,734,301,761	99.59	7,156,239
635162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA	1,694,685,000	1,834,864,000	1,825,833,262	0	1,825,833,262	99.51	9,030,738
	JUMLAH BELANJA KANWIL SULAWESI TENGGARA	12,258,214,000	11,744,083,000	11,722,146,942	3,822,000	11,718,324,942	99.81	25,758,058
01508026KD	KANWIL GORONTALO							
497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	1,508,498,000	1,481,475,000	1,479,462,338	0	1,479,462,338	99.86	2,012,662
528281	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO	2,396,390,000	2,353,790,000	2,338,077,795	373,000	2,337,704,795	99.32	16,085,205
648741	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO	3,517,190,000	3,815,166,000	3,808,326,934	0	3,808,326,934	99.82	6,839,066
	JUMLAH BELANJA KANWIL GORONTALO	7,422,078,000	7,650,431,000	7,625,867,067	373,000	7,625,494,067	99.68	24,936,933
01508027KD	KANWIL SULAWESI UTARA							
497607	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG	1,708,101,000	1,600,000,000	1,584,165,621	0	1,584,165,621	99.01	15,834,379
528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	4,089,692,000	3,870,818,000	3,825,297,096	549,150	3,824,747,946	98.81	46,070,054
528277	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO	2,397,132,000	2,337,132,000	2,333,514,876	2,059,000	2,331,455,876	99.75	5,829,124
528298	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAHUNA	1,593,845,000	1,409,966,000	1,377,080,230	0	1,377,080,230	97.67	32,885,770
635197	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMUBAGU	1,578,192,000	1,523,530,000	1,479,265,279	0	1,479,265,279	97.09	44,264,721
	JUMLAH BELANJA KANWIL SULAWESI UTARA	11,366,962,000	10,741,599,000	10,599,323,102	2,608,150	10,596,714,952	98.68	144,884,048
01508028KD	KANWIL MALUKU UTARA							
452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	2,308,621,000	2,146,306,000	2,140,463,220	70,000	2,140,393,220	99.72	5,912,780
528497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	2,711,388,000	2,670,654,000	2,669,958,743	0	2,669,958,743	99.97	695,257
662787	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA	3,652,281,000	3,520,535,000	3,513,843,023	0	3,513,843,023	99.81	6,691,977
	JUMLAH BELANJA KANWIL MALUKU UTARA	8,672,290,000	8,337,495,000	8,324,264,986	70,000	8,324,194,986	99.84	13,300,014
01508029KD	KANWIL MALUKU							
528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	4,742,713,000	4,275,440,000	4,248,860,572	0	4,248,860,572	99.38	26,579,428
528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	2,281,065,000	2,135,425,000	2,108,329,615	146,000	2,108,183,615	98.72	27,241,385
528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	1,691,620,000	1,663,926,000	1,659,836,400	0	1,659,836,400	99.75	4,089,600
528519	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI	2,012,613,000	2,017,195,000	1,989,800,146	0	1,989,800,146	98.64	27,394,854
652460	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOHI	1,942,661,000	1,760,298,000	1,745,635,058	0	1,745,635,058	99.17	14,662,942
	JUMLAH BELANJA KANWIL MALUKU	12,670,672,000	11,852,284,000	11,752,461,791	146,000	11,752,315,791	99.16	99,968,209
01508030KD	KANWIL PAPUA							
528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	5,331,578,000	4,967,043,000	4,700,161,190	0	4,700,161,190	94.63	266,881,810
528696	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA	2,205,148,000	1,983,777,000	1,960,153,925	1,997,000	1,958,156,925	98.71	25,620,075
528701	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIAK	1,468,300,000	1,423,978,000	1,386,873,768	0	1,386,873,768	97.39	37,104,232
528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	2,470,821,000	2,437,755,000	2,304,823,573	0	2,304,823,573	94.55	132,931,427

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015 KEMENTERIAN KEUANGAN
ESELON I : 08 DITJEN PERBENDAHARAAN

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 19/04/20 4:30 PM
Halaman : 9
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1a --

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	2,083,505,000	1,905,694,000	1,905,308,632	654,000	1,904,654,632	99.95	1,039,368
528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	3,452,333,000	3,755,941,000	3,713,945,050	607,000	3,713,338,050	98.87	42,602,950
539049	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERUI	1,684,059,000	1,643,949,000	1,630,734,877	0	1,630,734,877	99.2	13,214,123
613832	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIMIKA	1,996,945,000	1,921,381,000	1,850,976,004	0	1,850,976,004	96.34	70,404,996
	JUMLAH BELANJA KANWIL PAPUA	20,692,689,000	20,039,518,000	19,452,977,019	3,258,000	19,449,719,019	97.07	589,798,981
01508031KD	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU							
325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	17,141,179,000	17,474,072,000	17,376,639,353	0	17,376,639,353	99.44	97,432,647
527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	2,652,326,000	2,425,764,000	2,416,408,647	900,000	2,415,508,647	99.58	10,255,353
539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	1,974,033,000	1,849,506,000	1,780,671,696	834,290	1,779,837,406	96.23	69,668,594
	JUMLAH BELANJA KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	21,767,538,000	21,749,342,000	21,573,719,696	1,734,290	21,571,985,406	99.19	177,356,594
01508032KD	KANWIL SULAWESI BARAT							
340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	4,815,759,000	4,673,325,000	4,672,489,070	0	4,672,489,070	99.98	835,930
451604	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU	1,577,208,000	1,572,504,000	1,570,442,470	0	1,570,442,470	99.87	2,061,530
528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	2,528,190,000	2,451,644,000	2,436,298,043	0	2,436,298,043	99.37	15,345,957
	JUMLAH BELANJA KANWIL SULAWESI BARAT	8,921,157,000	8,697,473,000	8,679,229,583	0	8,679,229,583	99.79	18,243,417
01508033KD	KANWIL PAPUA BARAT							
330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	3,550,583,000	4,496,067,000	4,388,186,162	4,707,300	4,383,478,862	97.5	112,588,138
528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	2,989,876,000	2,513,800,000	2,415,864,163	200,000	2,415,664,163	96.1	98,135,837
528722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG	2,393,707,000	2,086,595,000	1,996,473,438	0	1,996,473,438	95.68	90,121,562
528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	2,065,528,000	2,150,930,000	2,141,116,058	0	2,141,116,058	99.54	9,813,942
	JUMLAH BELANJA KANWIL PAPUA BARAT	10,999,694,000	11,247,392,000	10,941,639,821	4,907,300	10,936,732,521	97.28	310,659,479
015083500K	KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI							
528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN	1,882,765,000	1,882,682,000	1,880,475,694	0	1,880,475,694	99.88	2,206,306
634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	3,271,595,000	2,979,634,000	2,950,975,892	0	2,950,975,892	99.04	28,658,108
662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN	7,981,262,000	7,894,265,000	7,859,453,195	320,000	7,859,133,195	99.55	35,131,805
662789	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG	1,906,752,000	2,455,343,000	2,455,258,468	0	2,455,258,468	100	84,532
	JUMLAH BELANJA KANWIL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	15,042,374,000	15,211,924,000	15,146,163,249	320,000	15,145,843,249	99.57	66,080,751
-	Kode UAPPAW Tidak Ada							
440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	60,000,000,000	60,000,000,000	30,805,698,438	0	30,805,698,438	51.34	29,194,301,562
	JUMLAH BELANJA Kode UAPPAW Tidak Ada	60,000,000,000	60,000,000,000	30,805,698,438	0	30,805,698,438	51.34	29,194,301,562
	JUMLAH BELANJA 08	12,559,627,039,000	12,570,392,452,000	7,344,899,081,118	275,728,702	7,344,623,352,416	58.43	5225769099584
	JUMLAH BELANJA	12,559,627,039,000	12,570,392,452,000	7,344,899,081,118	275,728,702	7,344,623,352,416	58.43	5,225,769,099,584



Neraca Percobaan Basis kas dan Akrual

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 29/06/2020 9:54 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	42,101,262	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	22,744,478	0
0.0	111826	Kas Lainnya di BLU	14,559,631,289	0
0.0	111911	Kas dan Bank - BLU	52,229,461,958	0
0.0	111914	Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	0	0
0.0	111929	Setara kas Lainnya - BLU	16,525,000,000,000	0
0.0	113311	Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	437,918,493,104	0
0.0	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	2,106,502,251,493	0
0.0	114211	Uang Muka Belanja Pegawai (prepayment)	3,277,525,736	0
0.0	114311	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	47,922,875,270	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	37,987,258	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	818,193,945	0
0.0	115421	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	46,999,200	0
0.0	115614	Piutang dari Tambahan Uang Persediaan yang akan Diterima	0	0
0.0	115791	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	0	0
0.0	115891	Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Non Operasional	0	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNPB	0	11,051,203
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Lainnya	0	4,090,970
0.0	116421	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	0	234,996
0.0	116691	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU	0	0
0.0	116791	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	0	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	29,013,681,933	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	634,144,233	0
0.0	117131	Bahan Baku	0	0
0.0	117199	Persediaan Lainnya	0	0
0.0	117219	Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	0
0.0	117911	Persediaan yang Belum Diregister	0	0
0.0	121911	Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	3,152,741,173,643	0
0.0	131111	Tanah	9,348,390,606,016	0
0.0	131211	Tanah Belum Diregister	0	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	1,426,008,211,914	0
0.0	132211	Peralatan dan Mesin Belum Diregister	0	0
0.0	132311	Peralatan dan Mesin - BLU	0	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	1,847,424,921,893	0
0.0	133211	Gedung dan Bangunan Belum Diregister	0	0
0.0	134111	Jalan dan Jembatan	6,259,353,314	0
0.0	134112	Irigasi	3,608,607,942	0
0.0	134113	Jaringan	4,295,322,691	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	11,185,721,282	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 29/06/2020 9:54 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,219,473,719	0
0.0	135221	Aset Tetap Renovasi - BLU	0	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	6,867,365,359	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,113,832,076,073
0.0	137121	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin - BLU	0	0
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	230,548,538,642
0.0	137311	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	2,701,353,916
0.0	137312	Akumulasi Penyusutan Irigasi	0	351,178,339
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	2,003,816,504
0.0	137411	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	116,558,190
0.0	139111	Aset Tetap yang Belum Diregister	0	0
0.0	152111	Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	2,135,123,783	0
0.0	156311	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	2,070,448,783
0.0	162151	Software	352,803,938,183	0
0.0	162161	Lisensi	251,093,185,940	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	49,289,000	0
0.0	162211	Software-Badan Layanan Umum	0	0
0.0	165111	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	3,847,258,826,357	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	154,735,899,813	0
0.0	166113	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	221,396,800	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	152,232,666,483
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	321,713,672,140
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	80,110,352,071
0.0	169318	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	0	221,396,800
0.0	169411	Akumulasi Amortisasi Software-Badan Layanan Umum	0	0
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	85,895,000
0.0	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	0	263,084,344,673
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212121	Utang kepada Pihak Ketiga BLU	0	0
0.0	212144	Pengeluaran Transito yang Masih Harus Dibayar	0	0
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	9,307,117
0.0	212192	Dana Pihak Ketiga	0	14,559,631,289
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	0
0.0	218211	Hibah Langsung yang belum disahkan	0	0
0.0	219123	Utang Kelebihan pembayaran Pendapatan Non Pajak Lainnya	0	35,913,888
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	0	936,579,973
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	42,101,262
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	13,437,361
0.0	219964	Utang Pajak Bendahara BLU yang Belum Disetor	0	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 29/06/2020 9:54 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	221511	Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN	0	7,000,000,000,000
0.0	311312	Pengembalian Pendapatan BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	42,394,167,410	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	1,498,282,873,928
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	9,470,529,407	0
0.0	313211	Transfer Keluar	53,174,502,642	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	101,647,829,406
0.0	391111	Ekuitas	0	32,537,936,499,062
0.0	391113	Koreksi Nilai Persediaan	0	12,260,000
0.0	391114	Revaluasi Aset Tetap	0	125,412,211,799
0.0	391116	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	15,823,943,665
0.0	391119	Koreksi Lainnya	0	283,644,736,727
0.0	391131	Pengesahan Hibah Langsung	0	2,551,898,438
0.0	391151	Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	99,887,190	0
3.0	424136	Pendapatan Investasi	0	59,520,820,716
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	1,681,085,593,267
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,671,270,398
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	488,735,200
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	77,867,900
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,015,400,528
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	806,208,513
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	2,872,530,954
3.1	425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	738,918	0
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	175,726,667
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	650,393,041
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	278,019,903
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	234,736,295
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	133,769,090
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	6,001
3.0	491111	Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	0	120,664,274
3.0	491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	1,097,927,481
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	364,507,421,550	0
3.1	511111	Pengembalian Beban Gaji Pokok PNS	0	13,487,864
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	5,935,114	0
3.1	511119	Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS	0	1,226,190
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	25,530,136,162	0
3.1	511121	Pengembalian Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0	17,838,676
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	7,175,367,388	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 29/06/2020 9:54 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511122	Pengembalian Beban Tunj. Anak PNS	0	8,870,286
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	19,618,020,000	0
3.1	511123	Pengembalian Beban Tunj. Struktural PNS	0	12,395,600
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	334,550,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1,043,479,662	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	16,728,296,600	0
3.1	511126	Pengembalian Beban Tunj. Beras PNS	0	2,502,510
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	55,166,521,600	0
3.1	511129	Pengembalian Beban Uang Makan PNS	0	5,903,750
3.0	511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	63,350,000	0
3.1	511135	Pengembalian Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	0	150,000
3.0	511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	1,245,385,000	0
3.1	511138	Pengembalian Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	0	8,985,999
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	13,695,285,000	0
3.1	511151	Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS	0	14,325,000
3.0	512211	Beban Uang Lembur	37,516,197,750	0
3.1	512211	Pengembalian Beban Uang Lembur	0	12,259,050
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	99,587,692,354	0
3.1	521111	Pengembalian Beban Keperluan Perkantoran	0	5,332,590
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,355,043,736	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	29,186,871,000	0
3.1	521115	Pengembalian Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0	7,460,000
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	36,418,486,519	0
3.1	521119	Pengembalian Beban Barang Operasional Lainnya	0	7,762,164
3.0	521211	Beban Bahan	60,001,701,588	0
3.1	521211	Pengembalian Beban Bahan	0	370,000
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	9,325,300,000	0
3.1	521213	Pengembalian Beban Honor Output Kegiatan	0	20,765,000
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	3,027,092,800	0
3.1	521219	Pengembalian Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	3,687,500
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	34,126,983,208	0
3.1	522111	Pengembalian Beban Langganan Listrik	0	14,552,750
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	3,760,285,952	0
3.1	522112	Pengembalian Beban Langganan Telepon	0	5,034,990
3.0	522113	Beban Langganan Air	2,674,650,891	0
3.1	522113	Pengembalian Beban Langganan Air	0	1,433,940
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	196,307,198	0
3.1	522119	Pengembalian Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	8,999
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	544,835,500	0
3.0	522141	Beban Sewa	2,437,316,170	0

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 29/06/2020 9:54 AM
lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	3,244,128,900	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	17,043,479,340	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	50,954,978,491	0
3.1	523111	Pengembalian Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	858,707
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,485,907,749	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	88,108,431,265	0
3.1	523121	Pengembalian Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	1,849,053
3.0	523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	1,261,837,500	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	104,177,662,606	0
3.1	524111	Pengembalian Beban Perjalanan Biasa	0	53,527,199
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,387,790,433	0
3.1	524113	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,720,000
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	56,613,086,220	0
3.1	524114	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	34,669,350
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	19,781,500,976	0
3.1	524119	Pengembalian Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	17,477,300
3.0	524211	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	897,138,699	0
3.0	525111	Beban Gaji dan Tunjangan	63,819,528,555	0
3.0	525112	Beban Barang	7,896,414,269	0
3.0	525113	Beban Jasa	23,659,874,617	0
3.0	525114	Beban Pemeliharaan	1,424,419,334	0
3.0	525115	Beban Perjalanan	15,739,999,283	0
3.0	525117	Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	4,160,284,334,491	0
3.0	525119	Beban Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	6,224,700	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	109,922,140,749	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	90,602,492,705	0
3.0	591311	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	1,020,661,052	0
3.0	591312	Beban Penyusutan Irigasi	137,149,982	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	85,282,180	0
3.0	591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	12,605,125	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	47,462,233,896	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	24,020,900,666	0
3.0	592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	31,643,355	0
3.0	592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	630,101,048	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	26,262,357,870	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	1,108,485,614	0
3.0	593131	Beban Persediaan bahan baku	0	0
3.0	593149	Beban Persediaan Lainnya	0	0
3.0	593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	937,043,735	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang PNBP	0	184,986

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 08

DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 29/06/2020 9:54 AM

lap_neraca_percobaan_akrual_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	2,177,630	0
3.0	594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	0	60,000
3.0	594641	Beban Penyisihan Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	0	729,125
3.0	594791	Beban Penyisihan Piutang dari Kegiatan Non Operasional Lainnya BLU	0	377,974
3.0	594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	4,150,932
3.0	595112	Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	17,820,000	0
3.0	595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	14,975,000	0
3.0	596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	5,669,700,994	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	38,419,625	0
3.0	596211	Beban Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	6,750,639	0
JUMLAH			45,501,506,526,410	45,501,506,526,410

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2019

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 08

DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 29/06/2020 9:02 PM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115612	Piutang dari KPPN	5,225,769,098,992	0
0.0	116211	null	0	0
0.0	219711	Utang Kepada KUN	0	11,932,379,436,259
2.0	424136	Estimasi Pendapatan Investasi Yang Dialokasikan	53,169,511,600	0
2.0	424138	Estimasi Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit Yang Dialokasikan	13,298,000,000,000	0
2.0	424911	Estimasi Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU Yang Dialokasikan	319,754,267,400	0
2.0	425119	Estimasi Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya Yang Dialokasikan	8,350,000	0
2.0	425122	Estimasi Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Yang Dialokasikan	84,518,399	0
2.0	425129	Estimasi Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya Yang Dialokasikan	279,584,000	0
2.0	425131	Estimasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan Yang Dialokasikan	1,553,405,000	0
2.0	425791	Estimasi Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain. Yang Dialokasikan	172,166,667	0
2.0	425911	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu Yang Dialokasikan	145,800,000	0
2.0	425912	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu Yang Dialokasikan	66,000,000	0
2.0	425913	Estimasi Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu Yang Dialokasikan	50,000,000	0
2.0	425991	Estimasi Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji Yang Dialokasikan	3,200,000,000	0
2.0	425999	Estimasi Pendapatan Anggaran Lain-lain Yang Dialokasikan	1,350,000,000	0
2.0	511111	Allotment Belanja Gaji Pokok PNS	0	367,179,329,000
2.0	511119	Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	6,000,000
2.0	511121	Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	25,753,714,000
2.0	511122	Allotment Belanja Tunj. Anak PNS	0	7,220,881,000
2.0	511123	Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS	0	19,619,020,000
2.0	511124	Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	335,550,000
2.0	511125	Allotment Belanja Tunj. PPh PNS	0	1,045,000,000
2.0	511126	Allotment Belanja Tunj. Beras PNS	0	16,729,297,000
2.0	511129	Allotment Belanja Uang Makan PNS	0	55,914,614,000
2.0	511135	Allotment Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	0	64,350,000
2.0	511138	Allotment Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	1,246,385,000
2.0	511151	Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS	0	13,696,285,000
2.0	512211	Allotment Belanja Uang Lembur	0	38,258,920,000
2.0	521111	Allotment Belanja Keperluan Perkantoran	0	100,350,086,000
2.0	521114	Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	5,922,589,000
2.0	521115	Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	29,437,399,000
2.0	521119	Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya	0	37,182,327,000
2.0	521211	Allotment Belanja Bahan	0	62,679,887,000
2.0	521213	Allotment Belanja Honor Output Kegiatan	0	9,517,754,000
2.0	521219	Allotment Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	3,232,996,000
2.0	521811	Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	24,061,898,000
2.0	522111	Allotment Belanja Langganan Listrik	0	34,167,559,000

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2019

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 08

DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 29/06/2020 9:02 PM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
2.0	522112	Allotment Belanja Langganan Telepon	0	3,891,372,000
2.0	522113	Allotment Belanja Langganan Air	0	2,910,636,000
2.0	522119	Allotment Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	220,909,000
2.0	522131	Allotment Belanja Jasa Konsultan	0	553,705,000
2.0	522141	Allotment Belanja Sewa	0	2,504,949,000
2.0	522151	Allotment Belanja Jasa Profesi	0	3,415,001,000
2.0	522191	Allotment Belanja Jasa Lainnya	0	16,062,181,000
2.0	523111	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	51,267,322,000
2.0	523112	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	25,729,000
2.0	523119	Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	2,518,514,000
2.0	523121	Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	88,732,335,000
2.0	523123	Allotment Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	159,785,000
2.0	523199	Allotment Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	1,261,850,000
2.0	524111	Allotment Belanja Perjalanan Biasa	0	109,069,373,000
2.0	524113	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	8,262,041,000
2.0	524114	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	58,103,907,000
2.0	524119	Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	19,998,501,000
2.0	524211	Allotment Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0	1,176,454,000
2.0	525111	Allotment Belanja Gaji dan Tunjangan	0	106,633,654,000
2.0	525112	Allotment Belanja Barang	0	13,681,363,000
2.0	525113	Allotment Belanja Jasa	0	34,545,745,000
2.0	525114	Allotment Belanja Pemeliharaan	0	1,836,280,000
2.0	525115	Allotment Belanja Perjalanan	0	36,316,721,000
2.0	525117	Allotment Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	0	10,857,000,000,000
2.0	525119	Allotment Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	22,000,000
2.0	531111	Allotment Belanja Modal Tanah	0	1,384,889,000
2.0	532111	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	144,918,039,000
2.0	532121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	1,295,700,000
2.0	533111	Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	35,014,029,000
2.0	533121	Allotment Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	26,991,173,000
2.0	536111	Allotment Belanja Modal Lainnya	0	85,032,218,000
2.0	537112	Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	1,810,237,000
2.0	537115	Allotment Belanja Modal Lainnya - BLU	0	154,000,000
3.0	424136	Pendapatan Investasi	0	57,338,299,441
3.0	424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	1,676,067,877,018
3.1	424911	Pengembalian Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	308,219,178	0
3.0	424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	2,746,865,239
3.0	424919	Pendapatan Lain-lain BLU	0	138,814,288
3.0	425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	77,867,900
3.0	425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	0

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2019

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 08

DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 29/06/2020 9:02 PM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	1,015,400,528
3.0	425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	806,208,513
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	3,054,946,291
3.1	425131	Pengembalian Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	738,918	0
3.0	425219	Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	0
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	0
3.0	425699	Pendapatan Jasa Lainnya	0	0
3.0	425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	0
3.0	425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	203,817,599
3.0	425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	650,393,041
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	291,947,319
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	521,704,295
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	323,356,698
3.0	425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	2,527,763,270
3.1	425991	Pengembalian Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	2,143,130	0
3.0	425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	6,001
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	367,178,328,950	0
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	13,487,864
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	5,937,262	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	1,226,190
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	25,752,711,782	0
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	17,838,676
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	7,219,880,420	0
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	8,870,286
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	19,618,020,000	0
3.1	511123	Pengembalian Belanja Tunj. Struktural PNS	0	12,395,600
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	334,550,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	1,043,479,662	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	16,728,296,600	0
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	2,502,510
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	55,097,230,600	0
3.1	511129	Pengembalian Belanja Uang Makan PNS	0	5,903,750
3.0	511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	63,350,000	0
3.1	511135	Pengembalian Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	0	150,000
3.0	511138	Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	1,245,385,000	0
3.1	511138	Pengembalian Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS	0	8,985,999
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	13,695,285,000	0
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	14,325,000
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	37,516,197,750	0
3.1	512211	Pengembalian Belanja Uang Lembur	0	12,259,050

NERACA PERCOBAAN

TINGKAT ESELON I

PER DESEMBER 2019

(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015

KEMENTERIAN KEUANGAN

UNIT ORGANISASI : 08

DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 29/06/2020 9:02 PM

lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	99,628,562,782	0
3.1	521111	Pengembalian Belanja Keperluan Perkantoran	0	5,332,590
3.0	521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	5,383,647,194	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	29,186,871,000	0
3.1	521115	Pengembalian Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	7,460,000
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	36,418,198,194	0
3.1	521119	Pengembalian Belanja Barang Operasional Lainnya	0	7,762,164
3.0	521211	Belanja Bahan	60,001,616,588	0
3.1	521211	Pengembalian Belanja Bahan	0	370,000
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	9,325,300,000	0
3.1	521213	Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan	0	20,765,000
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,027,092,800	0
3.1	521219	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	3,687,500
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	23,968,605,600	0
3.1	521811	Pengembalian Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	1,274,235
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	33,854,631,581	0
3.1	522111	Pengembalian Belanja Langganan Listrik	0	14,552,750
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	3,734,077,492	0
3.1	522112	Pengembalian Belanja Langganan Telepon	0	5,034,990
3.0	522113	Belanja Langganan Air	2,660,587,707	0
3.1	522113	Pengembalian Belanja Langganan Air	0	1,433,940
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	195,663,691	0
3.1	522119	Pengembalian Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	8,999
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	544,835,500	0
3.0	522141	Belanja Sewa	2,078,659,503	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	3,244,128,900	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	15,990,030,627	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	51,003,768,516	0
3.1	523111	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	858,707
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25,206,500	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	2,484,460,949	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	87,994,342,630	0
3.1	523121	Pengembalian Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	1,849,053
3.0	523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	159,785,000	0
3.0	523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	1,261,837,500	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Biasa	104,179,336,406	0
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa	0	53,527,199
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	7,387,790,433	0
3.1	524113	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	1,720,000

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER DESEMBER 2019
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 015
UNIT ORGANISASI : 08

KEMENTERIAN KEUANGAN
DITJEN PERBENDAHARAAN

Tgl. Cetak 29/06/2020 9:02 PM
lap_neraca_percobaan_kas_es1 --rekon17

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	56,611,412,420	0
3.1	524114	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	34,669,350
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	19,781,500,976	0
3.1	524119	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	17,477,300
3.0	524211	Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	897,138,699	0
3.0	525111	Belanja Gaji dan Tunjangan	63,819,528,555	0
3.0	525112	Belanja Barang	8,609,007,069	0
3.0	525113	Belanja Jasa	20,934,160,706	0
3.0	525114	Belanja Pemeliharaan	1,424,419,334	0
3.0	525115	Belanja Perjalanan	15,739,999,283	0
3.0	525117	Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	5,734,385,403,341	0
3.0	525119	Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	6,224,700	0
3.0	531111	Belanja Modal Tanah	1,384,845,061	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	142,503,647,965	0
3.0	532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	1,285,994,920	0
3.0	533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34,953,213,713	0
3.0	533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	26,952,054,757	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	84,951,104,000	0
3.0	537112	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	1,370,915,500	0
3.0	537115	Belanja Modal Lainnya - BLU	50,820,000	0
3.0	594211	null	0	0
JUMLAH			26,248,812,884,402	26,248,812,884,402



Tindak Lanjut atas Temuan BPK

- **Matriks Tindak Lanjut atas Temuan BPK
TA 2012 – 2018**

TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TA.2012 TERKAIT SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Nomor Temuan	Temuan	Rekomendasi	Action Plan/Tindak lanjut	Status
1.3.6	Terdapat Aset pada Kementerian Keuangan yang dikuasai oleh Pihak Ketiga, Tidak Didukung Dokumen Sertifikat, dan Tidak Diketahui Keberadaannya DJPB berupa: Rumah Dinas Kanwil DJPB Provinsi Sulawesi Utara yang dikuasai oleh pihak lain sebanyak 11 unit Rumah Dinas Kanwil DJPB Provinsi Papua yang dikuasai oleh pihak lain sebanyak 17 unit	BPK merekomendasikan kepada Menkeu memerintahkan: Kuasa Pengguna Barang pada DJPB, DJBC, dan DJP menertibkan aset dikuasai pihak yang tidak berhak;	Jumlah rumah dinas yang masih dikuasai oleh pihak yang tidak berhak sebanyak 11 unit sesuai dengan surat Kepala Kanwil DJPBN Provinsi Sulawesi Utara Nomor S-308/WPB.29/BG.0103/2015 tanggal 30 Maret 2015. update 8 Februari 2018 : Rumah Dinas Kanwil DJPb prov Sulut yang masih dikuasai oleh pihak yang tidak berhak sebanyak 9 unit) update 17 Juli 2018 : Jumlah rumah dinas Kanwil DJPb Prov Sulut yang masih ditempati oleh pihak ketiga sebanyak 9 unit update 26 Juli 2018 : jumlah rumah dinas Kanwil DJPb Prov Sulut yang berhasil dibebaskan sebanyak 5 unit dari total 12 unit (laporan progress penertiban rumah dinas terlampir) update 10 Des 2018 :	

			jumlah rumah dinas Kanwil DJPb Prov Sulut yang berhasil dibebaskan sebanyak 6 unit dari total 12 unit (Berita Acara terlampir) Kanwil DJPb prov Sulut akan menyampaikan penolakan permohonan alih status rumah negara menjadi Gol III kepada para penghuni yang masih menempati rumdin (penyampaian S-3855J/PB.1/2018 tgl 30 April 2018) update 21 Des 2018 : Akan dilakukan konfirmasi atas status 17 rumdin di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Papua update 4 Januari 2019 : masih terdapat 16 unit rumdin kanwil DJPb Papua yang masih ditempati oleh yg tidak berhak. Kanwil DJPb Prov Papua akan melakukan koordinasi dengan KPKNL Jayapura untuk pengurusan sertifikasi tanah bangunan yang belum memiliki sertifikat	
--	--	--	--	--

TINDAK LANJUT TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN BPK TA.2013 TERKAIT KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nomor Temuan	Temuan	Rekomendasi	Action Plan/Tindak lanjut	Status
1.1.6	PNBP Dari Denda Keterlambatan Sebesar Rp556,81 Juta, Sewa atas Pemanfaatan BMN sebesar Rp21,87 Juta Belum Dipungut, dan Jaminan Pelaksanaan Sebesar Rp131,12 Juta Belum Dicairkan	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: b. memerintahkan PPK untuk segera memungut kekurangan penerimaan PNBP sebesar Rp473.471.097,00 (DJPb sebesar Rp 131.123.065) atas denda keterlambatan dan Rp131.123.065,00 atas jaminan pelaksanaan kepada pihak terkait dan menyetorkan ke Kas Negara; c. menginstruksikan kepada Dirjen Perbendaharaan untuk memerintahkan PPK memberikan sanksi dan memasukkan PT MSN ke dalam daftar hitam	DJPB KPPN Tangerang telah mengajukan permohonan pencairan jaminan kepada PT. Asuransi Mega Pratama sebanyak 4x (surat terakhir S-1360/WPB.11/KP.127/2014 tgl 23 Juli 2014), namun belum ada tanggapan dan Atas denda keterlambatan, telah dipotong dari tagihan PT. MSN sebesar Rp 3.256.193,00 dan sisa sebesar Rp 127.866.872,00 telah ditagihkan untuk segera disetor ke kas negara. Sampai dengan bulan Oktober 2014, belum ada tanggapan dari PT. Asuransi Mega Pratama. Pihak DJPb telah melakukan perhitungan sisa temuan beserta dokumen pendukung sebagai bahan pertimbangan untuk nilai temuan Untuk jaminan, jaminan pelaksanaan terakhir telah dicairkan. Apakah jaminan pelaksanaan sebelumnya (awal) harus	

dicairkan juga atau seperti apa

Pencairan jaminan pelaksanaan atas keterlambatan sebesar Rp 7.461.000 (sesuai jaminan terakhir. Besaran jaminan berbeda dengan BPK

Telah dilakukan pemutusan kontrak dan mengusulkan PT MSN dimasukkan ke dalam daftar hitam penyedia barang/jasa

Jaminan pelaksanaan telah dicairkan sebesar Rp 7.461.000,- (S-2381/WPb.11/KP.127/2014 tanggal 8 Des 2014). Total denda yang telah disetor sebesar Rp 7.461.000,- (Rp 3.256.193,- + Rp 4.204.807,-) dari jumlah denda yang harus dibayar sebesar Rp 131.123.065,-. Jumlah kekurangan denda yang belum dibayar sebesar Rp 123.662.065,-. Atas kekurangan tagihan tersebut KPPN Tangerang telah mengirimkan kembali surat penagihan kepada PT MSN untuk melakukan pelunasan sisa hutang dengan surat nomor S-422a/WPb.11/KP.127/2015 tanggal 20 Maret 2015 **(sisa hutang sebesar Rp 132.456.825,- terdiri dari kekurangan denda Rp 123.662.065,- dan uang sewa listrik Rp 8.794.760,-)**

update 17 Juli 2018 :

Akan dibahas internal BPK, feedback dari BPK akan disampaikan paling lambat minggu ke-4 bulan Juli 2018

Update 27 Juli 2018 :

Hasil pembahasan internal BPK : agar PPK tetap melakukan penagihan kepada pihak terkait. Jika tidak berhasil, sebagaimana peraturan yang berlaku diserahkan ke DJKN (PUPN), namun sebelumnya harus ditetapkan kerugiannya sebagai dasar pencatatan piutang

Update 11 Okt 2018 :

Akan dilakukan penagihan kepada pihak rekanan, setelah 3x penagihan akan dilanjutkan dengan pengalihan kepada DJKN (PUPN)

Update 14 Nov 2018 :

Telah dikirimkan surat penagihan pertama (S-1052/WPB.11/KP.02/2018 tgl 11 Okt 2018

Telah dikirimkan surat penagihan kedua (S-1182/WPB.11/KP.02/2018 tgl 12 Nov 2018

Update 21 Des 2018 :

			Sesuai risalah Rapat PTL dengan BPK, agar dilakukan penagihan ketiga untuk selanjutnya dilimpahkan ke DJKN. Setelah itu status diusulkan selesai. Update 20 Februari 2019 : Telah dilakukan penagihan ketiga dan dilanjutkan dengan penyerahan pengurusan piutang negara kepada KPKNL Tangerang sesuai surat Menteri Keuangan nomor S-55/MK.1/2019 tanggal 20 Februari 2019 Update	
1.2.1	Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Sebesar Rp3,59 Miliar dan Pembayaran Sebesar Rp1,22 Miliar Tidak Didukung Bukti Pembayaran DJPB berupa Kekurangan volume: - Renov ruang kerja KPPN Jakarta VI Rp 112,96 juta - Renov ruang kerja KPPN Jakarta VII Rp 123,24 juta Total yang harus disetor : Rp 236.205.643	memerintahkan PPK untuk menyetorkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan pada satker di lingkungan DJPU, DJPB, DJKN, Setjen, BPPK, DJPK, dan DJBC Kementerian Keuangan sebesar Rp2.343.880.960,08 (Rp417.339.978,91 + Rp1.362.269.736,00 + Rp52.406.245,17 + Rp161.865.000,00 + Rp350.000.000,00)	Kekurangan yang belum disetor : - Renov ruang kerja KPPN Jakarta VI Rp 112,96 juta - Renov ruang kerja KPPN Jakarta VII Rp 123,24 juta Kantor Pusat DJPBN telah mengirim surat ke pihak rekanan sebanyak 3x (S-977/PB.15/2014, S-1014/PB.15/2014, dan S-1786/PB.15/2014) dan telah ditanggapi oleh rekanan melalui surat no 25/SU/KR/VI/2014 tgl 26 Juni 2014 yang menyatakan bahwa pihak rekanan masih keberatan dengan nilai perhitungan dari BPK dan meminta	On Progress

perhitungan ulang. Atas tanggapan rekanan, kantor pusat DJPBN telah menyurati ke BPK untuk meminta petunjuk lebih lanjut (S-2402/PB.15/2014 tanggal 01 September 2014), dan terakhir dengan surat nomor S-1754/PB.15/2015 tanggal 18 Agustus 2015, namun belum mendapat jawaban dari BPK.

PT Kencana Rodho telah menyetorkan ke kas negara sebesar Rp75.000.000,- tanggal 23 September 2015

Update Tindak Lanjut (Januari 2017)

:

- 1. DJPB telah mengirimkan surat kepada rekanan dengan nomor S-2765/PB.15/2015 tanggal 25 Nov 2015 tentang Permintaan Penyetoran sisa temuan sebesar Rp 35.621.924,44**
- 2. DJPB mengirimkan surat kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Setjen Kemenkeu dengan nomor S-2779/PB.14/2015 tanggal 1 Des 2015 tentang Permohonan bantuan ke Rocankeu rencana pengukuran ulang agar daat didampingi Itjen**
- 3. DJPB mengirimkan surat kepada rekanan dengan nomor S-**

			993/PB.14/2016 tanggal 17 Mei 2016 tentang Permintaan penyetoran sisa temuan Update 04 Juli 2018 : 1. Telah dilakukan penyetoran sebesar Rp 35.621.924,- pada tanggal 18 Maret 2016 (bukti setor terlampir) 2. DJPB akan menyurati rekanan untuk meminta penyetoran sisa temuan sebanyak 3x, apabila tidak ada tanggapan akan dilimpahkan ke DJKN 3. Telah dikirimkan surat penagihan pertama dengan nomor S-1011/PB.14/2018 terkait Tindak Lanjut Hasil Audit BPK RI Th 2013 (terlampir) Update 17 Juli 2018 : Akan dilakukan pembahasan internal tim BPK, hasil akan disampaikan paling lambat minggu ke-IV bulan Juli 2018 Update 27 Juli 2018 : Hasil pembahasan internal BPK : agar PPK tetap melakukan penagihan kepada pihak terkait. Jika tidak berhasil, sebagaimana peraturan yang berlaku	
--	--	--	---	--

diserahkan ke DJKN (PUPN), namun sebelumnya harus ditetapkan kerugiannya sebagai dasar pencatatan piutang

Update 8 Agustus 2018 :

Telah dilakukan penagihan ke-2 kpd PT Kencana Rodo dgn surat S-2090/PB.14/2018 tgl 8 Agustus 2018

Update 18 Sept 2018 :

Telah dilakukan penagihan ke-3 kpd PT Kencana Rodo dgn surat S-2221/PB.14/2018 tgl 18 September 2018

Update 21 Des 2018 :

Sesuai risalah rapat PTL dengan BPK, agar dilakukan pelimpahan piutang ke DJKN, setelah itu diusulkan selesai.

Telah dilakukan penyetoran oleh PT. Kencono Rodho dengan rincian :

- Tanggal 17 Okt 2018 sebesar Rp 15.583.719
- Tanggal 30 Nov 2018 sebesar Rp 15.000.000
- Tanggal 21 Des 2018 sebesar Ro 15.000.000
- Tanggal 31 Jan 2019 sebesar Rp 15.000.000
- Tanggal 28 Feb 2019 sebesar Ro

			15.000.000	
			Jumlah kekurangan yang telah disetor sebesar Rp 186.205.643,- sehingga sisa kekurangan yang masih harus disetor sebesar Rp 50.000.000 (bukti setor terlampir) Update 26 Maret 2019 : PT. Kencono Rodo melakukan setoran sebesar Rp 15.000.000,- sehingga jumlah kekurangan yang belum disetor sebesar Rp 35.000.000,- (bukti terlampir) Update 2 Mei 2019 : PT. Kencono Rodo melakukan setoran sebesar Rp 15.000.000,- sehingga jumlah kekurangan yang belum disetor sebesar Rp 20.000.000,- (bukti terlampir) Update 27 Agustus 2019 : PT. Kencono Rodo melakukan setoran sebesar Rp 10.000.000,- sehingga jumlah kekurangan yang belum disetor sebesar Rp 10.000.000,- (bukti terlampir) Update 26 Sept 2019 : PT. Kencono Rodo melakukan setoran sebesar Rp 10.000.000,- sehingga tidak ada lagi kekurangan yang belum disetor sebesar (bukti terlampir)	

**MATRIKS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2015**

NOMOR TEMUAN	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI BPK	ACTION PLAN	STATUS
1.1.15	Pengelolaan Dana Sawit Tahun 2015 pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit Belum Memadai	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. Menginstruksikan kepada Direktur Utama BPDPKS untuk: 1) membuat aturan tentang tarif dan mekanisme pemungutan iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan;	Direktur Utama BPDPKS akan Menerbitkan Perdirut tentang tarif dan mekanisme pemungutan iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan a. Direktur Utama BPDPKS akan : 1) Menerbitkan Perdirut tentang tarif dan mekanisme pemungutan iuran dari Pelaku Usaha Perkebunan 2) Membuat aplikasi e-biling payment dan akan dilaunching tanggal 26 Mei 2016 oleh Menteri Keuangan Tindak Lanjut DJPB : 1) BPDPKS akan melakukan kajian terkait pemungutan iuran dengan pelaku usaha perkebunan Update Januari 2017 : BPDPKS telah membuat kajian tentang iuran dimaksud (terlampir) Update Des 2017 : Kajian telah dilakukan berupa tahap pendahuluan dan BPDPKS masih mengkoordinasikan dengan para pelaku usaha perkebunan kelapa sawit, belum sampai pada penyusunan aturan. Update Des 2019 : Telah dilakukan FGD terkait persiapan penyusunan kajian iuran bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit (notulen terlampir)	On Progress

NOMOR TEMUAN	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI BPK	ACTION PLAN	STATUS
		2) menetapkan mekanisme verifikasi terhadap: (a) nilai pungutan sawit yang menjamin kesesuaian nilai LS dengan realisasi ekspor sawit berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan (b) perhitungan tarif yang ditetapkan oleh PT Sucofindo;	Menerbitkan Perdirut tentang mekanisme verifikasi terhadap (a) nilai pungutan sawit yang menjamin kesesuaian nilai LS dengan realisasi ekspor sawit berdasarkan data DJBC dan (b) perhitungan tarif yang ditetapkan oleh PT Sucofindo Tindak Lanjut DJPB : 2) Akan dilampirkan Perdirut tentang mekanisme verifikasi terhadap (a) nilai pungutan sawit yang menjamin kesesuaian nilai LS dengan realisasi ekspor sawit berdasar data DJBC dan (b) perhitungan tarif yang ditetapkan oleh PT Sucofindo dan SOP terkait mekanisme tersebut Update Januari 2017 : BPDPKS telah membuat draft Perdirut tentang pungutan sawit dan saat ini masih dalam tahap review oleh Direktur Utama Update Des 2017 : Telah diterbitkan SOP terkait rekonsiliasi data pungutan ekspor (SOP-02/DPKS/2017)	Diusulkan Selesai
		3) menegur PT Sucofindo selaku verifikator pungutan dana sawit yang belum memadai dalam memverifikasi tarif dan kurs atas dana pungutan yang telah disetor Pelaku Usaha Perkebunan;	Menerbitkan surat teguran ke PT Sucofindo Tindak Lanjut DJPB : 3) BPDPKS telah membuat surat teguran kepada PT. Sucofindo yang belum memadai dalam memverifikasi tarif dan kurs atas dana pungutan yang telah disetor Pelaku Usaha Perkebunan (terlampir) (beserta jawaban dari PT Sucofindo) Update Januari 2017 : PT. Sucofindo telah melakukan penyetoran (bukti setor terlampir)	Diusulkan Selesai

NOMOR TEMUAN	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI BPK	<i>ACTION PLAN</i>	STATUS
			Update Des 2017 : BPDPKS telah membuat surat teguran kepada PT Sucofindo beserta surat jawaban dari PT Sucofindo	

NOMOR TEMUAN	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI BPK	ACTION PLAN	STATUS
		4) membuat kebijakan akuntansi yang mengatur tentang pencatatan restitusi pengembalian pungutan sawit; dan	Menerbitkan Perdirut tentang kebijakan akuntansi tentang pencatatan restitusi pengembalian pungutan sawit dan beban pembayaran selisih harga biodiesel untuk biodiesel yang telah disalurkan Tindak Lanjut DJPB : 4) a. Kebijakan akuntansi tentang pencatatan restitusi pengembalian pungutan sawit telah diatur dalam Perdirut nomor Per-06/DPKS/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Utama nomor Per-04/DPKS/2015 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Pungutan Dana Perkebunan atas Ekspor Kelapa Sawit, <i>Crude Palm Oil (CPO)</i> dan/atau Produk Turunannya, dan kebijakan akuntansi atas beban pembayaran selisih harga biodiesel untuk biodiesel yang telah disalurkan telah diatur dalam Perdirut nomor Per-03/DPKS/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Dana Pembiayaan Biodiesel Oleh BPDPKS b. sedang disusun <i>draft</i> Pedoman Akuntansi terkait kebijakan tersebut (berkoordinasi dengan Dit APK) Update Januari 2017 : Pedoman akuntansi telah disusun dan ditetapkan oleh Direktur Utama dengan nomor PER-16/DPKS/2016 tentang Sistem Akuntansi BPDPKS pada tanggal 29 Des 2016 (terlampir)	Diusulkan Selesai

NOMOR TEMUAN	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI BPK	ACTION PLAN	STATUS
		5) membuat mekanisme rekonsiliasi dalam rangka menyajikan informasi penting terkait kegiatan penyaluran dana.	Menerbitkan Perdirut tentang mekanisme rekonsiliasi dalam rangka menyajikan informasi penting terkait kegiatan penyaluran dana dan membuat aplikasi monitoring penyaluran seperti aplikasi biodiesel, riset dan lain-lain Tindak Lanjut DJPB : 5) Akan diadakan rapat koordinasi internal BDPKS membahas mekanisme rekonsiliasi dalam rangka menyajikan informasi penting terkait kegiatan penyaluran dana Update Januari 2017 : Pedoman rekonsiliasi telah disusun dan sedang dalam proses menunggu penetapan (terlampir) Update Des 2017 : Telah diterbitkan SOP terkait rekonsiliasi data pungutan ekspor (SOP-02/DPKS/2017)	Diusulkan Selesai

NOMOR TEMUAN	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI BPK	ACTION PLAN	STATUS
		b. Menginstruksikan Direktur Utama BPDPKS dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai untuk menetapkan mekanisme pertukaran data dalam rangka rekonsiliasi pembayaran pungutan ekspor dengan data pemberitahuan pabean ekspor; dan	Dirut Utama BPDPKS bersama Dirjen Bea dan Cukai akan menyusun KMK tentang pertukaran data antara BPDPKS antara Dirjen Bea dan Cukai 1) Menyusun KMK tentang pertukaran data antara BPDPKS dan DJBC Tindak Lanjut DJPB : b. BPDPKS Sedang menyusun MoU Antara BPDPKS dengan Ditjen Bea dan Cukai tentang mekanisme pertukaran data dalam rangka rekonsiliasi pembayaran pungutan ekspor dengan data pemberitahuan pabean ekspor Update Januari 2017 : Mekanisme tentang pertukaran data telah disusun dan draft MoU nya saat ini masih di Direktorat Keberatan dan Banding Bea dan Cukai (terlampir) Update Juli 2018 : Mou telah terbit (terlampir) Update 17 Juli 2018 : Diusulkan sesuai dengan rekomendasi	On Progress

NOMOR TEMUAN	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI BPK	ACTION PLAN	STATUS
		c. Mengatur secara tegas penggunaan surplus BPDPKS sebagai BLU sesuai ketentuan berlaku.	Pengaturan tentang penggunaan surplus 2015 telah ditetapkan oleh Komite Pengarah untuk digunakan untuk penyaluran tahun 2016. Tindak Lanjut : c. Terkait surplus/defisit BPDPKS, akan diatur lebih lanjut dalam pedoman akuntansi yang sedang disusun oleh BPDPKS Update Januari 2017 : Telah disusun Pedoman Akuntansi terkait surplus/defisit BPDPKS dan sedang dalam proses penetapan (terlampir) Update Des 2017 : Telah disusun KMK nomor 354/KMK.05/2017 tentang Penggunaan Surplus Anggaran yang berasal dari Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada BLU BPDPKS	Diusulkan Selesai
1.3.10	BMN Peralatan dan Mesin pada KP DJPB dan Kanwil DJP WP Besar Tidak Ditemukan	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar: a. Memerintahkan Dirjen Perbendaharaan untuk menyempurnakan SIMAK BMN dengan menambah fitur migrasi sensus serta menatausahakan dan mengelola aset secara tertib	DJPB: 1. Diupayakan untuk dilakukan penambahan fitur migrasi sensus pada aplikasi SIMAK BMN melalui tahapan : a. Kajian Pengembangan Aplikasi b. Penyusunan Proses Bisnis c. Pengembangan Aplikasi 2. KP DJPB akan melakukan inventarisasi kembali dan labelisasi aset peralatan dan mesin pada KP DJPB 3. Penertiban bukti-bukti transfer keluar BMN yang sudah diserahkan kepada instansi vertikal atau pihak lainnya Tindak Lanjut DJPB : 1. Penambahan fitur untuk migrasi sensus sudah di konsultasikan dengan Dit. SITP, pada Intinya dapat dilakukan namun harus ada kajian secara komprehensif mengingat pelaksanaan sensus tidak dilakuka rutin setiap tahun (minimal 5 tahun sekali),	

NOMOR TEMUAN	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI BPK	ACTION PLAN	STATUS
		b. Memerintahkan Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Pajak untuk menelusuri aset yang tidak ditemukan untuk menentukan ada tidaknya unsur TGR, serta melakukan pembinaan kepada Kuasa Pengguna barang, Penatausaha, dan pengelola aset di KP DJPB dan DJP yang belum optimal melaksanakan fungsinya.	DJP: Akan dilakukan penelusuran atas aset yang tidak ditemukan DJPB: Penelusuran aset hasil sensus BMN yang dikategorikan tidak ditemukan. Pelaksanaan penelusuran ini dilakukan dengan cara membentuk tim dengan melibatkan pegawai pada instansi terkait dan pengumpulan bukti-bukti barang di berbagai lokasi khususnya yang berada diluar kompleks Lapangan Banteng Tindak Lanjut : b. Langkah-langkah terkait Inventarisasi dan penertiban transfer keluar barang BMN : 1. Telah dilakukan permintaan kepada daerah terkait aset-aset yang sudah di kirim ke daerah, namun secara administratif masih berada dalam catatan SIMAK Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan. 2. Telah dilakukan rapat Koordinasi dengan pusintek, Biro Perlengkapan dan SITP untuk inventarisasi perangkat server yang masih digunakan maupun tidak digunakan; (notulen dilampirkan) 3. Penelusuran aset-aset yang keberadaanya tidak ada di kantor Pusat DJPB (lap. Banteng) seperti aset yang digunakan bekas satker GMRAP, Gedung TLC, dan gedung arsip (pada saat inventarisasi tim BPK, aset-aset tersebut tidak dihitung/dianggap tidak ditemukan); 4. Telah dilakukan inventarisasi barang-barang yang rusak berat dan dikumpulkan di gudang untuk selanjutnya dilakukan proses penghapusan. Hal ini	

NOMOR TEMUAN	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI BPK	ACTION PLAN	STATUS
			akan mendukung proses pengelolaan BMN secara tertib dan akuntabel. 5. Selanjutnya akan dilakukan inventarisasi kembali dan penelusuran aset-aset yang belum ditemukan termasuk pelaksanaan labeling; Update Juli 2018 : 1. Telah disampaikan screenshot aplikasi SIMAN tentang fitur Migrasi Sensus dan dokumen UR 2. Menunggu sensus tahun 2019 Telah dilakukan rapat pembahasan Antara lain : pembahasan inventarisasi server tgl 28-29 April 2018 (undangan dan notulen terlampir) Akan disampaikan data inventarisasi server Akan disampaikan data inventarisasi barang(excel) Akan disampaikan tim inventarisasi (SK) Update 17 Juli 2018 : a. Dokumen pendukung akan disampaikan kepada tim BPK (screenshot fitur migrasi pada aplikasi SIMAN) Akan dibahas internal tim BPK, hasil akan disampaikan paling lambat minggu ke-IV bulan Juli 2018 b. Menunggu hasil sensus th 2019 dan akan menyampaikan hasil pembinaan Update 27 Juli 2018 : Kantor Pusat DJPb agar : 1. Menyampaikan hasil inventarisasi atas aset yang tidak ditemukan (sesuai temuan pemeriksaan) 2. Menetapkan penanggungjawab aset-aset tersebut 3. Menentukan ada tidaknya unsur TGR, dan	

NOMOR TEMUAN	TEMUAN PEMERIKSAAN	REKOMENDASI BPK	ACTION PLAN	STATUS
			memprosesnya sebagaimana peraturan yang berlaku 4. Menyampaikan dokumen pendukung bahwa telah dilakukan pembinaan kepada Kuasa Pengguna Barangm Penatausaham dan Pengelola Aset di KP DJPb yang belum optimal melaksanakan fungsinya Update 11 Okt 2018 1. File excel hasil inventarisasi aset yang tidak ditemukan akan disampaikan oleh Pak Azis 2. Akan disampaikan dokumen hasil pembinaan berupa undangan, daftar hadir, dan notulensi oleh Pak Azis Update 21 Des 2018 : 1. Sesuai hasil risalah Rapat PTL dengan BPK, agar melengkapi dengan daftar hadir dan notulensi rapat 2. Agar DJPb melengkapi poin (1) (2) (3) merujuk pembahasan tanggal 27 Juli 2018 Update 4 Juli 2019 : Dokumen pendukung berupa daftar hadir dan notulensi kegiatan pembinaan akan disampaikan kepada tim BPK	

Matrik Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Sistem Pengendalian Internal Kementerian Keuangan Tahun 2018

Nomor Temuan	Temuan	Rekomendasi	Tanggapan	Status
1.2.1	Pengendalian Terhadap Penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) belum memadai sehingga saldo dana PPKS Pekebun yang mengundurkan diri dan pada rekening penampungan tidak jelas statusnya	BPK merekomendasikan kepada Menteri Keuangan agar memerintahkan Direktur Utama BDPKS untuk : a. Menetapkan pedoman mengenai mekanisme monitoring saldo dana dan bunga di rekening escrow, serta mekanisme pengunduran diri kelompok tani, dan jangka waktu penyelesaian kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit oleh pekebun b. Segera melakukan sosialisasi dan menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Peremajaan Sawit Rakyat BDPKS dalam rangka mendukung monitoring dan evaluasi dana PPKS c. Memperbaiki klausul perjanjian tiga pihak untuk memperjelas hak dan kewajiban serta sanksi para pihak terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dana PPKS d. Berkoordinasi dengan Direktorat APK DJPB untuk menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi terkait dengan dana PPKS	a. BDPKS akan membuat ketentuan mengenai mekanisme monitoring saldo dengan meminta laporan mutasi rekening kelompok pekebun dan/atau pekebun yang menjadi anggota pada pihak bank setiap saat diperlukan. BDPKS akan membuat ketentuan yang mengatur penatausahaan bunga pada saldo <i>escrow</i> (penampungan) sehingga bunga dan saldo dana peremajaan yang mengendap di rekening petani atau <i>escrow</i> pada Gapoktan/Koperasi dapat dimonitoring setiap saat-periode dan dilaporkan secara periodik. BDPKS bersama-sama dengan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan provinsi dan kabupaten/kota akan melakukan perbaikan SOP dan akan membuat ketentuan yang mengatur mengenai mekanisme pengunduran diri pekebun dan pengembalian dana dari kegiatan PPKS. BDPKS bersama-sama dengan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan provinsi dan kabupaten/kota akan	a. On Progress

			mengatur mengenai jangka waktu penyelesaian tahapan peremajaan perkebunan kelapa sawit oleh pekebun yang dibiayai oleh BPDPKS. Rapat 4 Juli 2019 : Pedoman mengenai mekanisme monitoring saldo dana dan bunga di rekening escrow serta mekanisme pengunduran diri kelompok tani, dan jangka waktu penyelesaian kegiatan peremajaan perkebunan kelapa sawit oleh pekebun telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama Update Desember 2019 : Telah diterbitkan peraturan direktur utama BPDPKS nomor per-7/DPKS/2019 tentang tata cara penyaluran dan penggunaan dana peremajaan perkebunan kelapa sawit b. BPDPKS bersama-sama dengan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan provinsi dan kabupaten/kota akan melaksanakan sosialisasi aplikasi Sistem Informasi Peremajaan Sawit Rakyat serta monitoring dan evaluasi penyaluran dana PPKS secara tepat, baik jumlah maupun waktu atas dana PSR.	b. Diusulkan Selesai
--	--	--	---	-----------------------------

			Rapat 4 Juli 2019 : Sosialisasi telah dilaksanakan dan dokumen pendukung telah disampaikan kepada tim BPK (undangan, daftar hadir, notulen, panduan aplikasi) c. BPDPKS bersama-sama dengan Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian dan Dinas Perkebunan Provinsi dan Kabupaten/Kota akan melakukan perbaikan klausul perjanjian tiga pihak untuk memperjelas hak dan kewajiban serta sanksi para pihak terkait dengan mekanisme pertanggungjawaban dana PPKS Rapat 4 Juli 2019 : Perbaikan klausul telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama dan akan disampaikan kepada Tim BPK d. BPDPKS akan berkoordinasi dengan Direktorat APK DJPB untuk menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi terkait dengan dana PPKS. Rapat 4 Juli 2019 : BPDPKS akan mengirim surat kepada Dit APK untuk menindaklanjuti rekomendasi dimaksud	c. On Progress d. On Progress
--	--	--	---	---

			Update Desember 2019 : Telah diadakan rapat pembahasan dengan Dit APK dan Setjen Kemenkeu membahas kebijakan akuntansi terkait dana PPKS (notulen dan daftar hadir terlampir)	
--	--	--	---	--



DAFTAR REKENING PEMERINTAH



Lampiran Pendukung Laporan Keuangan

- **Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas**
- **Rincian Belanja di Bayar di Muka**
- **Rincian per satker Piutang Bukan Pajak dan Penyisihan Piutang DNEP**
- **Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan**
- **Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga:**
 - ❖ **Belanja Pegawai yang masih harus dibayar**
 - ❖ **Belanja barang yang masih harus dibayar**
 - ❖ **Utang Kepada Pihak Ketiga lainnya**
- **Pendapatan diterima di muka**
- **Transfer masuk dan Keluar**

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 391151 Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	399,635
0.0	015.08.409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	(77,000)
0.0	015.08.527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	102,104,176
0.0	015.08.527872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI	(2,738,667)
0.0	015.08.528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1,266,250
0.0	015.08.528061	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	465,911
0.0	015.08.528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	(577,675)
0.0	015.08.528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	(485,760)
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	175,000
0.0	015.08.528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	(337,500)
0.0	015.08.528281	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO	(18,168,375)
0.0	015.08.528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK	406,800
0.0	015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	0
0.0	015.08.528544	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI	105,000
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	0
0.0	015.08.528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE	0
0.0	015.08.528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	(182,000)
0.0	015.08.528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	106,858
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	(501,076)
0.0	015.08.648762	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANGKO	83,384
0.0	015.08.648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	14,747,110

0.0	015.08.648893	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU	3,524,119
0.0	015.08.662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	(429,000)
TOTAL			99,887,190

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 111611 Kas di Bendahara Pengeluaran

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.015114	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	0
0.0	015.08.015115	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	0
0.0	015.08.015116	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN	0
0.0	015.08.015117	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI	0
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0
0.0	015.08.330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	0
0.0	015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0
0.0	015.08.439165	KOMITE STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH (KSAP)	0
0.0	015.08.439171	SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA	0
0.0	015.08.445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	0
0.0	015.08.451531	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG II	0
0.0	015.08.451547	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II	0
0.0	015.08.451553	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II	0
0.0	015.08.451562	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II	0
0.0	015.08.451578	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II	0
0.0	015.08.451604	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU	0
0.0	015.08.452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	0
0.0	015.08.497587	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES	0
0.0	015.08.497593	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINJAI	0
0.0	015.08.497607	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG	0
0.0	015.08.497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	0

0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	0
0.0	015.08.527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	0
0.0	015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	0
0.0	015.08.527048	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II	0
0.0	015.08.527052	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA III	0
0.0	015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	0
0.0	015.08.527102	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I	0
0.0	015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	0
0.0	015.08.527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	0
0.0	015.08.527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	0
0.0	015.08.527158	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA	0
0.0	015.08.527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	0
0.0	015.08.527183	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG	0
0.0	015.08.527205	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GARUT	0
0.0	015.08.527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	0
0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	0
0.0	015.08.527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	0
0.0	015.08.527289	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA	0
0.0	015.08.527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	0
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	0
0.0	015.08.527315	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKALONGAN	0
0.0	015.08.527322	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PATI	0
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	0
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	0
0.0	015.08.527357	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	0
0.0	015.08.527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	0
0.0	015.08.527399	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA	0

0.0	015.08.527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	0
0.0	015.08.527425	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I	0
0.0	015.08.527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	0
0.0	015.08.527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	0
0.0	015.08.527450	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	0
0.0	015.08.527467	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO	0
0.0	015.08.527471	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN	0
0.0	015.08.527488	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO	0
0.0	015.08.527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	0
0.0	015.08.527500	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO	0
0.0	015.08.527514	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PACITAN	0
0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	0
0.0	015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	0
0.0	015.08.527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	0
0.0	015.08.527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH	0
0.0	015.08.527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	0
0.0	015.08.527598	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN	0
0.0	015.08.527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK SEUMAWE	0
0.0	015.08.527610	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE	0
0.0	015.08.527624	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON	0
0.0	015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0
0.0	015.08.527652	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I	0
0.0	015.08.527666	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR	0
0.0	015.08.527670	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG SIDEMPUAN	0
0.0	015.08.527687	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI	0
0.0	015.08.527691	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG BALAI	0
0.0	015.08.527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	0

0.0	015.08.527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	0
0.0	015.08.527734	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDIKALANG	0
0.0	015.08.527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI	0
0.0	015.08.527755	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIGE	0
0.0	015.08.527776	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	0
0.0	015.08.527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	0
0.0	015.08.527802	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIJUNJUNG	0
0.0	015.08.527819	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK	0
0.0	015.08.527823	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK SIKAPING	0
0.0	015.08.527844	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU	0
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	0
0.0	015.08.527865	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT	0
0.0	015.08.527872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI	0
0.0	015.08.527890	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI	0
0.0	015.08.527908	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH	0
0.0	015.08.527912	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA BUNGO	0
0.0	015.08.527933	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0
0.0	015.08.527940	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG	0
0.0	015.08.527954	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG	0
0.0	015.08.527961	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU	0
0.0	015.08.527975	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA	0
0.0	015.08.527982	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PANDAN	0
0.0	015.08.528001	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	0
0.0	015.08.528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	0
0.0	015.08.528022	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABUMI	0
0.0	015.08.528036	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO LAMPUNG	0

0.0	015.08.528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	0
0.0	015.08.528061	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	0
0.0	015.08.528078	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINTANG	0
0.0	015.08.528082	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG	0
0.0	015.08.528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	0
0.0	015.08.528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	0
0.0	015.08.528125	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA	0
0.0	015.08.528146	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK	0
0.0	015.08.528150	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKALAN BUN	0
0.0	015.08.528171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0
0.0	015.08.528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	0
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	0
0.0	015.08.528200	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI	0
0.0	015.08.528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	0
0.0	015.08.528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN	0
0.0	015.08.528242	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIKPAPAN	0
0.0	015.08.528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0
0.0	015.08.528277	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO	0
0.0	015.08.528281	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO	0
0.0	015.08.528298	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAHUNA	0
0.0	015.08.528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	0
0.0	015.08.528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK	0
0.0	015.08.528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO	0
0.0	015.08.528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	0
0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0
0.0	015.08.528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I	0
0.0	015.08.528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	0

0.0	015.08.528391	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANTA ENG	0
0.0	015.08.528409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO	0
0.0	015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	0
0.0	015.08.528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	0
0.0	015.08.528441	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI	0
0.0	015.08.528455	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU	0
0.0	015.08.528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	0
0.0	015.08.528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	0
0.0	015.08.528497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	0
0.0	015.08.528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	0
0.0	015.08.528519	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI	0
0.0	015.08.528544	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI	0
0.0	015.08.528551	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR	0
0.0	015.08.528565	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA	0
0.0	015.08.528586	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM	0
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	0
0.0	015.08.528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	0
0.0	015.08.528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0
0.0	015.08.528633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG	0
0.0	015.08.528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE	0
0.0	015.08.528654	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAINGAPU	0
0.0	015.08.528661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG	0
0.0	015.08.528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	0
0.0	015.08.528696	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA	0
0.0	015.08.528701	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIAK	0
0.0	015.08.528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	0
0.0	015.08.528722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG	0

0.0	015.08.528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	0
0.0	015.08.528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	0
0.0	015.08.528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	0
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	0
0.0	015.08.528785	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU	0
0.0	015.08.528792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA	0
0.0	015.08.531293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV	0
0.0	015.08.539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	0
0.0	015.08.539049	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERUI	0
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	0
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	0
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	0
0.0	015.08.613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	0
0.0	015.08.613764	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0
0.0	015.08.613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0
0.0	015.08.613785	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0
0.0	015.08.613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0
0.0	015.08.613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0
0.0	015.08.613811	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	0
0.0	015.08.613832	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIMIKA	0
0.0	015.08.634256	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	0
0.0	015.08.634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	0
0.0	015.08.634277	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	0
0.0	015.08.634409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN	0
0.0	015.08.634497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUALA TUNGKAL	0
0.0	015.08.634530	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LAHAT	0
0.0	015.08.634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	0

0.0	015.08.634608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CURUP	0
0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	0
0.0	015.08.634661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN	0
0.0	015.08.634722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN	0
0.0	015.08.634792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI	0
0.0	015.08.634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	0
0.0	015.08.634963	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG	0
0.0	015.08.634984	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG REDEP	0
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	0
0.0	015.08.635045	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA	0
0.0	015.08.635120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENTENG	0
0.0	015.08.635155	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA	0
0.0	015.08.635162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA	0
0.0	015.08.635197	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMUBAGU	0
0.0	015.08.648741	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO	0
0.0	015.08.648762	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANGKO	0
0.0	015.08.648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	0
0.0	015.08.648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	0
0.0	015.08.648790	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMEDANG	0
0.0	015.08.648805	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN	0
0.0	015.08.648812	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI	0
0.0	015.08.648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	0
0.0	015.08.648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	0
0.0	015.08.648847	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SELONG	0
0.0	015.08.648851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKALE	0
0.0	015.08.648868	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMPIT	0
0.0	015.08.648872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PELEIHARI	0

0.0	015.08.648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	0
0.0	015.08.648893	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU	0
0.0	015.08.652449	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI	0
0.0	015.08.652453	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA	0
0.0	015.08.652460	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOHI	0
0.0	015.08.662770	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LARANTUKA	0
0.0	015.08.662787	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA	0
0.0	015.08.662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0
0.0	015.08.662789	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG SELOR	0
TOTAL			0

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 111821 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.015114	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	0
0.0	015.08.015115	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	0
0.0	015.08.015116	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN	0
0.0	015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0
0.0	015.08.439165	KOMITE STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH (KSAP)	0
0.0	015.08.439171	SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA	0
0.0	015.08.445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	0
0.0	015.08.451531	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG II	0
0.0	015.08.451547	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II	0
0.0	015.08.451553	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II	0
0.0	015.08.451604	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU	0
0.0	015.08.452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	0
0.0	015.08.497587	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES	0
0.0	015.08.497593	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINJAI	0
0.0	015.08.497607	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG	0
0.0	015.08.497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	0
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	0
0.0	015.08.527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	0
0.0	015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	0
0.0	015.08.527048	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II	0
0.0	015.08.527052	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA III	0

0.0	015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	0
0.0	015.08.527102	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I	0
0.0	015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	0
0.0	015.08.527158	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA	0
0.0	015.08.527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	0
0.0	015.08.527183	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG	0
0.0	015.08.527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	0
0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	1,213,200
0.0	015.08.527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	0
0.0	015.08.527289	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA	0
0.0	015.08.527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	0
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	0
0.0	015.08.527322	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PATI	0
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	0
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	0
0.0	015.08.527357	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	0
0.0	015.08.527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	0
0.0	015.08.527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	0
0.0	015.08.527425	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I	0
0.0	015.08.527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	0
0.0	015.08.527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	0
0.0	015.08.527450	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	0
0.0	015.08.527467	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO	0
0.0	015.08.527471	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN	0
0.0	015.08.527488	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO	0
0.0	015.08.527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	0
0.0	015.08.527514	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PACITAN	0

0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	0
0.0	015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	0
0.0	015.08.527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	0
0.0	015.08.527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH	0
0.0	015.08.527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	0
0.0	015.08.527598	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN	0
0.0	015.08.527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK SEUMAWÉ	0
0.0	015.08.527610	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE	0
0.0	015.08.527624	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON	0
0.0	015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0
0.0	015.08.527652	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I	0
0.0	015.08.527666	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR	0
0.0	015.08.527687	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI	0
0.0	015.08.527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	0
0.0	015.08.527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	0
0.0	015.08.527734	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDIKALANG	0
0.0	015.08.527776	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	0
0.0	015.08.527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	0
0.0	015.08.527802	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIJUNJUNG	0
0.0	015.08.527819	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK	0
0.0	015.08.527823	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK SIKAPING	0
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	0
0.0	015.08.527865	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT	0
0.0	015.08.527872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI	0
0.0	015.08.527890	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI	0
0.0	015.08.527908	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH	0

0.0	015.08.527912	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA BUNGO	0
0.0	015.08.527933	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0
0.0	015.08.527940	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG	0
0.0	015.08.527954	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG	0
0.0	015.08.527961	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU	0
0.0	015.08.527975	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA	0
0.0	015.08.527982	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PANDAN	0
0.0	015.08.528001	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	0
0.0	015.08.528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	0
0.0	015.08.528022	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABUMI	0
0.0	015.08.528036	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO LAMPUNG	0
0.0	015.08.528061	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	1,686,000
0.0	015.08.528082	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG	0
0.0	015.08.528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	0
0.0	015.08.528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	0
0.0	015.08.528146	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK	0
0.0	015.08.528150	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKALAN BUN	0
0.0	015.08.528171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	0
0.0	015.08.528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	0
0.0	015.08.528242	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIKPAPAN	0
0.0	015.08.528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0
0.0	015.08.528277	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO	0
0.0	015.08.528281	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO	0
0.0	015.08.528298	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAHUNA	0
0.0	015.08.528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	0
0.0	015.08.528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK	0

0.0	015.08.528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO	0
0.0	015.08.528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	0
0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0
0.0	015.08.528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	0
0.0	015.08.528409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO	0
0.0	015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	0
0.0	015.08.528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	0
0.0	015.08.528441	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI	0
0.0	015.08.528455	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU	0
0.0	015.08.528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	0
0.0	015.08.528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	0
0.0	015.08.528497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	0
0.0	015.08.528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	0
0.0	015.08.528519	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI	0
0.0	015.08.528544	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI	0
0.0	015.08.528551	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR	0
0.0	015.08.528565	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA	0
0.0	015.08.528586	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM	0
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	0
0.0	015.08.528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	0
0.0	015.08.528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0
0.0	015.08.528633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG	0
0.0	015.08.528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE	0
0.0	015.08.528661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG	0
0.0	015.08.528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	0
0.0	015.08.528696	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA	14,210,153
0.0	015.08.528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	0

0.0	015.08.528722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG	0
0.0	015.08.528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	0
0.0	015.08.528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	0
0.0	015.08.528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	0
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	0
0.0	015.08.528785	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU	0
0.0	015.08.528792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA	0
0.0	015.08.531293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV	0
0.0	015.08.539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	0
0.0	015.08.539049	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERUI	0
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	4,074,000
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	0
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	0
0.0	015.08.613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	0
0.0	015.08.613785	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0
0.0	015.08.613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0
0.0	015.08.613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0
0.0	015.08.613811	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	0
0.0	015.08.613832	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIMIKA	0
0.0	015.08.634256	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	0
0.0	015.08.634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	0
0.0	015.08.634277	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	0
0.0	015.08.634409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN	0
0.0	015.08.634497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUALA TUNGKAL	0
0.0	015.08.634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	0
0.0	015.08.634608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CURUP	0
0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	0

0.0	015.08.634661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN	0
0.0	015.08.634722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN	0
0.0	015.08.634792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI	0
0.0	015.08.634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	0
0.0	015.08.634984	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG REDEP	0
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	0
0.0	015.08.635045	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA	0
0.0	015.08.635120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENTENG	0
0.0	015.08.635155	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA	0
0.0	015.08.635162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA	0
0.0	015.08.635197	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMUBAGU	0
0.0	015.08.648741	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO	0
0.0	015.08.648762	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANGKO	0
0.0	015.08.648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	0
0.0	015.08.648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	0
0.0	015.08.648790	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMEDANG	0
0.0	015.08.648805	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN	0
0.0	015.08.648812	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI	0
0.0	015.08.648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	0
0.0	015.08.648847	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SELONG	0
0.0	015.08.648851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKALE	0
0.0	015.08.648868	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMPIT	0
0.0	015.08.648872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PELEIHARI	0
0.0	015.08.648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	0
0.0	015.08.648893	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU	0
0.0	015.08.652453	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA	0
0.0	015.08.652460	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOHI	0

0.0	015.08.662787	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA	0
0.0	015.08.662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	1,561,125
0.0	015.08.662789	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG SELOR	0
TOTAL			22,744,478

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 111911 Kas dan Bank - BLU

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	13,770,984,024
0.0	015.08.440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	38,458,477,934
TOTAL			52,229,461,958

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 111826 Kas Lainnya di BLU

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	14,559,631,289
0.0	015.08.440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	0
TOTAL			14,559,631,289

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 111929 Setara kas Lainnya - BLU

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	16,344,000,000,000
0.0	015.08.440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	181,000,000,000
TOTAL			16,525,000,000,000

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 115211 Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.451547	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II	74,000
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	26,368,412
0.0	015.08.527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	0
0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	37,000
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	0
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	0
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	0
0.0	015.08.528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	0
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	0
0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	10,915,846
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	0
0.0	015.08.648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	592,000
TOTAL			37,987,258

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 115212 Piutang Lainnya

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	818,193,945
TOTAL			818,193,945

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 116421 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	(174,996)
0.0	015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	(60,000)
0.0	015.08.528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	0
TOTAL			(234,996)

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 219211 Pendapatan Sewa Diterima Dimuka

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	(337,712,666)
0.0	015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	(95,284,000)
0.0	015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	0
0.0	015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	(3,060,000)
0.0	015.08.527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	(284,711,400)
0.0	015.08.527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	(25,000,000)
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	(7,350,750)
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	(35,635,500)
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	(38,507,750)
0.0	015.08.527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	(4,931,507)
0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	0
0.0	015.08.527687	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI	0
0.0	015.08.527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI	(12,704,000)
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	(2,895,000)
0.0	015.08.528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	(40,598,000)
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	(17,272,500)
0.0	015.08.528200	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI	(1,000,000)
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	0
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	(29,916,900)
TOTAL			(936,579,973)

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0
0.0	015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0
0.0	015.08.445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	0
0.0	015.08.451562	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II	0
0.0	015.08.452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	0
0.0	015.08.497607	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG	0
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	1,753,195,218
0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	0
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	0
0.0	015.08.527357	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	0
0.0	015.08.527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	0
0.0	015.08.527514	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PACITAN	0
0.0	015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	0
0.0	015.08.527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK SEUMAWE	0
0.0	015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0
0.0	015.08.527670	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG SIDEMPUN	0
0.0	015.08.527691	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG BALAI	0
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	0
0.0	015.08.527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	0
0.0	015.08.527844	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU	0
0.0	015.08.527961	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU	0

0.0	015.08.527982	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PANDAN	0
0.0	015.08.528022	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABUMI	0
0.0	015.08.528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	0
0.0	015.08.528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	0
0.0	015.08.528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0
0.0	015.08.528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	5,049,088,795
0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	33,150,000
0.0	015.08.528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I	0
0.0	015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	0
0.0	015.08.528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	0
0.0	015.08.528586	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM	0
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	0
0.0	015.08.528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	31,931,346
0.0	015.08.528654	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAINGAPU	0
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	0
0.0	015.08.528792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA	0
0.0	015.08.613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	0
0.0	015.08.613785	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0
0.0	015.08.613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0
0.0	015.08.613811	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	0
0.0	015.08.634277	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	0
0.0	015.08.634530	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LAHAT	0
0.0	015.08.634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	0
0.0	015.08.634792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI	0
0.0	015.08.634963	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG	0
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	0
0.0	015.08.635155	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA	0

0.0	015.08.635162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA	0
0.0	015.08.648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	0
0.0	015.08.648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	0
0.0	015.08.648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	0
0.0	015.08.648847	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SELONG	0
0.0	015.08.648868	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMPIT	0
0.0	015.08.662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0
TOTAL			6,867,365,359

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 114112 Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	90,000,000
0.0	015.08.330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	0
0.0	015.08.409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	2,103,131,288,180
0.0	015.08.440781	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	2,851,002,000
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	0
0.0	015.08.527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	0
0.0	015.08.528146	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK	42,800,000
0.0	015.08.528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN	0
0.0	015.08.528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	91,800,000
0.0	015.08.528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	32,666,667
0.0	015.08.528497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	25,666,667
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	27,027,979
0.0	015.08.662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	210,000,000
TOTAL			2,106,502,251,493

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 115421 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	34,999,200
0.0	015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	12,000,000
0.0	015.08.528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	0
TOTAL			46,999,200

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.451553	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II	0
0.0	015.08.452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	0
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	0
0.0	015.08.527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	0
0.0	015.08.527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	0
0.0	015.08.527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	0
0.0	015.08.527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	0
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	0
0.0	015.08.527315	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKALONGAN	(23,231,000)
0.0	015.08.527322	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PATI	0
0.0	015.08.527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	0
0.0	015.08.527425	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I	0
0.0	015.08.527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	0
0.0	015.08.527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	0
0.0	015.08.527450	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	0
0.0	015.08.527467	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO	0
0.0	015.08.527471	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN	0
0.0	015.08.527488	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO	(18,046,000)
0.0	015.08.527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	0
0.0	015.08.527500	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO	0
0.0	015.08.527514	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PACITAN	0

0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	0
0.0	015.08.527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	0
0.0	015.08.527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH	0
0.0	015.08.527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	0
0.0	015.08.527610	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE	0
0.0	015.08.527624	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON	0
0.0	015.08.527652	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I	0
0.0	015.08.527691	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG BALAI	0
0.0	015.08.527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	0
0.0	015.08.527755	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIGE	0
0.0	015.08.527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	0
0.0	015.08.527823	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK SIKAPING	0
0.0	015.08.527890	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI	0
0.0	015.08.527912	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA BUNGO	(6,443,000)
0.0	015.08.527940	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG	0
0.0	015.08.528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	(1,292,000)
0.0	015.08.528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	(20,215,000)
0.0	015.08.528061	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	(8,597,000)
0.0	015.08.528125	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA	0
0.0	015.08.528171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0
0.0	015.08.528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN	0
0.0	015.08.528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK	(2,695,000)
0.0	015.08.528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	0
0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	(3,252,000)
0.0	015.08.528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I	(2,124,000)
0.0	015.08.528409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO	0
0.0	015.08.528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	0

0.0	015.08.528441	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI	0
0.0	015.08.528551	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR	0
0.0	015.08.528586	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM	0
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	0
0.0	015.08.528633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG	0
0.0	015.08.528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	0
0.0	015.08.531293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV	0
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	0
0.0	015.08.613764	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0
0.0	015.08.613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	0
0.0	015.08.613785	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0
0.0	015.08.613811	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	0
0.0	015.08.613832	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIMIKA	0
0.0	015.08.634256	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	0
0.0	015.08.634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	0
0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	0
0.0	015.08.634661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN	0
0.0	015.08.634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	0
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	0
0.0	015.08.635155	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA	0
0.0	015.08.635162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA	0
0.0	015.08.648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	0
0.0	015.08.648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	0
0.0	015.08.648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	0
0.0	015.08.648847	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SELONG	0
0.0	015.08.648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	0
0.0	015.08.662770	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LARANTUKA	0

0.0	015.08.662789	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG SELOR	0
TOTAL			(85,895,000)

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.015114	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	0
0.0	015.08.015115	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	0
0.0	015.08.015116	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN	0
0.0	015.08.015117	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS INVESTASI	0
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	0
0.0	015.08.330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	0
0.0	015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	(1,588,776)
0.0	015.08.409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	(592,050,888,131)
0.0	015.08.439165	KOMITE STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH (KSAP)	0
0.0	015.08.439171	SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA	(931,183)
0.0	015.08.445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	0
0.0	015.08.451531	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG II	(17,785,801)
0.0	015.08.451547	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II	(330,555)
0.0	015.08.451553	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II	(360,000)
0.0	015.08.451562	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN II	0
0.0	015.08.451578	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASSAR II	(2,835,612)
0.0	015.08.451604	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU	(4,211,014)
0.0	015.08.452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	(9,769,380)
0.0	015.08.497587	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES	(114,000)
0.0	015.08.497593	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINJAI	(12,019,706)
0.0	015.08.497607	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG	(139,000)

0.0	015.08.497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	0
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	0
0.0	015.08.527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	0
0.0	015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	0
0.0	015.08.527048	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II	0
0.0	015.08.527052	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA III	0
0.0	015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	(1,644,500)
0.0	015.08.527102	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I	(1,284,396)
0.0	015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	(12,619,347)
0.0	015.08.527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	(32,498,453)
0.0	015.08.527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	(128,000)
0.0	015.08.527158	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA	(13,052,154)
0.0	015.08.527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	(16,046,635)
0.0	015.08.527183	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG	(13,428,008)
0.0	015.08.527205	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GARUT	(1,618,400)
0.0	015.08.527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	(10,628,431)
0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	(2,355,755)
0.0	015.08.527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	(41,541,737)
0.0	015.08.527289	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA	(21,645,875)
0.0	015.08.527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	(16,777,640)
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	(17,476,472)
0.0	015.08.527315	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKALONGAN	(13,720,969)
0.0	015.08.527322	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PATI	(14,825,000)
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	(12,538,199)
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	(7,714,762)
0.0	015.08.527357	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	(15,752,286)
0.0	015.08.527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	(14,177,039)

0.0	015.08.527399	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA	0
0.0	015.08.527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	0
0.0	015.08.527425	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I	0
0.0	015.08.527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	0
0.0	015.08.527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	(18,624,926)
0.0	015.08.527450	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	(17,559,905)
0.0	015.08.527467	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO	(201,100)
0.0	015.08.527471	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN	(1,866,400)
0.0	015.08.527488	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO	(131,000)
0.0	015.08.527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	0
0.0	015.08.527500	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO	(10,797,447)
0.0	015.08.527514	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PACITAN	0
0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	0
0.0	015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	0
0.0	015.08.527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	0
0.0	015.08.527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH	0
0.0	015.08.527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	(870,150)
0.0	015.08.527598	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN	0
0.0	015.08.527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK SEUMAWE	0
0.0	015.08.527610	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE	0
0.0	015.08.527624	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON	0
0.0	015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0
0.0	015.08.527652	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I	0
0.0	015.08.527666	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR	(59,000)
0.0	015.08.527670	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG SIDEMPUAN	(11,629,504)
0.0	015.08.527687	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI	(12,348,067)
0.0	015.08.527691	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG BALAI	(12,184,846)

0.0	015.08.527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	0
0.0	015.08.527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	(11,518,842)
0.0	015.08.527734	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDIKALANG	(6,117,224)
0.0	015.08.527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI	0
0.0	015.08.527755	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIGE	0
0.0	015.08.527776	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	(2,748,400)
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	(1,078,280)
0.0	015.08.527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	(10,390,858)
0.0	015.08.527802	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIJUNJUNG	(8,569,348)
0.0	015.08.527819	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK	(9,417,964)
0.0	015.08.527823	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK SIKAPING	(2,500,000)
0.0	015.08.527844	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU	(14,311,980)
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	0
0.0	015.08.527865	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT	(9,544,415)
0.0	015.08.527872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI	(9,527,049)
0.0	015.08.527890	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI	(17,317,315)
0.0	015.08.527908	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH	(5,128,909)
0.0	015.08.527912	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA BUNGO	(9,811,772)
0.0	015.08.527933	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	(4,626,340)
0.0	015.08.527940	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALEMBANG	(4,073,169)
0.0	015.08.527954	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG	0
0.0	015.08.527961	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU	(11,108,229)
0.0	015.08.527975	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA	(13,263,741)
0.0	015.08.527982	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PANDAN	0
0.0	015.08.528001	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	(1,157,100)
0.0	015.08.528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	(12,500)
0.0	015.08.528022	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABUMI	0

0.0	015.08.528036	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO LAMPUNG	0
0.0	015.08.528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	(4,201,100)
0.0	015.08.528061	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	0
0.0	015.08.528078	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINTANG	0
0.0	015.08.528082	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG	(567,600)
0.0	015.08.528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	(573,580)
0.0	015.08.528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	(142,000)
0.0	015.08.528125	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA	0
0.0	015.08.528146	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK	0
0.0	015.08.528150	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKALAN BUN	0
0.0	015.08.528171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0
0.0	015.08.528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	0
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	0
0.0	015.08.528200	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI	(273,700)
0.0	015.08.528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	(12,307,978)
0.0	015.08.528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN	0
0.0	015.08.528242	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIKPAPAN	(1,726,980)
0.0	015.08.528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	(2,177,470)
0.0	015.08.528277	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO	0
0.0	015.08.528281	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO	0
0.0	015.08.528298	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAHUNA	(8,553,906)
0.0	015.08.528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	(20,175,323)
0.0	015.08.528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK	(8,134,572)
0.0	015.08.528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO	(11,724,280)
0.0	015.08.528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	(9,217,649)
0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	(2,409,338)
0.0	015.08.528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I	(12,365,244)

0.0	015.08.528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	(14,542,910)
0.0	015.08.528391	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANTA ENG	(14,353,986)
0.0	015.08.528409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO	(11,435,224)
0.0	015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	(14,676,932)
0.0	015.08.528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	(15,372,885)
0.0	015.08.528441	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI	0
0.0	015.08.528455	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU	(20,750)
0.0	015.08.528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	0
0.0	015.08.528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	0
0.0	015.08.528497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	(15,573,104)
0.0	015.08.528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	0
0.0	015.08.528519	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI	0
0.0	015.08.528544	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI	(1,498,722)
0.0	015.08.528551	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR	(1,197,253)
0.0	015.08.528565	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA	(1,111,921)
0.0	015.08.528586	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM	(21,059,578)
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	(13,610,237)
0.0	015.08.528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	(11,350,542)
0.0	015.08.528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0
0.0	015.08.528633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG	0
0.0	015.08.528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE	(12,502,839)
0.0	015.08.528654	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAINGAPU	0
0.0	015.08.528661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG	0
0.0	015.08.528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	0
0.0	015.08.528696	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA	0
0.0	015.08.528701	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIAK	(1,106,801)
0.0	015.08.528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	(4,186,842)

0.0	015.08.528722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG	(608,440)
0.0	015.08.528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	(3,559,000)
0.0	015.08.528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	0
0.0	015.08.528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	(898,570)
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	0
0.0	015.08.528785	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU	(79,184)
0.0	015.08.528792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA	(446,000)
0.0	015.08.531293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV	0
0.0	015.08.539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	0
0.0	015.08.539049	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERUI	(1,057,692)
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	0
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	(18,223,973)
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	(15,495,224)
0.0	015.08.613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	(1,044,500)
0.0	015.08.613764	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	0
0.0	015.08.613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	(19,379,750)
0.0	015.08.613785	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	(20,031,674)
0.0	015.08.613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0
0.0	015.08.613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	(17,510,261)
0.0	015.08.613811	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	0
0.0	015.08.613832	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIMIKA	0
0.0	015.08.634256	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	0
0.0	015.08.634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	(24,792,797)
0.0	015.08.634277	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	0
0.0	015.08.634409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN	(320,500)
0.0	015.08.634497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUALA TUNGKAL	(7,631,890)
0.0	015.08.634530	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LAHAT	(10,824,972)

0.0	015.08.634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	(17,490)
0.0	015.08.634608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CURUP	0
0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	(14,898,776)
0.0	015.08.634661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN	(6,523,279)
0.0	015.08.634722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN	(9,869,341)
0.0	015.08.634792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI	0
0.0	015.08.634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	(11,082,956)
0.0	015.08.634963	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG	(11,486,489)
0.0	015.08.634984	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG REDEP	(7,926,311)
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	0
0.0	015.08.635045	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA	(10,869,560)
0.0	015.08.635120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENTENG	(9,864,210)
0.0	015.08.635155	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA	0
0.0	015.08.635162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA	0
0.0	015.08.635197	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMUBAGU	0
0.0	015.08.648741	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO	0
0.0	015.08.648762	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANGKO	(8,638,649)
0.0	015.08.648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	(9,370,124)
0.0	015.08.648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	(8,725,435)
0.0	015.08.648790	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMEDANG	(11,340,823)
0.0	015.08.648805	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN	(11,435,741)
0.0	015.08.648812	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI	(11,913,690)
0.0	015.08.648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	(8,787,096)
0.0	015.08.648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	0
0.0	015.08.648847	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SELONG	(7,325,823)
0.0	015.08.648851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKALE	(7,763,445)
0.0	015.08.648868	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMPIT	(1,490,184)

0.0	015.08.648872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PELEIHARI	0
0.0	015.08.648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	(10,176,180)
0.0	015.08.648893	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU	0
0.0	015.08.652449	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI	0
0.0	015.08.652453	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA	0
0.0	015.08.652460	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOHI	0
0.0	015.08.662770	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LARANTUKA	(9,667,331)
0.0	015.08.662787	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA	(17,583,071)
0.0	015.08.662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0
0.0	015.08.662789	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG SELOR	0
TOTAL			(593,217,754,673)

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 212191 Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.015114	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VI	0
0.0	015.08.015115	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA VII	0
0.0	015.08.015116	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PENERIMAAN	0
0.0	015.08.330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	0
0.0	015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	0
0.0	015.08.439165	KOMITE STANDAR AKUNTASI PEMERINTAH (KSAP)	0
0.0	015.08.439171	SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA	0
0.0	015.08.445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	0
0.0	015.08.451531	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG II	0
0.0	015.08.451547	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG II	0
0.0	015.08.451553	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA II	0
0.0	015.08.451604	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU	0
0.0	015.08.452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	0
0.0	015.08.497607	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG	0
0.0	015.08.497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	0
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	0
0.0	015.08.527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	0
0.0	015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	0
0.0	015.08.527048	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA II	0
0.0	015.08.527052	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA III	0
0.0	015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	0

0.0	015.08.527102	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG I	0
0.0	015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	0
0.0	015.08.527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	0
0.0	015.08.527158	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA	0
0.0	015.08.527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	0
0.0	015.08.527183	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG	0
0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	(1,213,200)
0.0	015.08.527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	0
0.0	015.08.527289	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA	0
0.0	015.08.527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	0
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	0
0.0	015.08.527322	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PATI	0
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	0
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	0
0.0	015.08.527357	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	0
0.0	015.08.527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	0
0.0	015.08.527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	0
0.0	015.08.527425	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURABAYA I	0
0.0	015.08.527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	0
0.0	015.08.527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	0
0.0	015.08.527450	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	0
0.0	015.08.527467	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BONDOWOSO	0
0.0	015.08.527471	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN	0
0.0	015.08.527488	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO	0
0.0	015.08.527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	0
0.0	015.08.527514	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PACITAN	0
0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	0

0.0	015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	0
0.0	015.08.527560	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDA ACEH	0
0.0	015.08.527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH	0
0.0	015.08.527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	0
0.0	015.08.527598	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN	0
0.0	015.08.527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK SEUMAWÉ	0
0.0	015.08.527610	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE	0
0.0	015.08.527624	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON	0
0.0	015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	0
0.0	015.08.527652	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEDAN I	0
0.0	015.08.527670	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG SIDEMPUAN	0
0.0	015.08.527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	0
0.0	015.08.527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	0
0.0	015.08.527734	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDIKALANG	0
0.0	015.08.527776	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	0
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	0
0.0	015.08.527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	0
0.0	015.08.527802	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIJUNJUNG	0
0.0	015.08.527819	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK	0
0.0	015.08.527823	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK SIKAPING	0
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	0
0.0	015.08.527865	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT	0
0.0	015.08.527872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI	0
0.0	015.08.527890	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI	0
0.0	015.08.527908	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH	0
0.0	015.08.527912	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA BUNGO	0
0.0	015.08.527933	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	0

0.0	015.08.527954	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG	0
0.0	015.08.527975	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA	0
0.0	015.08.527982	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PANDAN	0
0.0	015.08.528001	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	0
0.0	015.08.528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	0
0.0	015.08.528022	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABUMI	0
0.0	015.08.528036	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO LAMPUNG	0
0.0	015.08.528061	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	0
0.0	015.08.528082	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG	0
0.0	015.08.528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	0
0.0	015.08.528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	0
0.0	015.08.528146	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK	0
0.0	015.08.528150	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKALAN BUN	0
0.0	015.08.528171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	0
0.0	015.08.528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	0
0.0	015.08.528242	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIKPAPAN	0
0.0	015.08.528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	0
0.0	015.08.528277	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO	0
0.0	015.08.528281	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO	0
0.0	015.08.528298	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAHUNA	0
0.0	015.08.528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	0
0.0	015.08.528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK	0
0.0	015.08.528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	0
0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	0
0.0	015.08.528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	0
0.0	015.08.528409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO	0

0.0	015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	0
0.0	015.08.528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	0
0.0	015.08.528441	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI	0
0.0	015.08.528455	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU	0
0.0	015.08.528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	0
0.0	015.08.528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	0
0.0	015.08.528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	0
0.0	015.08.528544	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI	0
0.0	015.08.528551	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DENPASAR	0
0.0	015.08.528565	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA	0
0.0	015.08.528586	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM	0
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	0
0.0	015.08.528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	0
0.0	015.08.528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	0
0.0	015.08.528633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUPANG	0
0.0	015.08.528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE	0
0.0	015.08.528661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG	0
0.0	015.08.528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	0
0.0	015.08.528696	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAYAPURA	(4,019,917)
0.0	015.08.528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	0
0.0	015.08.528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	0
0.0	015.08.528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	0
0.0	015.08.528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	0
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	0
0.0	015.08.528785	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU	0
0.0	015.08.528792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA	0
0.0	015.08.531293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA IV	0

0.0	015.08.539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	0
0.0	015.08.539049	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERUI	0
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	(4,074,000)
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	0
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	0
0.0	015.08.613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	0
0.0	015.08.613785	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	0
0.0	015.08.613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	0
0.0	015.08.613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	0
0.0	015.08.613811	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH	0
0.0	015.08.634256	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	0
0.0	015.08.634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	0
0.0	015.08.634277	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	0
0.0	015.08.634409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN	0
0.0	015.08.634497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUALA TUNGKAL	0
0.0	015.08.634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	0
0.0	015.08.634608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CURUP	0
0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	0
0.0	015.08.634661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN	0
0.0	015.08.634722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN	0
0.0	015.08.634792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI	0
0.0	015.08.634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	0
0.0	015.08.634984	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG REDEP	0
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	0
0.0	015.08.635045	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA	0
0.0	015.08.635120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENTENG	0
0.0	015.08.635155	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA	0

0.0	015.08.635162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA	0
0.0	015.08.635197	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMUBAGU	0
0.0	015.08.648741	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO	0
0.0	015.08.648762	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANGKO	0
0.0	015.08.648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	0
0.0	015.08.648790	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMEDANG	0
0.0	015.08.648805	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN	0
0.0	015.08.648812	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI	0
0.0	015.08.648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	0
0.0	015.08.648847	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SELONG	0
0.0	015.08.648851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKALE	0
0.0	015.08.648868	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMPIT	0
0.0	015.08.648872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PELEIHARI	0
0.0	015.08.648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	0
0.0	015.08.648893	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU	0
0.0	015.08.652453	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA	0
0.0	015.08.662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	0
0.0	015.08.662789	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG SELOR	0
TOTAL			(9,307,117)

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 212192 Dana Pihak Ketiga

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	(14,559,631,289)
TOTAL			(14,559,631,289)

DAFTAR SALDO AKRUAL
TINGKAT ESELON I
S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 391113 Koreksi Nilai Persediaan

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	(12,260,000)
TOTAL			(12,260,000)

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 391151 Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	399,635
0.0	015.08.409999	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT	(77,000)
0.0	015.08.527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	102,104,176
0.0	015.08.527872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI	(2,738,667)
0.0	015.08.528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	1,266,250
0.0	015.08.528061	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	465,911
0.0	015.08.528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	(577,675)
0.0	015.08.528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	(485,760)
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	175,000
0.0	015.08.528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	(337,500)
0.0	015.08.528281	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO	(18,168,375)
0.0	015.08.528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK	406,800
0.0	015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	0
0.0	015.08.528544	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI	105,000
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	0
0.0	015.08.528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE	0
0.0	015.08.528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	(182,000)
0.0	015.08.528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	106,858
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	(501,076)
0.0	015.08.648762	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANGKO	83,384
0.0	015.08.648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	14,747,110

0.0	015.08.648893	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU	3,524,119
0.0	015.08.662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	(429,000)
TOTAL			99,887,190

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 391114 Revaluasi Aset Tetap

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	(1,978,000)
0.0	015.08.445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	103,012,377
0.0	015.08.451531	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG II	256,894,000
0.0	015.08.451604	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU	103,892,000
0.0	015.08.452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	(19,808,469,000)
0.0	015.08.497587	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES	2,931,611,000
0.0	015.08.497593	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINJAI	452,627,000
0.0	015.08.497607	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG	(277,526,000)
0.0	015.08.497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	(29,022,000)
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	147,960,407,000
0.0	015.08.527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	(139,797,981,000)
0.0	015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	(61,949,677,000)
0.0	015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	(26,655,892,000)
0.0	015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	(145,371,600)
0.0	015.08.527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	(7,263,637,000)
0.0	015.08.527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	(777,394,000)
0.0	015.08.527158	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA	506,347,000
0.0	015.08.527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	2,291,726,000
0.0	015.08.527183	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG	(3,077,743,000)
0.0	015.08.527205	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GARUT	(170,739,000)
0.0	015.08.527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	(129,439,000)

0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	418,619,000
0.0	015.08.527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	97,553,000
0.0	015.08.527289	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA	(30,909,607,000)
0.0	015.08.527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	(2,342,298,000)
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	(2,069,247,000)
0.0	015.08.527315	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKALONGAN	109,350,000
0.0	015.08.527322	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PATI	(1,739,265,000)
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	(956,302,000)
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	1,287,885,000
0.0	015.08.527357	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	12,544,000
0.0	015.08.527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	(2,001,783,000)
0.0	015.08.527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	(3,226,757,000)
0.0	015.08.527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	(30,199,000)
0.0	015.08.527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	310,596,000
0.0	015.08.527450	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	447,570,000
0.0	015.08.527471	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN	(153,826,000)
0.0	015.08.527488	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO	333,734,000
0.0	015.08.527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	(136,826,000)
0.0	015.08.527500	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO	(2,832,751,000)
0.0	015.08.527514	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PACITAN	284,557,000
0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	1,729,486,000
0.0	015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	748,498,000
0.0	015.08.527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH	(1,242,112,000)
0.0	015.08.527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	(3,591,346,000)
0.0	015.08.527598	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN	(501,602,000)
0.0	015.08.527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK SEUMAWÉ	(266,841,000)
0.0	015.08.527610	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE	(2,135,279,000)

0.0	015.08.527624	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARATAKENGON	326,075,000
0.0	015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	(258,198,000)
0.0	015.08.527666	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR	(684,466,000)
0.0	015.08.527670	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG SIDEMPUAN	733,581,000
0.0	015.08.527687	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI	(507,246,000)
0.0	015.08.527691	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG BALAI	792,406,000
0.0	015.08.527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	89,274,000
0.0	015.08.527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	(807,597,000)
0.0	015.08.527734	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDIKALANG	205,783,000
0.0	015.08.527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI	282,225,000
0.0	015.08.527755	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIGE	1,125,170,000
0.0	015.08.527776	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	(273,030,000)
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	(639,149,000)
0.0	015.08.527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	(546,325,000)
0.0	015.08.527802	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIJUNJUNG	2,531,265,000
0.0	015.08.527819	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK	(483,772,000)
0.0	015.08.527823	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK SIKAPING	(15,717,000)
0.0	015.08.527844	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU	8,997,000
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	3,814,676,000
0.0	015.08.527865	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT	1,996,867,000
0.0	015.08.527872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI	(1,098,920,000)
0.0	015.08.527890	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI	2,755,328,000
0.0	015.08.527908	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH	(1,342,646,000)
0.0	015.08.527912	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA BUNGO	428,540,000
0.0	015.08.527933	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	86,164,408,000
0.0	015.08.527954	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG	(18,596,000)
0.0	015.08.527961	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU	(19,156,000)

0.0	015.08.527975	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA	(602,577,000)
0.0	015.08.527982	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PANDAN	310,937,000
0.0	015.08.528001	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	(526,333,000)
0.0	015.08.528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	(1,492,863,000)
0.0	015.08.528022	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABUMI	320,787,000
0.0	015.08.528036	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO LAMPUNG	(771,867,000)
0.0	015.08.528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	(1,114,701,000)
0.0	015.08.528061	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	207,347,000
0.0	015.08.528078	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINTANG	28,356,000
0.0	015.08.528082	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG	366,460,000
0.0	015.08.528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	314,756,000
0.0	015.08.528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	(252,882,442)
0.0	015.08.528125	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA	(2,311,897,000)
0.0	015.08.528146	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK	(465,284,000)
0.0	015.08.528150	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKALAN BUN	102,726,000
0.0	015.08.528171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	(1,558,225,000)
0.0	015.08.528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	(453,580,000)
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	(575,683,000)
0.0	015.08.528200	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI	(573,335,000)
0.0	015.08.528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN	1,182,569,000
0.0	015.08.528242	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIKPAPAN	899,291,000
0.0	015.08.528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	113,400,000
0.0	015.08.528277	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO	279,961,000
0.0	015.08.528281	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO	401,050,000
0.0	015.08.528298	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAHUNA	(254,979,000)
0.0	015.08.528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	1,389,049,000
0.0	015.08.528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK	528,299,000

0.0	015.08.528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO	60,142,000
0.0	015.08.528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	169,251,000
0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	(924,130,000)
0.0	015.08.528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I	(2,038,189,586)
0.0	015.08.528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	(715,681,000)
0.0	015.08.528391	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANTA ENG	(547,492,000)
0.0	015.08.528409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO	(1,229,022,000)
0.0	015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	(2,408,014,000)
0.0	015.08.528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	(1,876,567,000)
0.0	015.08.528441	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI	(111,464,000)
0.0	015.08.528455	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU	1,083,384,000
0.0	015.08.528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	52,094,780,000
0.0	015.08.528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	560,660,000
0.0	015.08.528497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	1,009,583,000
0.0	015.08.528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	2,221,373,000
0.0	015.08.528519	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI	503,232,000
0.0	015.08.528544	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI	(3,957,299,000)
0.0	015.08.528565	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA	35,475,105,000
0.0	015.08.528586	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM	(71,959,000)
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	15,826,000
0.0	015.08.528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	73,994,000
0.0	015.08.528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	918,437,000
0.0	015.08.528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE	(851,079,000)
0.0	015.08.528654	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAINGAPU	63,745,000
0.0	015.08.528661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG	99,765,000
0.0	015.08.528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	2,267,952,000
0.0	015.08.528701	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIAK	(357,570,000)

0.0	015.08.528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	(8,292,216,000)
0.0	015.08.528722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG	371,640,000
0.0	015.08.528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	321,805,000
0.0	015.08.528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	(734,619,000)
0.0	015.08.528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	(659,598,500)
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	(24,646,000)
0.0	015.08.528785	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU	(63,536,000)
0.0	015.08.528792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA	72,929,000
0.0	015.08.539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	2,888,276,000
0.0	015.08.539049	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERUI	(2,864,008,000)
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	(52,225,912,000)
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	(59,940,193,000)
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	(2,258,723,000)
0.0	015.08.613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	29,105,000
0.0	015.08.613764	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	(538,353,000)
0.0	015.08.613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	(3,255,648,000)
0.0	015.08.613785	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	(25,315,627,000)
0.0	015.08.613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	658,959,000
0.0	015.08.613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	(1,021,419,000)
0.0	015.08.613832	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIMIKA	(3,684,509,000)
0.0	015.08.634256	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	(725,741,000)
0.0	015.08.634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	21,185,590,000
0.0	015.08.634277	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	(12,997,326,000)
0.0	015.08.634409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN	335,326,000
0.0	015.08.634497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUALA TUNGKAL	34,873,000
0.0	015.08.634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	157,115,000
0.0	015.08.634608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CURUP	(86,987,000)

0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	(208,861,000)
0.0	015.08.634661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN	(597,919,000)
0.0	015.08.634722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN	(840,737,380)
0.0	015.08.634792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI	(6,523,065,000)
0.0	015.08.634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	1,182,495,000
0.0	015.08.634963	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG	24,920,000
0.0	015.08.634984	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG REDEP	(403,845,000)
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	916,452,775
0.0	015.08.635045	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA	(161,323,000)
0.0	015.08.635120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENTENG	1,010,505,000
0.0	015.08.635155	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA	(110,503,000)
0.0	015.08.635162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA	162,306,000
0.0	015.08.635197	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMUBAGU	(285,006,000)
0.0	015.08.648741	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO	1,091,980,000
0.0	015.08.648762	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANGKO	82,855,000
0.0	015.08.648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	1,299,325,000
0.0	015.08.648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	(260,978,000)
0.0	015.08.648790	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMEDANG	(128,416,000)
0.0	015.08.648805	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN	(141,669,000)
0.0	015.08.648812	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI	(450,784,000)
0.0	015.08.648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	(383,244,000)
0.0	015.08.648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	516,803,000
0.0	015.08.648847	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SELONG	(3,151,000)
0.0	015.08.648851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKALE	652,712,000
0.0	015.08.648868	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMPIT	451,348,557
0.0	015.08.648872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PELEIHARI	(388,072,000)
0.0	015.08.648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	(3,124,015,000)

0.0	015.08.648893	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU	27,993,000
0.0	015.08.652449	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI	16,387,665,000
0.0	015.08.652460	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOHI	(1,587,835,000)
0.0	015.08.662770	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LARANTUKA	(335,019,000)
0.0	015.08.662787	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA	(2,397,006,000)
TOTAL			(125,412,211,799)

DAFTAR SALDO AKRUAL

TINGKAT ESELON I

S.D 31 DESEMBER 2019

AKUN : 391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi

daftar_saldo_akrual_es1 --rekon17

TRN	KODE	NMSATKER	RPHREAL
0.0	015.08.325237	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	125,234,057
0.0	015.08.330171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA BARAT	(1,535,714)
0.0	015.08.340249	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI BARAT	(12,196,109)
0.0	015.08.445371	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUKO MUKO	(176,565,372)
0.0	015.08.451531	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDUNG II	(291,398,590)
0.0	015.08.451604	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAMUJU	(3,801,092)
0.0	015.08.452878	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOBELO	684,563,309
0.0	015.08.497587	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATES	(598,500,823)
0.0	015.08.497593	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINJAI	(14,963,389)
0.0	015.08.497607	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BITUNG	(715,917,415)
0.0	015.08.497622	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MARISA	1,390,096
0.0	015.08.527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	3,105,145,252
0.0	015.08.527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	5,839,714,889
0.0	015.08.527031	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA I	(130,317,367)
0.0	015.08.527094	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA BARAT	(5,162,445,517)
0.0	015.08.527120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CIREBON	(54,103,826)
0.0	015.08.527137	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR	526,408,399
0.0	015.08.527141	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TASIKMALAYA	81,699,113
0.0	015.08.527158	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWAKARTA	414,016,756
0.0	015.08.527162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERANG	(13,772,066)
0.0	015.08.527183	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KARAWANG	(16,199,548)

0.0	015.08.527205	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GARUT	(65,469,311)
0.0	015.08.527230	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUKABUMI	(10,236,260)
0.0	015.08.527268	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TENGAH	(29,299,669)
0.0	015.08.527272	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEMARANG I	(2,164,910)
0.0	015.08.527289	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SURAKARTA	(4,227,970)
0.0	015.08.527293	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOREJO	(23,675,952)
0.0	015.08.527301	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWOKERTO	(5,686,623)
0.0	015.08.527315	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKALONGAN	(9,888,716)
0.0	015.08.527322	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PATI	109,119,275
0.0	015.08.527336	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUDUS	32,573,663
0.0	015.08.527340	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAGELANG	(2,107,595,624)
0.0	015.08.527357	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEGAL	(437,583)
0.0	015.08.527361	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CILACAP	45,652,510
0.0	015.08.527411	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAWA TIMUR	719,363,734
0.0	015.08.527432	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MALANG	(136,234,532)
0.0	015.08.527446	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KEDIRI	(76,427,974)
0.0	015.08.527450	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN	(116,107,131)
0.0	015.08.527471	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAMEKASAN	25,130,742
0.0	015.08.527488	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOJONEGORO	(286,402,703)
0.0	015.08.527492	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANYUWANGI	16,876,016
0.0	015.08.527500	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MOJOKERTO	16,015,622
0.0	015.08.527514	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PACITAN	(50,900,306)
0.0	015.08.527521	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JEMBER	(90,008,020)
0.0	015.08.527556	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI ACEH	(25,093,170)
0.0	015.08.527577	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MEULABOH	17,736,961
0.0	015.08.527581	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LANGSA	928,318,105
0.0	015.08.527598	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAPAK TUAN	18,813,498

0.0	015.08.527603	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LHOK SEUMAWE	11,914,783
0.0	015.08.527610	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE	210,660,197
0.0	015.08.527624	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TAKENGON	(10,785,891)
0.0	015.08.527645	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA UTARA	(44,379,494)
0.0	015.08.527666	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEMATANG SIANTAR	122,620,808
0.0	015.08.527670	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG SIDEMPUAN	(120,652,699)
0.0	015.08.527687	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GUNUNG SITOLI	63,612,405
0.0	015.08.527691	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG BALAI	(74,990,220)
0.0	015.08.527709	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANTAU PRAPAT	(49,011,366)
0.0	015.08.527713	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIBOLGA	308,691,517
0.0	015.08.527734	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDIKALANG	(8,309,782)
0.0	015.08.527741	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TEBING TINGGI	(13,802,656)
0.0	015.08.527755	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIGE	(61,700,228)
0.0	015.08.527776	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA BARAT	3,523,653
0.0	015.08.527780	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PADANG	27,789,087
0.0	015.08.527797	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUKITTINGGI	(338,772,649)
0.0	015.08.527802	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIJUNJUNG	(109,890,651)
0.0	015.08.527819	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SOLOK	38,810,588
0.0	015.08.527823	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK SIKAPING	20,499,455
0.0	015.08.527844	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PEKANBARU	697,344
0.0	015.08.527851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PINANG	(360,319,122)
0.0	015.08.527865	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RENGAT	(62,761,053)
0.0	015.08.527872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA DUMAI	99,230,942
0.0	015.08.527890	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAMBI	(751,453,092)
0.0	015.08.527908	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUNGAI PENUH	49,305,031
0.0	015.08.527912	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MUARA BUNGO	(83,375,484)
0.0	015.08.527933	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SUMATERA SELATAN	(9,827,152)

0.0	015.08.527954	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKAL PINANG	819,144
0.0	015.08.527961	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUBUK LINGGAU	(8,181,837)
0.0	015.08.527975	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATURAJA	(51,010,555)
0.0	015.08.527982	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG PANDAN	(28,482,630)
0.0	015.08.528001	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI LAMPUNG	459,751,391
0.0	015.08.528015	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANDAR LAMPUNG	154,874,325
0.0	015.08.528022	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABUMI	(10,991,932)
0.0	015.08.528036	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA METRO LAMPUNG	52,250,171
0.0	015.08.528057	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	(267,750,911)
0.0	015.08.528061	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PONTIANAK	(7,580,821)
0.0	015.08.528078	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINTANG	(42,875,704)
0.0	015.08.528082	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KETAPANG	(23,464,775)
0.0	015.08.528099	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGKAWANG	79,731,297
0.0	015.08.528104	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PUTUSSIBAU	(101,920,153)
0.0	015.08.528125	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALANGKARAYA	(237,590,855)
0.0	015.08.528146	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BUNTOK	(123,444,972)
0.0	015.08.528150	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PANGKALAN BUN	3,351,381
0.0	015.08.528171	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	(138,193,211)
0.0	015.08.528188	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARMASIN	92,329,395
0.0	015.08.528192	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTABARU	(67,203,462)
0.0	015.08.528200	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BARABAI	30,149,123
0.0	015.08.528221	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMARINDA	143,000,010
0.0	015.08.528235	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TARAKAN	(507,171,173)
0.0	015.08.528242	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BALIKPAPAN	1,048,119
0.0	015.08.528260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI UTARA	6,100,922
0.0	015.08.528277	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANADO	(14,153,135)
0.0	015.08.528281	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA GORONTALO	(39,828,773)

0.0	015.08.528298	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARATAHUNA	(61,914,545)
0.0	015.08.528310	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALU	(55,777,326)
0.0	015.08.528324	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LUWUK	10,219,995
0.0	015.08.528331	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA POSO	(20,204,272)
0.0	015.08.528345	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TOLI TOLI	38,619,147
0.0	015.08.528366	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI SELATAN	273,007,940
0.0	015.08.528370	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKASAR I	154,052,915
0.0	015.08.528387	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PARE PARE	99,372,642
0.0	015.08.528391	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANTA ENG	94,586,451
0.0	015.08.528409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PALOPO	70,458,519
0.0	015.08.528413	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAJENE	282,538,461
0.0	015.08.528420	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WATAMPONE	256,672,634
0.0	015.08.528441	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI	9,307,946
0.0	015.08.528455	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU	(97,675,910)
0.0	015.08.528476	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU	(4,477,069,348)
0.0	015.08.528480	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMBON	(67,553,871)
0.0	015.08.528497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TERNATE	(38,221,722)
0.0	015.08.528502	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUAL	(131,286,758)
0.0	015.08.528519	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAUMLAKI	(187,228,464)
0.0	015.08.528544	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BALI	466,476,997
0.0	015.08.528565	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SINGARAJA	8,506,300
0.0	015.08.528586	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MATARAM	3,334,281
0.0	015.08.528590	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIMA	936,216
0.0	015.08.528608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMBAWA BESAR	(1,915,556)
0.0	015.08.528629	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR	(60,178,491)
0.0	015.08.528640	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ENDE	28,895,563
0.0	015.08.528654	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAINGAPU	(132,960,626)

0.0	015.08.528661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RUTENG	(4,411,244)
0.0	015.08.528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	(124,924,334)
0.0	015.08.528701	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BIAK	1,808,804,833
0.0	015.08.528718	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANOKWARI	(92,284,335)
0.0	015.08.528722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SORONG	3,298,825
0.0	015.08.528739	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA FAK FAK	157,491,322
0.0	015.08.528743	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MERAUKE	227,398,505
0.0	015.08.528750	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NABIRE	16,291,599
0.0	015.08.528764	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WAMENA	1,086,896
0.0	015.08.528785	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENGKULU	10,031,852
0.0	015.08.528792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MANNA	(36,402,972)
0.0	015.08.539032	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BATAM	16,376,992
0.0	015.08.539049	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SERUI	66,340,426
0.0	015.08.579330	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA JAKARTA V	(588,059,510)
0.0	015.08.613739	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI RIAU	141,115,749
0.0	015.08.613743	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI JAMBI	83,274,359
0.0	015.08.613750	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BENGKULU	29,330,624
0.0	015.08.613764	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	191,274,178
0.0	015.08.613771	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	138,918,962
0.0	015.08.613785	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT	166,852,839
0.0	015.08.613792	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA	(788,376,684)
0.0	015.08.613807	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGAH	310,440,754
0.0	015.08.613832	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIMIKA	148,311,795
0.0	015.08.634256	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANGKA BELITUNG	28,086,942
0.0	015.08.634260	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI BANTEN	204,831,985
0.0	015.08.634277	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	128,612,272
0.0	015.08.634409	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PAINAN	(22,635,789)

0.0	015.08.634497	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUALA TUNGKAL	(122,689,317)
0.0	015.08.634572	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LIWA	(9,765,965)
0.0	015.08.634608	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA CURUP	(4,359,900)
0.0	015.08.634633	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANGERANG	8,646,462
0.0	015.08.634661	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUNINGAN	16,600,377
0.0	015.08.634722	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KLATEN	28,550,772
0.0	015.08.634792	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA WONOSARI	(45,766,563)
0.0	015.08.634860	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BLITAR	(47,023,082)
0.0	015.08.634963	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG	(1,636,731)
0.0	015.08.634984	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TANJUNG REDEP	17,688,057
0.0	015.08.634991	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA NUNUKAN	(29,430,572)
0.0	015.08.635045	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA AMLAPURA	123,968,498
0.0	015.08.635120	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BENTENG	(16,430,640)
0.0	015.08.635155	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA	(216,945)
0.0	015.08.635162	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA	(4,718,551)
0.0	015.08.635197	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOTAMUBAGU	4,552,912
0.0	015.08.648741	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI GORONTALO	(43,906,231)
0.0	015.08.648762	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANGKO	10,209,956
0.0	015.08.648779	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SEKAYU	(45,725,959)
0.0	015.08.648783	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RANGKASBITUNG	(155,960,191)
0.0	015.08.648790	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SUMEDANG	(597,339,163)
0.0	015.08.648805	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SRAGEN	5,581,916
0.0	015.08.648812	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PURWODADI	13,593,342
0.0	015.08.648826	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BANJARNEGARA	3,515,118
0.0	015.08.648830	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SIDOARJO	(22,743,196)
0.0	015.08.648847	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SELONG	(2,282,043)
0.0	015.08.648851	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MAKALE	(12,915,640)

0.0	015.08.648868	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SAMPIT	(492,377,825)
0.0	015.08.648872	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA PELEIHARI	14,972,307
0.0	015.08.648889	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TUBAN	(30,261,977)
0.0	015.08.648893	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA SANGGAU	(24,782,790)
0.0	015.08.652449	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BEKASI	(13,755,813,670)
0.0	015.08.652453	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA ATAMBUA	(154,434,499)
0.0	015.08.652460	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MASOHI	63,805,938
0.0	015.08.662770	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA LARANTUKA	8,663,796
0.0	015.08.662787	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI MALUKU UTARA	103,129,010
TOTAL			(15,823,943,665)



Daftar Satuan Kerja Lingkup

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

DAFTAR SATUAN KERJA
LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Kode Satker	Kode Kanwil	Kewenangan	Uraian Satker
1	439165	-	KP	KSAP
2	439171	-	KP	SPAN
3	527010	-	KP	KP DJPBN
4	409999	-	KP	BPD P Kelapa Sawit
5	440781	-	KP	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH
6	527556	001	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI ACEH
7	527560	001	KD	KPPN BANDA ACEH
8	527577	001	KD	KPPN MEULABOH
9	527581	001	KD	KPPN LANGSA
10	527598	001	KD	KPPN TAPAK TUAN
11	527603	001	KD	KPPN LHOK SEUMAWE
12	527610	001	KD	KPPN KUTACANE
13	527624	001	KD	KPPN TAKENGON
14	451562	002	KD	KPPN MEDAN II
15	527645	002	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI SUMATERA UTARA
16	527652	002	KD	KPPN MEDAN I
17	527666	002	KD	KPPN PEMATANG SIANTAR
18	527670	002	KD	KPPN PADANG SIDEMPUAN
19	527687	002	KD	KPPN GUNUNG SITOLI
20	527691	002	KD	KPPN TANJUNG BALAI ASAHAN
21	527709	002	KD	KPPN RANTAU PRAPAT
22	527713	002	KD	KPPN SIBOLGA
23	527734	002	KD	KPPN SIDIKALANG
24	527741	002	KD	KPPN TEBING TINGGI
25	527755	002	KD	KPPN BALIGE
26	527776	003	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI SUMATERA BARAT
27	527780	003	KD	KPPN PADANG
28	527797	003	KD	KPPN BUKITTINGGI
29	527802	003	KD	KPPN SIJUNJUNG
30	527819	003	KD	KPPN SOLOK
31	527823	003	KD	KPPN LUBUK SIKAPING
32	634409	003	KD	KPPN PAINAN
33	527844	004	KD	KPPN PEKANBARU
34	527865	004	KD	KPPN RENGAT
35	527872	004	KD	KPPN DUMAI
36	613739	004	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI RIAU
37	527890	005	KD	KPPN JAMBI
38	527908	005	KD	KPPN SUNGAI PENUH
39	527912	005	KD	KPPN MUARA BUNGO
40	613743	005	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI JAMBI
41	634497	005	KD	KPPN KUALA TUNGKAL
42	648762	005	KD	KPPN BANGKO
43	527933	006	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI SUMATERA SELATAN
44	527940	006	KD	KPPN PALEMBANG
45	527961	006	KD	KPPN LUBUK LINGGAU
46	527975	006	KD	KPPN BATURAJA
47	634530	006	KD	KPPN LAHAT
48	648779	006	KD	KPPN SEKAYU
49	528001	007	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI LAMPUNG
50	528015	007	KD	KPPN BANDAR LAMPUNG
51	528022	007	KD	KPPN KOTABUMI
52	528036	007	KD	KPPN METRO LAMPUNG
53	634572	007	KD	KPPN LIWA
54	445371	008	KD	KPPN MUKO MUKO
55	528785	008	KD	KPPN BENGKULU
56	528792	008	KD	KPPN MANNA

No	Kode Satker	Kode Kanwil	Kewenangan	Uraian Satker
57	613750	008	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI BENGKULU
58	634608	008	KD	KPPN CURUP
59	527954	009	KD	KPPN PANGKAL PINANG
60	527982	009	KD	KPPN TANJUNG PANDAN
61	634256	009	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI BANGKA BELITUNG
62	527162	010	KD	KPPN SERANG
63	634260	010	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI BANTEN
64	634633	010	KD	KPPN TANGERANG
65	648783	010	KD	KPPN RANGKASBITUNG
66	527027	011	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI DKI JAKARTA
67	527031	011	KD	KPPN JAKARTA I
68	527048	011	KD	KPPN JAKARTA II
69	527052	011	KD	KPPN JAKARTA III
70	531293	011	KD	KPPN JAKARTA IV
71	579330	011	KD	KPPN JAKARTA V
72	015114	011	KD	KPPN JAKARTA VI
73	015115	011	KD	KPPN JAKARTA VII
74	015116	011	KD	KPPN KHUSUS PENERIMAAN
75	015117	011	KD	KPPN KHUSUS INVESTASI
76	613811	011	KD	KPPN JAKARTA KHUSUS PINJAMAN dan HIBAH
77	451531	012	KD	KPPN BANDUNG II
78	527094	012	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI JAWA BARAT
79	527102	012	KD	KPPN BANDUNG I
80	527120	012	KD	KPPN CIREBON
81	527137	012	KD	KPPN BOGOR
82	527141	012	KD	KPPN TASIKMALAYA
83	527158	012	KD	KPPN PURWAKARTA
84	527183	012	KD	KPPN KARAWANG
85	527205	012	KD	KPPN GARUT
86	527230	012	KD	KPPN SUKABUMI
87	634661	012	KD	KPPN KUNINGAN
88	648790	012	KD	KPPN SUMEDANG
89	652449	012	KD	KPPN BEKASI
90	451547	013	KD	KPPN SEMARANG II
91	527268	013	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI JAWA TENGAH
92	527272	013	KD	KPPN SEMARANG I
93	527289	013	KD	KPPN SURAKARTA
94	527293	013	KD	KPPN PURWOREJO
95	527301	013	KD	KPPN PURWOKERTO
96	527315	013	KD	KPPN PEKALONGAN
97	527322	013	KD	KPPN PATI
98	527336	013	KD	KPPN KUDUS
99	527340	013	KD	KPPN MAGELANG
100	527357	013	KD	KPPN TEGAL
101	527361	013	KD	KPPN CILACAP
102	634722	013	KD	KPPN KLATEN
103	648805	013	KD	KPPN SRAGEN
104	648812	013	KD	KPPN PURWODADI
105	648826	013	KD	KPPN BANJARNEGARA
106	497587	014	KD	KPPN WATES
107	527399	014	KD	KPPN YOGYAKARTA
108	634277	014	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI DI YOGYAKARTA
109	634792	014	KD	KPPN WONOSARI
110	451553	015	KD	KPPN SURABAYA II
111	527411	015	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI JAWA TIMUR
112	527425	015	KD	KPPN SURABAYA I
113	527432	015	KD	KPPN MALANG
114	527446	015	KD	KPPN KEDIRI
115	527450	015	KD	KPPN MADIUN
116	527467	015	KD	KPPN BONDOWOSO

No	Kode Satker	Kode Kanwil	Kewenangan	Uraian Satker
117	527471	015	KD	KPPN PAMEKASAN
118	527488	015	KD	KPPN BOJONEGORO
119	527492	015	KD	KPPN BANYUWANGI
120	527500	015	KD	KPPN MOJOKERTO
121	527514	015	KD	KPPN PACITAN
122	527521	015	KD	KPPN JEMBER
123	634860	015	KD	KPPN BLITAR
124	648830	015	KD	KPPN SIDOARJO
125	648889	015	KD	KPPN TUBAN
126	528057	016	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
127	528061	016	KD	KPPN PONTIANAK
128	528078	016	KD	KPPN SINTANG
129	528082	016	KD	KPPN KETAPANG
130	528099	016	KD	KPPN SINGKAWANG
131	528104	016	KD	KPPN PUTUSSIBAU
132	648893	016	KD	KPPN SANGGAU
133	528125	017	KD	KPPN PALANGKARAYA
134	528146	017	KD	KPPN BUNTOK
135	528150	017	KD	KPPN PANGKALAN BUN
136	613764	017	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
137	648868	017	KD	KPPN SAMPIT
138	528171	018	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
139	528188	018	KD	KPPN BANJARMASIN
140	528192	018	KD	KPPN KOTABARU
141	528200	018	KD	KPPN BARABAI
142	634963	018	KD	KPPN TANJUNG
143	648872	018	KD	KPPN PELEIHARI
144	528221	019	KD	KPPN SAMARINDA
145	528242	019	KD	KPPN BALIKPAPAN
146	613771	019	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
147	634984	019	KD	KPPN TANJUNG REDEP
148	528544	020	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI BALI
149	528551	020	KD	KPPN DENPASAR
150	528565	020	KD	KPPN SINGARAJA
151	635045	020	KD	KPPN AMLAPURA
152	528586	021	KD	KPPN MATARAM
153	528590	021	KD	KPPN BIMA
154	528608	021	KD	KPPN SUMBAWA BESAR
155	613785	021	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
156	648847	021	KD	KPPN SELONG
157	528629	022	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
158	528633	022	KD	KPPN KUPANG
159	528640	022	KD	KPPN ENDE
160	528654	022	KD	KPPN WAINGAPU
161	528661	022	KD	KPPN RUTENG
162	652453	022	KD	KPPN ATAMBUA
163	662770	022	KD	KPPN LARANTUKA
164	451578	023	KD	KPPN MAKASSAR II
165	497593	023	KD	KPPN SINJAI
166	528366	023	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI SULAWESI SELATAN
167	528370	023	KD	KPPN MAKASAR I
168	528387	023	KD	KPPN PARE PARE
169	528391	023	KD	KPPN BANTA ENG
170	528409	023	KD	KPPN PALOPO
171	528420	023	KD	KPPN WATAMPONE
172	635120	023	KD	KPPN BENTENG
173	648851	023	KD	KPPN MAKALE
174	528310	024	KD	KPPN PALU
175	528324	024	KD	KPPN LUWUK
176	528331	024	KD	KPPN POSO

No	Kode Satker	Kode Kanwil	Kewenangan	Uraian Satker
177	528345	024	KD	KPPN TOLI TOLI
178	613807	024	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI SULAWESI TENGAH
179	528441	025	KD	KPPN KENDARI
180	528455	025	KD	KPPN BAU BAU
181	613792	025	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI SULAWESI TENGGARA
182	635155	025	KD	KPPN RAHA
183	635162	025	KD	KPPN KOLAKA
184	497622	026	KD	KPPN MARISA
185	528281	026	KD	KPPN GORONTALO
186	648741	026	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI GORONTALO
187	497607	027	KD	KPPN BITUNG
188	528260	027	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI SULAWESI UTARA
189	528277	027	KD	KPPN MANADO
190	528298	027	KD	KPPN TAHUNA
191	635197	027	KD	KPPN KOTAMUBAGU
192	452878	028	KD	KPPN TOBELO
193	528497	028	KD	KPPN TERNATE
194	662787	028	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI MALUKU UTARA
195	528476	029	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI MALUKU
196	528480	029	KD	KPPN AMBON
197	528502	029	KD	KPPN TUAL
198	528519	029	KD	KPPN SAUMLAKI
199	652460	029	KD	KPPN MASOHI
200	528682	030	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI PAPUA
201	528696	030	KD	KPPN JAYAPURA
202	528701	030	KD	KPPN BIAK
203	528743	030	KD	KPPN MERAUKE
204	528750	030	KD	KPPN NABIRE
205	528764	030	KD	KPPN WAMENA
206	539049	030	KD	KPPN SERUI
207	613832	030	KD	KPPN TIMIKA
208	539032	031	KD	KPPN BATAM
209	325237	031	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI KEPUALAUAN RIAU
210	527851	031	KD	KPPN TANJUNG PINANG
211	340249	032	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI SULAWESI BARAT
212	451604	032	KD	KPPN MAMUJU
213	528413	032	KD	KPPN MAJENE
214	330171	033	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI IRIAN JAYA BARAT
215	528718	033	KD	KPPN MANOKWARI
216	528722	033	KD	KPPN SORONG
217	528739	033	KD	KPPN FAK FAK
218	662788	034	KD	KANWIL DJPBN PROVINSI KALIMANTAN UTARA
219	528235	034	KD	KPPN TARAKAN
220	634991	034	KD	KPPN NUNUKAN
221	662789	034	KD	KPPN TANJUNG SELOR



TELAAH LAPORAN KEUANGAN

**KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PERIODE 31 DESEMBER 2019 AUDITED**

Kode BA dan Nama K/L: **(01508) Direktorat Jenderal Perbendaharaan**

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>		
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>		
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN		
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (Hardcopy)	Ada	Tidak
1. Pernyataan telah di reviu oleh APIP	N/A	Ada
2. Pernyataan Tanggung Jawab	√	Ada
3. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	√	Ada
4. Catatan atas Laporan Keuangan	√	Ada
Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak
1. Neraca Percobaan Akrua	√	Ada
2. Neraca Percobaan Kas	√	Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	√	Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK		
	Sama	Tidak
1. Apakah semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2018?	√	Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>		
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI		
Neraca Balance	Ada	Tidak
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak Balance "		√
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE	√	Sama
3. Apakah Saldo " <i>Ekuitas Akhir</i> " di LPE = " <i>Saldo Ekuitas</i> " di Neraca	√	Sama
<i>Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi</i>		
NERACA PERCOBAAN AKRUAL		
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)		√
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun " <i>Beban Penyisihan Piutang</i> " dan " <i>Kas dan Bank BLU Belum Disahkan</i> "		√
TELAHAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN		
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak
Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan		
1. Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		√
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)		√

Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
2.	Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)		Ya	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Ya/Tidak
2.	Apakah Saldo Akun 218211 akhir tahun berkurang dibanding awal tahun?		√	Ya/Tidak
3.	Jika berkurang, apakah ada pengesahan Hibah Langsung TAYL (MPHL-BJS TAYL) ?		√	Ya
Akun 218211 hanya dapat berkurang jika ada pengesahan Hibah Langsung TAYL. Cek apakah ada pengurangan dengan Jurnal, teliti kebenaran/keabsahan jurnal tsb.)				
4.	Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?		√	Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		√	Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		√	Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap		√	Tidak
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	√		Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya bernilai wajar?	√		Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah		√	Ya
saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai aset yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon				
Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)				
1.	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada excel Monitoring TK/TM e-Rekon&LK	966.146.000		
Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangkan kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTU secara absolut tsb ?				
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan	22.850.029.283		
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)				
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?		√	Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNBK Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx		√	Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		√	Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		√	Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		√	Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		√	Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/ Kejaksan terdapat pada Kementerian Kesehatan		√	Tidak

2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? <i>seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)</i>	√	Tidak
----	--	---	-------

Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		√	Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		√	Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? <i>(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)</i>		N/A	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		√	Tidak
TELAAH TERKAIT BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		√	Ada/Tidak
<i>Jika ada, berarti ada pendapatan & Belanja BLU yang belum di SP3B-BLU-kan, adakah penjelasannya ?</i>			
2. Apakah telah melakukan identifikasi transaksi belanja/pendapatan dengan Satker Pemerintah Pusat lainnya (Untuk eliminasi BLU) ?	√		Ya
Jika TIDAK Memiliki Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		N/A	Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		N/A	Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		N/A	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511	1.097.927.481		
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311	937.043.735		
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311	160.883.746		
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?	√		Tidak
<i>Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.</i>			
5 Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		√	Tidak
<i>Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07</i>			
LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		√	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		√	Tidak
3. Adakah beban bunga		√	Tidak
4. Adakah beban subsidi		√	Tidak
5. Adakah beban hibah		√	Tidak
6. Adakah beban transfer		√	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		√	Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)		√	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	√		Ya
<i>Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).</i>			
Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	√		Ya

Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"	√		Tidak
<i>Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya. Untuk Triwulan III, Tidak ada revaluasi aset tetap dan jurnal Take Out Revaluasi</i>			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	Sama		Sama
<i>Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111</i>			
Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	√		Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			
Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.			
NERACA			
	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		√	Tidak
<i>Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRUNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)</i>			
Dari kolom perbandingan antara 31 Desember 2019 dengan 31 Desember 2018 adakah			
3. Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		√	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2018, Apakah demikian?		√	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendhara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	√		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	√		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	√		Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	√		Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	√		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			

Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?		√	Ya
7. Adakah beban bansos?		√	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?		√	Ya
Pengecekan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?	√		Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?	√		Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?	√		Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca	√		Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	√		Ada/Tidak
- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	√		Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan September 2019 di e-Rekon&LK?		√	Tidak
Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"			
3. Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?		Tidak	Tidak
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	√		Ya
Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK yang meliputi ,		√	
1. Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")		√	
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")		√	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		√	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		√	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo			

SATKONS dan PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Satker Konsolidasian	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Jurnal tahun 2018 telah diselesaikan (Dinihilkan) ?	N/A		Ya
2. Apakah telah dilakukan Jurnal Take-Out Reval dengan benar ?	N/A		Ya
<i>Cek kebenaran apabila ada Jurnal baru di Tahun 2019</i>			
Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing KL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?	N/A		Ya
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	N/A		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan	N/A		Tidak
4. Apakah PNBPN telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	N/A		Ya
5. Adakan PNBPN digunakan langsung?	N/A		Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	N/A		Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	N/A		Ya
8.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LK (Neraca Percobaan)	√		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	√		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	√		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	√		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?			Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	N/A		Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	√		Ya

ANALISIS LAINNYA

Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	√		Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)- Hibah Langsung Barang	√		Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi 2019 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2019	√		Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (rumus perhitungan beban persediaan terlampir)	√		Ya

Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan e-Rekon&LK"

Lampiran Kertas Kerja Telaah LK

1. Terdapat selisih TK/TM sebesar Rp966.146.000 karena ada transfer Aset Tetap Renovasi (ATR) dari Eselon I Direktorat Jenderal Perbendaharaan ke Eselon I lainnya

Mengetahui

Kepala Bagian Keuangan

(Sakop)

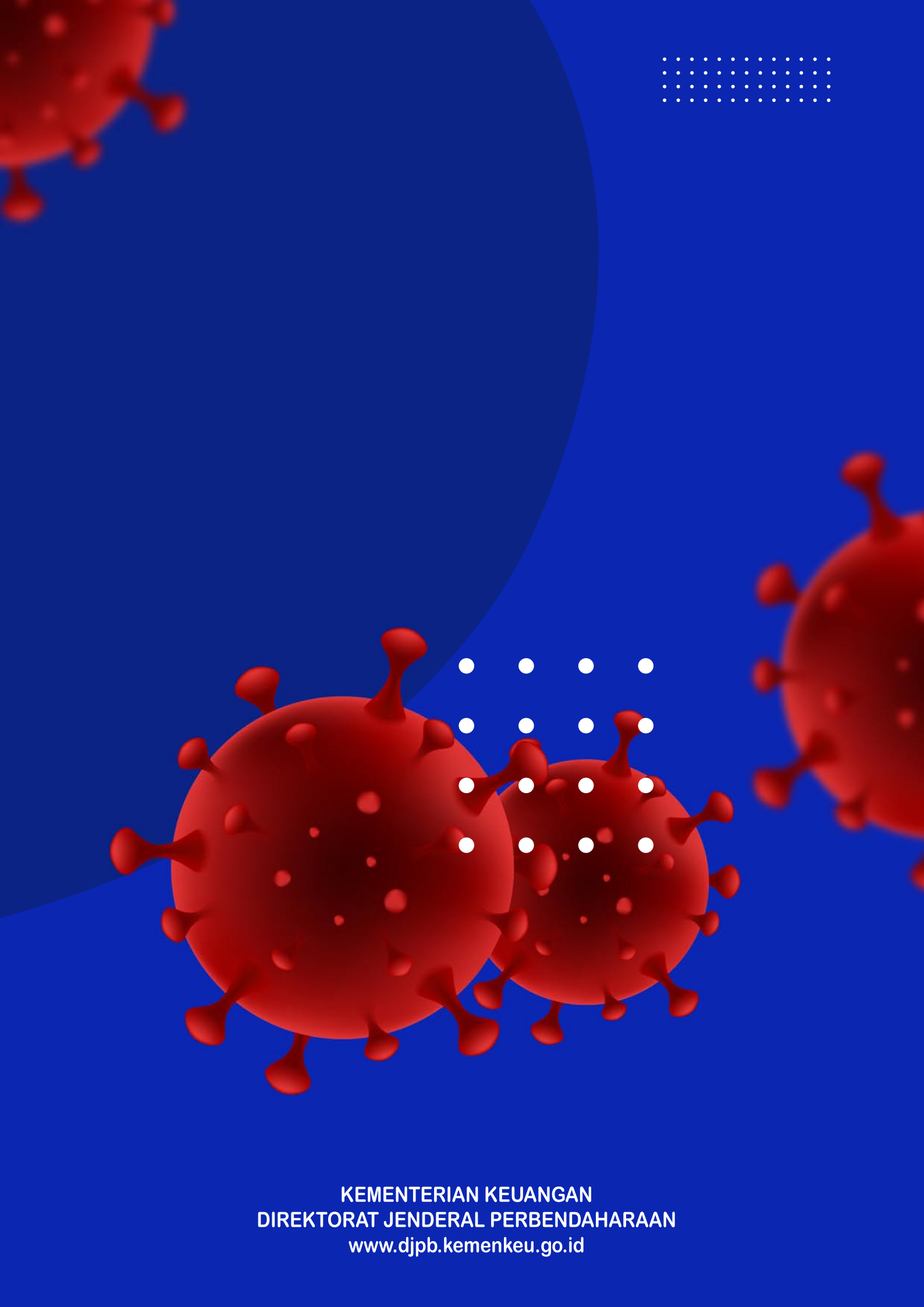
NIP196811221990011001

Jakarta, 4 Mei 2020

Penelaah,

(Sukadi)

NIP197206031994021002



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
www.djpb.kemenkeu.go.id